



Penerbit
Gita Lentera

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

Suharni suddin, S.Pd., M.Pd.

Liza Husnita, M. Pd.

Dr. Meri Erawati, S.S. M.Hum.

Meldawati, M.Pd.

Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd.

Dr. Ika Farihah Hentihu, S.Pd, M.Pd.

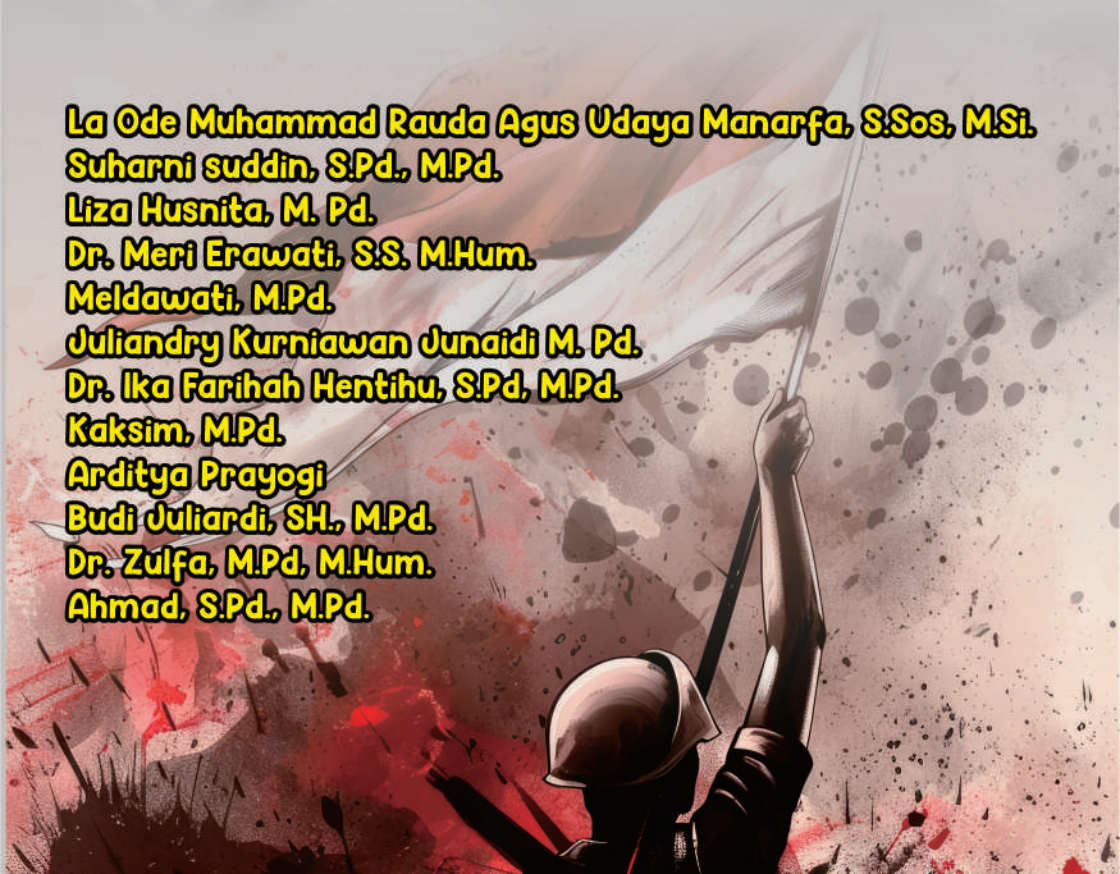
Kaksim, M.Pd.

Arditya Prayogi

Budi Juliardi, SH., M.Pd.

Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum.

Ahmad, S.Pd., M.Pd.



SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Penulis:

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

Suharni suddin, S.Pd., M.Pd.

Liza Husnita, M. Pd.

Dr. Meri Erawati, S.S. M.Hum.

Meldawati, M.Pd.

Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd.

Dr. Ika Fariyah Hentihu, S.Pd, M.Pd.

Kaksim, M.Pd.

Arditya Prayogi

Budi Juliardi, SH., M.Pd.

Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum.

Ahmad, S.Pd., M.Pd.

Editor:

Septriani, S.S., M.A.

Penerbit CV. Gita Lentera



Sejarah Nasional Indonesia

Oleh:

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

Suharni suddin, S.Pd., M.Pd.

Liza Husnita, M. Pd.

Dr. Meri Erawati, S.S. M.Hum.

Meldawati, M.Pd.

Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd.

Dr. Ika Fariyah Hentihu, S.Pd, M.Pd.

Kaksim, M.Pd.

Arditya Prayogi

Budi Juliardi, SH., M.Pd.

Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum.

Ahmad, S.Pd., M.Pd.

Editor:

Septriani, S.S., M.A.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: **978-623-8708-80-2**

Layouter : Tim Gita Lentera

Desain Sampul : Tim Gita Lentera

Penerbit : CV. Gita Lentera

Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel.

Pisang, Kec. Pauh, Padang, Sumatera Barat

Website: <https://gitalentera.com>

Email: git4lenter4@gmail.com

Anggota IKAPI

042/SBA/2023

Cetakan Pertama, November 2024

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Sejarah Nasional Indonesia ini dapat disusun secara lengkap dan informatif. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari era prasejarah, masa kerajaan-kerajaan Nusantara, penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah Indonesia bagi pembaca dari berbagai kalangan, baik akademisi, pelajar, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami sejarah bangsa. Sejarah adalah warisan penting yang perlu dijaga dan dipelajari, karena melalui sejarah kita dapat memahami identitas dan jati diri bangsa, sekaligus mengambil pelajaran berharga dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan agar buku ini dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Semoga Sejarah Nasional Indonesia ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta turut berkontribusi dalam memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Tim Penulis

SINOPSIS

Sejarah Nasional Indonesia merupakan karya epik yang mengajak pembaca untuk menelusuri perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga era kontemporer Indonesia. Buku ini mengupas berbagai babak penting dalam sejarah Indonesia, termasuk perkembangan kerajaan-kerajaan besar Nusantara; periode penjajahan oleh bangsa Eropa; perjuangan panjang menuju kemerdekaan; hingga dinamika politik, sosial, dan budaya setelah Indonesia merdeka.

Dikemas secara kronologis dan didukung oleh berbagai data serta fakta sejarah yang akurat, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting yang membentuk Indonesia sebagai bangsa. Setiap babnya dirancang untuk menggambarkan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana Indonesia tumbuh dan berkembang di tengah berbagai tantangan zaman.

Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami dan alur cerita yang menarik, buku ini akan memperkaya wawasan pembaca mengenai masa lalu Indonesia dan relevansi sejarah tersebut bagi kehidupan masa kini.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
PENGANTAR SEJARAH INDONESIA	1
<i>Oleh: La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si</i> ...1	
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Geografi dan Kondisi Alam Indonesia	2
1.3. Peradaban Awal di Nusantara	3
1.4. Periode Kesultanan dan Pengaruh Islam	4
1.5. Interaksi dan Akulturasi dengan Pengaruh Luar	5
1.6. Periode Kolonial dan Perubahan Sosial-Politik	6
1.7. Pergerakan Nasional dan Jalan Menuju Kemerdekaan	8
1.8. Penutup	9
ZAMAN PRA-SEJARAH INDONESIA	18
<i>Oleh: Suharni Suddin, S.Pd., M.Pd.</i>	18
2.1. Periodisasi Zaman Pra-sejarah Indonesia	18
2.2. Zaman Batu di Indonesia	21
2.3. Zaman Logam di Indonesia	23
2.4. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pra-sejarah	27
KERAJAAN-KERAJAAN KUNO	32
<i>Oleh: Liza Husnita, M.Pd.</i>	32
3.1. Teori masuknya Budaya India ke Indonesia	32

3.2. Kerajaan-Kerajaan Kuno di Indonesia.....	35
MASUKNYA AGAMA-AGAMA DI INDONESIA.....	54
<i>Oleh: Dr. Meri Erawati., S.S., M.Hum.</i>	<i>54</i>
4.1. Pendahuluan.....	54
4.2. Kepercayaan Masyarakat Indonesia Sebelum Masuknya Agama.....	55
4.3. Masuknya Agama Hindu dan Budha di Indonesia	57
4.4. Masuknya Agama Islam di Indonesia	60
4.5. Masuknya Agama Kristen di Indonesia.....	65
4.6. Masuknya Agama Konghuchu di Indonesia.....	68
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA.....	74
<i>Oleh: Meldawati, M.Pd.</i>	<i>74</i>
5.1. Konsep Kolonialisme dan Imperialisme.....	74
5.2. Latarbelakang dan Tujuan Kedatangan Kolonialisme ke Indonesia	75
5.3. Kongs Dagang Belanda VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)	77
5.4. Kolonialisme Belanda di Indonesia	78
5.5. Koloni Inggris di Indonesia masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles (1811-1816)	82
5.6. Pemerintahan Dari Inggris Ke Belanda di Indonesia.....	84
KEBANGKITAN NASIONAL.....	90
<i>Oleh: Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd</i>	<i>90</i>
6.1. Perjuangan Kedaerahan dalam Melawan Imprealisme.....	90
6.2. Menuju Kearah Pergerakan Nasional	95
6.3. Terciptanya Konsensus Kebangkitan Nasional	97
6.4. Nasionalisme Indonesia.....	98

PENDUDUKAN JEPANG DAN PERANG DUNIA II	103
<i>Oleh: Dr. Ika Fariyah Hentihu, M.Pd.</i>	103
7.1. Pendudukan Jepang.....	103
7.2. Perang Dunia II.....	110
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA	120
<i>Oleh: Kaksim, S.Pd.I., M.Pd.</i>	120
8.1. Pendahuluan.....	120
8.2. Proses Menuju Proklamasi	122
8.3. Proklamasi Kemerdekaan	124
8.4. Dampak dan Signifikansi.....	126
Penutup	128
INDONESIA PADA MASA REVOLUSI NASIONAL TAHUN 1945-1949 .	133
<i>Oleh: Arditya Prayogi</i>	133
9.1. Pengantar.....	133
9.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Tangan Asing: Suatu Latar	135
9.3. Revolusi Nasional Indonesia: Bentuk dan Dinamikanya.....	139
9.4. Penutup	144
MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN.....	150
<i>Oleh: Budi Juliardi, SH., M.Pd.</i>	150
10.1. Periode Demokrasi Liberal.....	151
10.2. Masa Demokrasi Terpimpin.....	155
ORDE BARU.....	160
<i>Oleh: Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum.</i>	160
11.1. Awal Pemerintahan Orde Baru	160
11.2. Sistem Pemerintahan Orde Baru	163

11.3. Akhir Masa Pemerintahan Orde Baru.....	166
REFORMASI DAN MASA TRANSISI	172
<i>Oleh: Ahmad, S.Pd., M.Pd.</i>	172
12.1. Situasi Pra Reformasi	172
12.2. Lahirnya Reformasi	177
12.3. Masa Transisi.....	180



PENGANTAR SEJARAH INDONESIA

Oleh: La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

1.1. Pendahuluan

Mempelajari sejarah Indonesia penting karena memungkinkan kita untuk memahami perjalanan bangsa dari masa ke masa, membangun kesadaran tentang identitas nasional, serta mengenali nilai-nilai yang telah membentuk karakter bangsa. Sejarah memberi kita pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk politik, sosial, dan budaya Indonesia, seperti era kerajaan-kerajaan, periode kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan (Susilo & Wulansari, 2021). Melalui sejarah, kita dapat memahami bagaimana Indonesia terbentuk sebagai negara yang multikultural dan merdeka. Selain itu, sejarah mengajarkan kita pelajaran dari kegagalan dan kesuksesan masa lalu, membantu masyarakat menghindari pengulangan kesalahan yang sama dan menginspirasi tindakan yang lebih bijak untuk masa depan (Putri & Nasiwan, 2020).

Secara definisi, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat (Saputra & Meilasari, 2021). Sejarah tidak hanya

menguraikan kejadian secara kronologis, tetapi juga menganalisis sebab-akibat dari peristiwa tersebut. Ruang lingkup sejarah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks Indonesia, sejarah mencakup periode-periode besar seperti masa prasejarah, era kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan Islam, penjajahan kolonial, hingga kemerdekaan dan perkembangan modern (Yulianti et al., 2018). Sejarah juga melibatkan berbagai metode penelitian, seperti penggunaan sumber primer dan sekunder, serta pendekatan interdisipliner dari ilmu lain seperti arkeologi, antropologi, dan sosiologi.

Dalam konteks modern, sejarah memiliki relevansi yang signifikan. Pemahaman sejarah membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menghadapi tantangan zaman sekarang, seperti globalisasi, konflik sosial, dan dinamika politik. Sejarah memberikan kerangka untuk memahami latar belakang berbagai isu kontemporer, sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga berdasar pada pemahaman yang mendalam (Alam, 2014). Selain itu, di era modern yang ditandai dengan informasi yang cepat berubah, sejarah berperan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan identitas, serta menjadi pedoman moral untuk menghadapi masa depan.

1.2. Geografi dan Kondisi Alam Indonesia

Letak geografis Indonesia yang strategis, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia), menjadikan Nusantara sebagai persimpangan penting jalur perdagangan internasional sejak zaman kuno (Ihalauw & Tandafatu, 2021). Posisi ini memungkinkan Indonesia menjadi pusat interaksi berbagai budaya, agama, dan ekonomi dari berbagai peradaban, seperti India, Cina, Arab, dan Eropa. Selain itu, keberadaan Indonesia di jalur pelayaran dunia membuatnya kaya akan sumber daya alam,

sehingga menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa luar yang ingin menguasainya, seperti bangsa-bangsa kolonial Eropa (Az-Zahroh et al., 2019).

Kondisi alam Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, iklim tropis, dan tanah yang subur memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Wilayah yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif memberikan tanah yang sangat subur, mendukung pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat (Nadjib & Pujiyanto, 2010). Hal ini mendorong perkembangan peradaban agraris, seperti kerajaan-kerajaan agraris besar di Jawa dan Sumatra. Selain itu, akses ke laut mendorong tumbuhnya peradaban maritim yang kuat, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang mengandalkan perdagangan antar pulau dan dengan bangsa asing. Kondisi geografis dan alam ini juga menciptakan keragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia (Handayani, 2020).

1.3. Peradaban Awal di Nusantara

Zaman pra-sejarah di Indonesia merujuk pada periode sebelum adanya catatan tertulis, ketika masyarakat mengandalkan tradisi lisan dan bukti material sebagai warisan sejarah (Mulyanto, 2023). Zaman ini dibagi menjadi beberapa fase berdasarkan perkembangan teknologi alat-alat yang digunakan oleh manusia purba. Zaman batu, misalnya, mencakup fase Paleolitikum (Zaman Batu Tua), Mesolitikum (Zaman Batu Tengah), dan Neolitikum (Zaman Batu Muda), di mana setiap fase ditandai oleh penggunaan peralatan yang semakin maju (Sugiyanto, 2018).

Bukti arkeologis dari zaman pra-sejarah di Indonesia ditemukan dalam bentuk artefak dan fosil, seperti alat-alat batu, sisa-sisa hunian gua, serta fosil manusia purba (Nurani, 1993). Penemuan

penting seperti *Homo erectus* (Manusia Jawa) di situs Sangiran dan Ngandong memberikan bukti bahwa Indonesia sudah dihuni sejak zaman Pleistosen (Widianto & Noerwidi, 2020). Selain itu, penemuan alat batu di situs Gua Harimau, Sumatra Selatan, dan lukisan dinding gua di Sulawesi Selatan menunjukkan jejak budaya dan kehidupan masyarakat pada masa prasejarah (Kaifu et al., 2007).

Kehidupan masyarakat pada masa prasejarah di Indonesia sangat bergantung pada alam. Pada fase Paleolitikum, manusia purba hidup sebagai pemburu-pengumpul, berburu hewan dan mengumpulkan tumbuhan liar untuk bertahan hidup (Timang et al., 2016). Pada fase Neolitikum, terjadi perubahan signifikan ketika masyarakat mulai bertani dan membentuk pemukiman tetap (Simanjuntak et al., 2010). Pengembangan teknologi, seperti pertanian dan domestikasi hewan, mendorong terbentuknya kehidupan yang lebih kompleks dan terorganisir, yang kelak menjadi dasar bagi perkembangan peradaban selanjutnya di Nusantara (Soedarto & Hendrarini, 2019).

1.4. Periode Kesultanan dan Pengaruh Islam

Kebangkitan kesultanan-kesultanan Nusantara terjadi pada abad ke-13 hingga abad ke-17, seiring dengan penyebaran Islam yang mulai menggantikan pengaruh Hindu-Buddha di berbagai wilayah (Sulistiono, 2021). Kesultanan-kesultanan ini berkembang pesat di pusat-pusat perdagangan maritim, terutama di pesisir Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Salah satu kesultanan terbesar yang pertama kali bangkit adalah Kesultanan Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-13 (Daly et al., 2019), yang kemudian diikuti oleh Kesultanan Buton, Kesultanan Demak, Kesultanan Malaka, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Aceh Darussalam (Hayati & Alimni, 2023). Faktor yang mempengaruhi kebangkitan ini adalah posisi strategis wilayah Nusantara di jalur perdagangan internasional yang mempertemukan

pedagang-pedagang dari Arab, India, Persia, dan Cina (Aftah et al., 2022).

Peran kesultanan dalam penyebaran agama Islam sangat signifikan. Kesultanan-kesultanan ini berfungsi sebagai pusat dakwah Islam, di mana para sultan memfasilitasi penyebaran ajaran agama melalui lembaga keagamaan dan perdagangan (Sartika & Sartika, 2021). Ulama dan pedagang Muslim dari luar, terutama dari Gujarat dan Arab, memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat (Anafah, 2017). Kesultanan juga mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum, misalnya melalui penerapan syariah sebagai dasar hukum kerajaan. Hal ini menciptakan legitimasi politik dan keagamaan bagi para sultan sebagai pemimpin agama dan negara.

Sistem politik kesultanan Nusantara umumnya berbasis monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan yang dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi (Hanif & Dwi, 2021). Sultan memegang kendali atas pemerintahan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Struktur politiknya hierarkis, dengan jabatan seperti bendahara, panglima, dan mangkubumi sebagai pejabat tinggi yang membantu menjalankan pemerintahan (Abbas et al., 2023). Budaya kesultanan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seni, dan arsitektur. Tradisi Islam seperti pengajian, penulisan naskah keagamaan, dan pendirian masjid agung menjadi bagian integral dari kebudayaan kesultanan, yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara sebagai bagian dari identitas Islam lokal (Jannati et al., 2021).

1.5. Interaksi dan Akulturasi dengan Pengaruh Luar

Pengaruh Hindu-Buddha dalam kebudayaan Nusantara dimulai sejak abad pertama Masehi dan berlangsung selama lebih dari seribu

tahun. Kebudayaan ini memberikan dampak besar dalam bidang seni, arsitektur, sistem pemerintahan, dan agama. Salah satu bukti terbesarnya adalah berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang menganut agama Hindu-Buddha (Purwanti, 2022). Peninggalan arsitektur monumental seperti Candi Borobudur dan Prambanan menunjukkan tingginya pencapaian peradaban Hindu-Buddha dalam seni dan keagamaan (Saputra & Suarka, 2018). Selain itu, sistem kasta yang berasal dari agama Hindu juga memengaruhi struktur sosial masyarakat di kerajaan-kerajaan tersebut (Muharani & Hudaidah, 2021).

Dampak masuknya pengaruh Islam mulai terasa pada abad ke-13, terutama di wilayah pesisir yang terlibat dalam perdagangan internasional. Islamisasi membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan, di mana banyak kerajaan Hindu-Buddha bertransformasi menjadi kesultanan Islam, seperti Kesultanan Demak dan Aceh (Ilyas, 2020). Selain itu, Islam memperkenalkan sistem hukum syariah, yang berpengaruh pada sistem pemerintahan dan hukum di Nusantara. Pedagang asing, terutama dari Arab, Persia, dan India, memainkan peran penting dalam transformasi sosial-budaya Nusantara (J., 2018). Melalui jalur perdagangan maritim, mereka tidak hanya memperkenalkan Islam tetapi juga memperkaya budaya lokal dengan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti teknologi, bahasa, dan adat istiadat (A.F. & Sahrasad, 2019). Interaksi ini menciptakan perpaduan budaya yang unik di Nusantara, membentuk identitas multikultural bangsa.

1.6. Periode Kolonial dan Perubahan Sosial-Politik

Kolonialisme Eropa, terutama oleh Belanda melalui VOC dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda, memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik di Nusantara (Susanto, 2017). Salah satu dampaknya adalah perubahan sistem pemerintahan

tradisional (Najamuddin, 2018). Banyak kerajaan lokal yang semula berdaulat mengalami pengurangan kekuasaan mereka, karena Belanda menerapkan kebijakan *divide et impera* (politik pecah belah) untuk menguasai wilayah Nusantara (J., 2018). Para raja dan sultan sering kali dijadikan penguasa boneka yang tunduk pada kepentingan Belanda, yang mengurangi kedaulatan politik lokal (Muhajir, 2018). Struktur birokrasi kolonial juga diperkenalkan, di mana kontrol pemerintahan terpusat pada Belanda, sementara elit lokal tetap diberi kekuasaan terbatas sebagai perantara (Irsyam, 2018).

Eksplorasi ekonomi oleh Belanda sangat terasa melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan pada abad ke-19 (Fadilah et al., 2023). Sistem ini memaksa petani lokal untuk menanam tanaman ekspor, seperti kopi, gula, dan lain-lain yang alih-alih tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri (Nuralia, 2020). Hal ini menyebabkan penurunan kesejahteraan rakyat, karena lahan subur yang sebelumnya digunakan untuk pertanian lokal dialihkan ke produksi komoditas yang menguntungkan Belanda (Sjah et al., 2022). Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran mengubah struktur agraris masyarakat, menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih lebar antara elite lokal yang bekerja sama dengan Belanda dan masyarakat petani yang miskin (Wihardyanto & Rahmi, 2020).

Reaksi masyarakat Nusantara terhadap kolonialisme sangat bervariasi, mulai dari perlawanan bersenjata hingga pergerakan diplomatik (Soemardjan, 1963). Banyak pemberontakan lokal yang meletus, seperti Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Aceh (1873-1904), yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan kolonial (Rahman, 2007). Namun, di akhir abad ke-19, muncul pergerakan intelektual dan nasionalis yang dipelopori

oleh kelompok-kelompok pribumi terpelajar. Organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam berperan dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan menentang kolonialisme dengan cara yang lebih diplomatis. Pergerakan ini menjadi awal dari munculnya kesadaran nasional yang akhirnya mencapai puncaknya dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945.

1.7. Pergerakan Nasional dan Jalan Menuju Kemerdekaan

Lahirnya nasionalisme modern di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan kolonial yang menindas, perubahan sosial akibat modernisasi, serta inspirasi dari gerakan nasionalis di luar negeri (Sulistiyono, 2018). Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, semakin banyak pribumi yang memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial dan terpapar pada gagasan-gagasan tentang kesetaraan, kemerdekaan, dan nasionalisme (Rahmawati & Airlanda, 2023). Perubahan ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya identitas nasional, yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi politik dan sosial, seperti Budi Utomo pada tahun 1908, yang sering dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional (Irawati et al., 2022).

Strategi perjuangan menuju kemerdekaan dilakukan melalui berbagai cara. Di satu sisi, terdapat perjuangan bersenjata, seperti perlawanan lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Diponegoro dan Teuku Umar hingga masa berikutnya muncul gerakan nasionalis yang lebih terorganisir dan diplomatis (Novianti, 2021). Organisasi seperti Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Perhimpunan Indonesia memfokuskan perjuangan mereka pada advokasi, pendidikan politik, dan pembentukan kesadaran nasional (Suryadinata, 1978).

Selain itu, strategi penting adalah persatuan di antara berbagai elemen bangsa yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928

(Malik, 2020), yang menegaskan komitmen terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Perjuangan ini mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang merupakan hasil dari perpaduan perjuangan bersenjata, diplomasi internasional, dan persatuan nasional.

1.8. Penutup

Dalam penutup bab ini, penting untuk menekankan bahwa sejarah Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan dinamika dan perubahan. Dari peradaban awal yang dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, hingga masuknya Islam yang membawa transformasi sosial dan politik, serta kolonialisme Eropa yang mengubah struktur masyarakat, semuanya merupakan bagian integral dari identitas bangsa ini. Kesultanan-kesultanan yang muncul menunjukkan bagaimana kekuasaan dan budaya dapat beradaptasi dengan tantangan zaman.

Nasionalisme modern, yang lahir sebagai respons terhadap penindasan kolonial, menggambarkan kesadaran kolektif rakyat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan. Melalui perjuangan yang beragam—baik diplomatik maupun bersenjata—bangsa ini mampu mengatasi berbagai rintangan untuk mencapai kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momen puncak dari proses panjang ini, menandai lahirnya negara yang berdaulat dan berkeinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, studi sejarah Indonesia tidak hanya penting untuk memahami masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang dalam membangun identitas dan karakter bangsa. Kesadaran akan perjalanan sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan menjaga persatuan serta kesatuan di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Darmawijaya, D., & Sudrajat, A. (2023, June 17). POLITICAL BEHAVIOUR OF SULTAN HASANUDDIN AND SULTAN NUKU: Islamic Political Perspective. , 29(1), 136-136. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1171>
- A.F., A G., & Sahrasad, H. (2019, June 12). CULTURE AND RELIGION: THE MOVEMENT AND THOUGHT OF ISLAM NUSANTARA NOWADAYS, A SOCIO-CULTURAL REFLECTION. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 21(1), 1-1. <https://doi.org/10.18860/el.v21i1.6513>
- Aftah, C., Daniah, R., & Raharja, B. (2022, October 31). China International Strategy and How to Pursue It. , 22(3), 1754-1754. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2856>
- Alam, B. (2014, July 16). Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan. , 0(54). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i54.3325>
- Anafah, N. (2017, February 3). TRADISI MALEMAN di Masjid Agung Demak. , 3(2). <https://doi.org/10.14710/sabda.v3i2.13239>
- Az-Zahroh, S F., Thariq, Z Z A., Surahman, E., Widyasari, C M., Qolbi, M S., & Chulashotud, R C R. (2019, November 11). Developing Ethic Game (Ethnomathematics Game): The Instructional Media of Culture Mathematics with Tringo by Ki Hadjar Dewantara. , 26(2), 43-50. <https://doi.org/10.17977/um047v26i22019p043>
- Daly, P., Sieh, K., Seng, T Y., McKinnon, E E., Parnell, A., Feener, R M., Bakhtiar, B., & Majewski, J. (2019, May 28). Archaeological evidence that a late 14th-century tsunami devastated the coast of northern Sumatra and redirected history. National Academy of Sciences, 116(24), 11679-11686. <https://doi.org/10.1073/pnas.1902241116>

- Fadilah, R., Irayani, P., Azhari, I., & Tanjung, S. (2023, July 1). KOTA DEPOK: SEJARAH DAN HARI JADINYA. State University of Medan, 8(2), 155-155. <https://doi.org/10.24114/ph.v8i2.46435>
- Hanif, M., & Dwi, D. (2021, December 23). THE ROLE OF ISLAMIC GOVERNMENT IN BUMI MELAYU. , 4(2), 11-18. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.107>
- Hayati, E Q., & Alimni, A. (2023, April 30). ISLAMISASI AJARAN ISLAM DI NUSANTARA. , 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.36085/eltadib.v3i1.5683>
- Handayani, D F. (2020, March 31). KATEGORI FATIS DAN KONTEKS PENGGUNAANNYA DALAM BAHASA MINANGKABAU DIKENAGARIAN KAMBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN (Phatic Categories dan Context of use in MinangKabau Language Kenagarian Kambang Kabupaten Pesisir Selatan). , 4(2), 111-115. <https://doi.org/10.30743/bahastra.v4i2.3155>
- Ihalauw, J J., & Tandafatu, N K. (2021, May 30). Geographical Information System for Indonesian Tourist Destinations. , 4(2), 645-645. <https://doi.org/10.30645/ijistech.v4i2.105>
- Ilyas, M. (2020, December 29). Planting the Character of Islamic Education During The Demak Kingdom and Its Relevance Today. , 4(2), 181-181. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i2.92>
- Irsyam, T W M. (2018, March 31). Kristenisasi di Pulau Dewata pada Era Kolonial Belanda. Diponegoro University, 3(1), 43-43. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.18091>
- Irawati, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022, December 29). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Landasan Pendidikan Vokasi di Era Kurikulum Merdeka. , 7(4). <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i4.4493>

- J., M S S. (2018, December 31). PANGGUNG KEINDONESIAAN Berebut atau Berbagi?. , 13(2), 154-154. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.154-157>
- Jannati, Z., Rusli, R., & Mardiah, A. (2021, December 31). Konsep Islam Melayu dan Islam Nusantara. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 22(2), 16-35. <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i2.10825>
- Kaifu, Y., Arif, J., Yokoyama, K., Baba, H., Suparka, E., & Gunawan, H. (2007, February 1). A new Homo erectus molar from Sangiran. Elsevier BV, 52(2), 222-226. <https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2006.08.012>
- Malik, A. (2020, March 20). Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme. , 6(1), 101-108. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4401>
- Muhajir, A. (2018, February 2). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. , 1(2), 160-171. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515>
- Muharani, A., & Hudaidah, H. (2021, May 10). Dampak Masuknya Hindu Budha Terhadap Pendidikan di Indonesia. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 3(3), 928-934. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.473>
- Mulyanto, H. (2023, May 31). Penggunaan Naskah Kuno dan Arsip dalam Historiografi Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis. , 14(1), 45-63. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v14i1.3301>
- Najamuddin. (2018, June 1). Reorganization of Government Structure and Local Officers Shift:Dutch Colonial Bureaucracy against South Sulawesi Region. IOP Publishing, 1028, 012185-012185. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012185>

- Nadjib, M., & Pujiyanto, P. (2010, October 14). Health Expenditure Patterns by Marginal and Vulnerable Groups. University of Indonesia, 6(2). <https://doi.org/10.7454/msk.v6i2.99>
- Nurani, I A. (1993, May 28). Persebaran Tradisi Beliang Persegi dan Kapak Lonjong : Perpaduan di Kalumpang. Q25458990, 13(1), 1-9. <https://doi.org/10.30883/jba.v13i1.561>
- Nuralia, L. (2020, December 29). JEJAK BUDAYA AUSTRONESIA DI KAWASAN PERKEBUNAN PENINGGALAN ZAMAN HINDIA BELANDA. Balai Arkeologi Jawa Barat. <https://doi.org/10.24164/prosiding.v3i1.18>
- Putri, D C., & Nasiwan, N. (2020, January 1). Harmony in Diversity: The Implementation of Multicultural Education at Indonesian Schools. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.035>
- Purwanti, R. (2022, January 1). The Influence of Hindu-Buddhist on Islamic Tombs in Palembang. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.023>
- Rahmawati, S., & Airlanda, G S. (2023, January 1). Efektivitas Model Problem Based Learning dan Project Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.
- Rahman, S A. (2007, October 1). Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947. University of Indonesia, 9(2), 154-154. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.210>
- Sartika, L D., & Sartika, L D. (2021, September 21). ANALISIS PERANAN SUNAN GIRI DALAM PROSES ISLAMISASI DI JAWA BERDASARKAN FUNGSI AGIL. , 1(1), 23-30. <https://doi.org/10.30872/langgong.v1i1.674>
- Saputra, A W., & Meilasari, P. (2021, July 11). Pentigraf sebagai inovasi pembelajaran sejarah pada masyarakat di era disrupsi. Muhammadiyah University of Malang, 6(2), 131-141. <https://doi.org/10.22219/kembara.v6i2.13522>

- Saputra, I M D., & Suarka, I N. (2018, April 29). Sinkretisme Siwa Budha dalam Lontar Candra Bhairawa. *Udayana University*, 8(1), 201-201. <https://doi.org/10.24843/jkb.2018.v08.i01.p11>
- Sjah, T., Halil, H., Budastra, I K., & Tanaya, I G L P. (2022, September 30). Peningkatan Kapasitas Pengusaha Kopi di BTN Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. , 3(3), 105-109. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v3i3.353>
- Simanjuntak, T., Sémah, F., & Gaillard, C. (2010, September 1). The palaeolithic in Indonesia: Nature and chronology. Elsevier BV, 223-224, 418-421. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.07.022>
- Soedarto, T., & Hendrarini, H. (2019, June 28). PENGEMBANGAN PERILAKU PETANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA. , 14(2). <https://doi.org/10.33005/scan.v14i2.1486>
- Soemardjan, S. (1963, January 1). Some Social and Cultural Implications of Indonesia's Unplanned and Planned Development. Cambridge University Press, 25(1), 64-90. <https://doi.org/10.1017/s0034670500004265>
- Sugiyanto, S B. (2018, December 4). BELIUNG PERSEGI: SEBARAN DAN FUNGSI NYA DI KALIMANTAN (STONE ADZE: ITS DISTRIBUTION AND FUNCTION IN KALIMANTAN). , 12(2), 89-89. <https://doi.org/10.24832/nw.v12i2.302>
- Sulistiyo, S T. (2018, March 31). Nasionalisme, Negara-Bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlu kah?. Diponegoro University, 3(1), 3-3. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17912>
- Wihardyanto, D., & Rahmi, D H. (2020, June 30). PENGARUH KOLONIALISASI BELANDA DI KAWASAN PUSAT KOTA PULAU JAWA : SEBUAH KAJIAN LITERATUR. Alauddin Islamic State University, 7(1), 15-15. <https://doi.org/10.24252/nature.v7i1a2>

- Widianto, H., & Noerwidi, S. (2020, November 13). Saatnya Menengok ke Barat: Sebuah Interpretasi Baru Tentang Distribusi Temuan Homo Erectus di Jawa. *Q25458990*, 40(2), 153-178. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i2.598>
- Yulianti, E., Sudewa, I K., & Nama, I K. (2018, August 1). Kepercayaan Tradisional Masyarakat Jawa dalam Novel Suti Karya Sapardi Djoko Damono: Kajian Sosiologi Sastra. Udayana University, 579-579. <https://doi.org/10.24843/jh.2018.v22.i03.p02>

PROFIL PENULIS



La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.
Dosen Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

Penulis lahir di Gelora (Jakarta Pusat) pada tanggal 18 November 1984. Menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2012. Mengenyam pendidikan Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2013 - 2020. Penulis bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau. Email laodemraudaamanarfa@unidayan.ac.id dan rauda.ode@gmail.com

Telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel maupun buku, antara lain: [1] Artikel berjudul Pemikiran Soekarno Tentang Pemuda dan Perubahan Sosial (2010), dipublikasikan pada Jurnal Akademika UNIDAYAN, Volume 7, Edisi September 2010; [2] Artikel berjudul Strategi Nafkah Dan Pola Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Pengrajin Gula Kelapa Studi Di Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (2015), dipublikasikan pada Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 3, Edisi 3; [3]. Artikel berjudul The Order of the City Three Fortresses Adjacent to the Sultanate of Buton in the Local Culture-Based Hilly Landscape of Baubau City of Southeast Sulawesi (2023), dipublikasikan pada Jurnal GMPI Conference Series, Volume 2, Edisi Januari 2023; [4] Artikel berjudul Teori Diskursus dan Konseptualisasi Diskursus Lingkungan (2023), dipublikasikan pada Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 8, Edisi Juni 2023; [5] Artikel berjudul Analisis Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Indonesia dari Masa ke Masa (Periode 1971 – 2012) (2023), dipublikasikan pada Jurnal Sosiologi Miabhari, Volume 1, Edisi 1; [6] Buku berjudul Komunikasi Sosial Pembangunan Terpadu (2023), dipublikasikan oleh Tohar Media; [7] Buku berjudul Teori Sosiologi (2024), dipublikasikan oleh Eureka; [8] Buku berjudul Perekonomian Indonesia Dalam Konteks Multisektor (2024), dipublikasikan oleh Kamika Jaya Aquatic.

ZAMAN PRA-SEJARAH INDONESIA

Oleh: Suharni Suddin, S.Pd., M.Pd.

2.1. Periodisasi Zaman Pra-sejarah Indonesia

Zaman Pra-sejarah dimulai ketika manusia pertama kali muncul di bumi, jauh sebelum mereka mengenal tulisan. Poesponegoro (2019) mengemukakan bahwa sejarah alam semesta jauh lebih panjang daripada sejarah manusia. Manusia baru muncul sekitar tiga juta tahun yang lalu, pada periode Pleistosen, yang merupakan bagian geologi paling muda tetapi paling tua dalam sejarah manusia. Kala Pleistosen berlangsung dari 3 juta hingga 10 ribu tahun lalu, dengan beberapa kali glasiasi atau zaman es. Selama glasiasi, suhu bumi menurun, dan gletser meluas ke wilayah-wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia, diselingi oleh masa interglasial ketika suhu naik dan gletser mundur.

Kajian tentang masa prasejarah dimulai sejak kemunculan manusia dan mencakup materi mengenai kondisi bumi sebelum adanya manusia. Ahmad (2010) menjelaskan bahwa ada empat aspek utama dalam pembahasan masa prasejarah, yaitu: (1) perkembangan bumi sebelum kehadiran manusia, (2) evolusi manusia, (3) kehidupan

manusia pada zaman batu, dan (4) kehidupan manusia pada masa perundagian. Sehingga, keseluruhan aspek tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang perjalanan panjang evolusi dan kehidupan manusia sejak awal mula hingga memasuki peradaban yang lebih maju.

Memahami kehidupan masyarakat pra-sejarah dapat memberikan wawasan tentang kehidupan di masa lampau, mengontekstualisasikannya untuk masa kini, serta menjadi dasar untuk memprediksi masa depan. Bayangkan masa ketika kehidupan manusia masih sangat sederhana, di mana mereka sepenuhnya bergantung pada alam. Pada masa itu, manusia belum mampu menuliskan kisah hidupnya, sehingga pengetahuan kita saat ini berasal dari jejak-jejak yang mereka tinggalkan, seperti alat-alat batu, lukisan di dinding gua, dan fosil-fosil yang ditemukan oleh para arkeolog. Jejak-jejak ini tidak hanya memberikan gambaran tentang cara hidup mereka, tetapi juga mengungkapkan perkembangan teknologi, kepercayaan, dan adaptasi mereka terhadap lingkungan seiring berjalannya waktu

Menurut Syafei (2020) Jika didasarkan pada kemampuan teknologi berdasarkan beberapa alat yang ditinggalkan, maka perodisasi masyarakat pra-sejarah dapat dibagi menjadi berbagai tahap zaman batu, yang terdiri dari paleolitikum, mesolitikum, dan neolitikum. Penyebutan “zaman batu” merujuk pada kenyataan bahwa sebagian besar hasil kebudayaan pada periode ini dibuat dari batu, mulai dari yang sederhana dan kasar hingga yang lebih halus dan terampil. Perbedaan dalam tingkat kesederhanaan dan kekasaran peralatan ini mencerminkan usia alat tersebut. Semakin sederhana dan kasar alatnya, maka dapat dipastikan berasal dari periode yang lebih tua. Sebaliknya, semakin halus dan terampil peralatannya, semakin muda usia alat tersebut. Secara umum, zaman

batu terbagi menjadi tiga periode utama: zaman batu tua (paleolitikum), zaman batu tengah (mesolitikum), dan zaman batu muda (neolitikum). Selain ketiga periode tersebut, dikenal pula zaman batu besar (megalitikum), serta zaman logam yang mencakup zaman tembaga, perunggu, dan besi, masing-masing membawa inovasi teknologi dan perubahan sosial yang signifikan dalam perkembangan kebudayaan manusia.

Perubahan dalam teknologi alat yang ditemukan dari setiap periode ini menunjukkan lebih dari sekadar kemajuan dalam teknik pembuatan alat, melainkan juga menggambarkan transformasi mendalam dalam kehidupan masyarakat pra-sejarah. Pada zaman paleolitikum, alat-alat yang digunakan umumnya terbuat dari batu yang dipukul atau dipahat secara kasar, mencerminkan kehidupan yang masih sangat bergantung pada berburu dan pengumpulan. Kemajuan menuju zaman mesolitikum menunjukkan adanya perbaikan dalam teknik pembuatan alat, dengan penemuan alat-alat kecil dan lebih halus yang mempermudah aktivitas sehari-hari seperti memotong dan mengukir.

Peralihan ke zaman neolitikum membawa revolusi besar dengan pengembangan pertanian dan domestikasi hewan, yang memungkinkan masyarakat untuk menetap dan membangun komunitas yang lebih terstruktur. Inovasi seperti alat pertanian yang lebih efisien dan teknik pembuatan tembikar menunjukkan kemampuan manusia untuk mengadaptasi dan mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, zaman batu besar atau megalitikum memperkenalkan struktur monumental yang menunjukkan pencapaian besar dalam organisasi sosial dan spiritual masyarakat. Akhirnya, dengan kedatangan zaman logam, yang meliputi tembaga, perunggu, dan besi, terlihat adanya lompatan besar dalam teknologi dan ekonomi, karena logam memungkinkan

pembuatan alat dan senjata yang jauh lebih tahan lama dan efektif. Setiap tahap ini, dengan kemajuan teknologinya, mencerminkan kemajuan peradaban manusia dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat pra-sejarah beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman.

2.2. Zaman Batu di Indonesia

Zaman Batu di Indonesia merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan manusia di Nusantara, yang berlangsung sebelum ditemukannya teknologi pengolahan logam. Zaman ini disebut demikian karena alat-alat yang digunakan manusia pada masa itu sebagian besar terbuat dari batu. Noor & Mansyur (2015) Zaman batu sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) zaman batu tua (paleolitikum), (2) zaman batu tengah (mesolitikum), dan (3) zaman batu muda (neolitikum). Di samping ketiga zaman batu itu, juga dikenal zaman batu besar (megalitikum). Sementara zaman logam: (1) zaman tembaga, (2) zaman perunggu dan (3) zaman besi, dengan masing-masing fase menunjukkan kemajuan signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi manusia.

Masa prasejarah dapat dipahami melalui perkembangan teknologi peralatan hidup yang digunakan manusia. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Menurut Wiradnyana (2011) secara umum, masa prasejarah terbagi menjadi empat periode utama berdasarkan jenis teknologi yang digunakan:

1. Masa Paleolitikum (Zaman Batu Tua)

Pada masa ini, manusia menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, terutama terbuat dari batu yang hanya dipangkas kasar untuk menghasilkan bentuk yang diperlukan. Peralatan ini

digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Masa Paleolitikum adalah periode paling awal dalam sejarah manusia, yang dimulai sejak manusia pertama kali muncul dan berlangsung hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu.

2. Masa Mesolitikum (Zaman Batu Tengah)

Teknologi peralatan pada masa Mesolitikum mengalami perkembangan lebih lanjut dibandingkan Paleolitikum. Alat-alat yang dibuat lebih halus, menggunakan teknik peretusan, di mana batu-batu diproses dengan cara dipecah atau ditajamkan untuk menghasilkan peralatan yang lebih efektif. Masa ini terjadi sekitar 10.000 hingga 6.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efisien.

3. Masa Neolitikum (Zaman Batu Baru)

Masa Neolitikum adalah era revolusioner dalam kehidupan manusia prasejarah karena munculnya teknik bercocok tanam dan domestikasi hewan. Dengan adanya pertanian, manusia mulai menetap dan membangun pemukiman tetap. Peralatan yang digunakan pun semakin canggih, termasuk kapak batu yang diasah. Masa ini berlangsung sekitar 6.000 tahun yang lalu hingga awal Masehi.

Perkembangan teknologi pada masa prasejarah menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap periode mencerminkan perubahan dalam penggunaan peralatan dan pengelolaan sumber daya yang semakin kompleks, menandakan adanya kemajuan dalam kemampuan berpikir dan bertahan hidup. Pada masa Paleolitikum, manusia menggunakan alat-alat sederhana yang hanya berfungsi untuk bertahan hidup melalui aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian, pada masa Mesolitikum, teknologi mulai berkembang dengan lebih halus dan efektif, mencerminkan

kemampuan manusia yang lebih maju dalam memanfaatkan lingkungannya.

Perkembangan teknologi yang lebih canggih mencapai puncaknya pada masa Neolitikum, di mana manusia mulai meninggalkan pola hidup nomaden dan beralih ke kehidupan yang lebih menetap dengan mengembangkan pertanian dan domestikasi hewan. Kemajuan ini memungkinkan manusia untuk membangun komunitas yang lebih kompleks dan menetapkan dasar bagi peradaban modern. Penggunaan alat-alat yang diasah dengan baik, seperti kapak batu, menjadi simbol dari inovasi yang terjadi pada masa tersebut. Semua perubahan ini tidak hanya menunjukkan evolusi peralatan teknis, tetapi juga mencerminkan peningkatan kemampuan manusia dalam mengorganisasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi peralatan pada masa prasejarah tidak hanya sekadar mencerminkan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga menjadi cerminan dari kemajuan intelektual dan sosial yang berkelanjutan. Proses ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari perubahan cara hidup manusia itu sendiri, serta kemampuannya untuk terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, masa prasejarah merupakan fondasi penting bagi kemunculan peradaban manusia modern, yang terus berkembang hingga saat ini.

2.3. Zaman Logam di Indonesia

Zaman Logam di Indonesia merupakan periode penting yang menandai perkembangan teknologi dan peradaban masyarakat Nusantara. Penggunaan logam, khususnya perunggu dan besi, mengubah cara hidup masyarakat, baik dalam hal teknologi,

perdagangan, maupun struktur sosial. Menurut (Syafei, 2020) Pada Zaman Perunggu, yang diperkirakan dimulai sekitar 500 SM hingga awal Masehi, bangsa Deutro Melayu mulai memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalur barat. Kebudayaan mereka lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan bangsa Proto Melayu, terutama dalam penggunaan logam, seperti perunggu dan besi. Kebudayaan bangsa Deutro Melayu ini sering disebut sebagai Kebudayaan Dong Son, yang dinamai berdasarkan sebuah kebudayaan di daerah Tonkin, tempat asal mereka, yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan di Indonesia. Beberapa hasil kebudayaan perunggu yang penting di Indonesia, seperti kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu, mencerminkan kemajuan teknik dan budaya pada masa itu.

Manusia mulai mengembangkan teknik pembuatan peralatan dari campuran tembaga dan timah, yang dikenal sebagai perunggu. Artefak-arterfak ini, termasuk bejana perunggu, nekara, dan moko, ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan kemampuan teknis dan artistik masyarakat setempat. Bejana perunggu sering digunakan dalam upacara ritual atau sebagai simbol status sosial, sementara nekara, sebuah drum besar dari perunggu, memiliki peran penting dalam upacara keagamaan. Moko, yang banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia, berfungsi sebagai alat pembayaran dan simbol sosial dalam upacara adat. Teknik cetak lilin hilang yang digunakan dalam pembuatan benda-benda perunggu ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang mengesankan untuk zamannya. Menurut (Syafei, 2020) ada dua jenis teknik pembuatan alat logam, yaitu menggunakan cetakan batu yang disebut *bivalve* dan cetakan tanah liat serta lilin yang dikenal sebagai *acire perdue*. Periode ini juga dikenal sebagai masa Perundagian, karena dalam masyarakat muncul golongan undagi, yaitu kelompok yang terampil

dalam pekerjaan tangan dan kerajinan.

Pada masa ini juga, perdagangan lintas wilayah juga mengalami perkembangan pesat, dengan Indonesia menjadi bagian dari jaringan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara dan Asia Timur. Perdagangan ini membawa pengaruh budaya asing yang saling berinteraksi dan berakulturasi dengan budaya lokal di Indonesia. Salah satu kebudayaan asing yang memberikan pengaruh besar terhadap peninggalan masyarakat Indonesia pada Zaman Perunggu (Bronze Age) adalah kebudayaan Vietnam yang dikenal sebagai Kebudayaan Dong Son. Menurut Wijaya (2013) kebudayaan Dong Son sebenarnya sudah mulai masuk dan memberikan dampaknya sejak era Mesolitikum hingga Megalitikum, namun pengaruh terbesarnya dirasakan pada Zaman Perunggu. Salah satu pengaruh signifikan kebudayaan Dong Son di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya adalah teknik pengolahan perunggu. Beberapa peninggalan seni budaya dari Zaman Perunggu mencakup patung, bejana, perhiasan, serta benda bersejarah berupa Nekara.

Pengaruh ini terlihat jelas pada motif-motif hiasan yang terdapat pada nekara dan artefak lainnya. Selain mempengaruhi teknologi dan seni, budaya Dongson juga membawa dampak dalam aspek-aspek sosial dan keagamaan, terutama melalui penggunaan nekara dalam upacara ritual dan pemakaman. Dengan demikian, peninggalan Nekara dan karya-karya seni dari Zaman Perunggu menjadi bukti penting dari pengaruh budaya Dong Son terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia.

Setelah Zaman Perunggu, masyarakat Indonesia mulai memasuki Zaman Besi yang dimulai sekitar awal abad Masehi, membawa perubahan signifikan dalam teknologi dan kehidupan sosial, yang semakin memperkaya peradaban nusantara dengan berbagai inovasi dalam pemanfaatan logam, terutama besi.

Pada masa ini, manusia sudah mampu melebur besi dari bijihnya, meski prosesnya lebih sulit daripada tembaga dan perunggu karena memerlukan suhu sekitar 3500 °C. Masyarakat Indonesia mulai mengenal logam, termasuk campuran tembaga dan timah, yang dibuktikan dengan penemuan benda-benda perunggu di berbagai wilayah. Beberapa benda tersebut dibuat dengan cetakan sederhana dari batu atau tanah liat. Perkembangan teknologi ini menunjukkan bahwa manusia mulai memanfaatkan logam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh perunggu, sementara alat-alat besi ditemukan dalam jumlah terbatas, dan kebudayaan Megalitikum dengan batu besar berkembang di antara zaman Neolitikum dan zaman logam (Syafei, 2020).

Hal ini berarti bahwa pada periode ini, besi mulai digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, menggantikan perunggu dalam pembuatan alat-alat dan senjata. Besi yang lebih kuat dan tahan lama dari perunggu, memberikan manfaat besar dalam bidang pertanian, perburuan, dan peperangan. Alat-alat seperti cangkul, bajak, tombak, dan pedang dari besi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Penguasaan teknologi pembuatan besi, termasuk penempaan dan pengendalian suhu, memungkinkan terciptanya peralatan yang lebih baik dan kompleks.

Perkembangan teknologi besi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial. Orang-orang yang memiliki akses dan keterampilan dalam memproduksi alat-alat dari besi mulai menduduki posisi penting dalam masyarakat. Besi menjadi komoditas berharga yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan, memperkuat stratifikasi sosial. Para pemimpin dan penguasa, yang memiliki akses lebih besar terhadap teknologi besi, biasanya memiliki

kekuasaan yang lebih besar, sementara lapisan bawah masyarakat hanya memiliki akses terbatas terhadap peralatan besi yang lebih sederhana. Zaman Logam, baik Perunggu maupun Besi, menandai titik balik penting dalam sejarah perkembangan teknologi dan peradaban di Indonesia, dengan dampak yang mendalam terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa itu.

Dengan demikian, Zaman Logam di Indonesia, melalui perkembangan teknologi perunggu dan besi, tidak hanya mengubah dinamika kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Nusantara. Kemajuan ini menandai babak baru dalam sejarah peradaban yang berpengaruh hingga masa-masa berikutnya, membuktikan bahwa inovasi teknologi selalu menjadi fondasi penting bagi perkembangan suatu peradaban.

2.4. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pra-sejarah

Kehidupan sosial budaya masyarakat pra-sejarah memiliki kekayaan yang beragam, terutama terkait dengan sistem kepercayaan, seni, budaya, dan ekonomi. Menurut Sedyawati (2010) perkembangan sistem kepercayaan pada manusia pra-sejarah menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pemahaman dan praktik terkait dengan tata cara peribadatan. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana ritual keagamaan dilakukan. Tata peran pelaku merujuk pada pembagian tugas atau peran orang-orang yang terlibat dalam upacara tersebut, misalnya, ada pemimpin upacara atau peserta lainnya dengan tugas tertentu. Selain itu, tata benda merujuk pada penggunaan benda-benda khusus yang memiliki nilai simbolis dalam ritual, seperti patung, alat musik, atau benda-benda persembahan lainnya. Keseluruhan proses ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban ritual yang diyakini membawa hubungan harmonis antara manusia dan kekuatan gaib yang mereka percayai.

Selain itu, kepercayaan terhadap roh nenek moyang sangat kuat, di mana mereka sering melakukan ritual penghormatan kepada roh leluhur untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan. Salah satu bentuk manifestasi dari kepercayaan ini adalah keberadaan punden berundak yang berfungsi sebagai tempat persembahan kepada para roh nenek moyang (Syafei, 2020).

Seni dan budaya juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat pra-sejarah. Salah satu bentuk seni yang ditemukan adalah seni lukis gua, di mana mereka melukis cap tangan serta gambar binatang di dinding-dinding gua. Lukisan-lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna religius dan magis. Selain seni lukis, masyarakat pra-sejarah juga menghasilkan seni pahat dan patung megalitik. Patung-patung ini sering kali berbentuk figur manusia atau hewan dan digunakan dalam upacara keagamaan. Tradisi megalitikum ini juga meliputi pembuatan arca, menhir, dan dolmen, yang berfungsi sebagai penanda makam atau tempat suci.

Dari segi sistem ekonomi, masyarakat pra-sejarah awalnya menjalani kehidupan dengan berburu dan meramu, sebelum berkembang menjadi pertanian dan peternakan. Pada tahap awal, mereka sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka, seperti binatang buruan dan tumbuhan liar. Seiring waktu, mereka mulai mengembangkan sistem pertanian sederhana dengan menanam tanaman dan memelihara hewan ternak, yang memungkinkan mereka lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Perkembangan ini juga mendorong munculnya ide untuk saling menukar barang kebutuhan hidup, yang kemudian melahirkan sistem barter. Sistem barter ini memungkinkan terciptanya jaringan perdagangan sederhana di antara komunitas-komunitas yang ada,

menandakan perkembangan ekonomi dan interaksi sosial yang lebih kompleks (Syafei, 2020). Kehidupan sosial budaya masyarakat pra-sejarah pun semakin menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya adaptasi manusia terhadap lingkungan alam dan sosial pada masa tersebut.

Menurut (Poesponegoro, 2019) Dalam bidang sosial, pada masa pra-sejarah manusia mengalami kemajuan yang dikenal sebagai perkembangan biososial. Perkembangan biososial ini mencakup perubahan fisik manusia, seperti kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, serta kemajuan dalam interaksi sosial, seperti pembentukan kelompok-kelompok kecil, pembagian peran dalam komunitas, dan pengembangan norma serta nilai yang membantu mereka hidup secara berkelompok.

Dengan demikian kehidupan sosial budaya masyarakat pra-sejarah mencerminkan perjalanan panjang manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Perkembangan biososial yang dialami manusia pra-sejarah tidak hanya tampak dari perubahan fisik mereka, tetapi juga dari semakin kompleksnya interaksi sosial dalam komunitas. Masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok yang lebih terorganisir, di mana pembagian peran dalam berburu, meramu, bertani, hingga melakukan ritual keagamaan menjadi bagian dari struktur kehidupan sehari-hari. Kehadiran sistem barter juga menunjukkan bahwa konsep perdagangan dan pertukaran barang telah mulai berkembang, memfasilitasi hubungan antar komunitas yang berbeda.

Selain itu, praktik-praktik keagamaan dan ritual memperlihatkan bahwa manusia pra-sejarah sudah memiliki pemahaman akan kekuatan alam dan makhluk gaib yang mereka hormati. Benda-benda khusus yang digunakan dalam ritual dan pembagian peran dalam upacara keagamaan menunjukkan bahwa

masyarakat pra-sejarah tidak hanya bergantung pada aspek material kehidupan, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual. Keseluruhan sistem ini, baik dalam aspek sosial maupun budaya, menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang lebih maju di masa berikutnya, di mana norma-norma, tradisi, dan nilai-nilai yang mereka bangun tetap berpengaruh hingga peradaban modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. A. (2010). Strategi Pemanfaatan Museum sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Zaman Prasejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(1), 105–106.
- Noor, Y., & Mansyur. (2015). *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*. Banjarmasin Press.
- Poesponegoro, M. D. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia I* (cet. 7-Ed). Balai Pustaka.
- Sedyawati, E. (2010). *Budaya Indonesia: kajian arkeologi, seni dan sejarah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syafei, A. F. R. (2020). Sejarah kebudayaan Indonesia. In *Berkah Prima*. Padang: CV. Berkah Prima.
- Wijaya, H. (2013). Nekara: Peninggalan Seni Budaya dari Zaman Perunggu. *Humaniora*, 4(1), 212.
- Wiradnyana, K. (2011). *Pra Sejarah Sumatera Bagian Utara: Kontribusinya pada Kebudayaan Kini*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PROFIL PENULIS



Suharni Suddin, S. Pd., M.Pd.
Dosen Ilmu Sejarah
Universitas Halu Oleo

Suharni Suddin, lahir di Asolu pada 18 September 1988, adalah seorang akademisi dan anak pertama dari empat bersaudara. Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kambu (1995-2000), pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 10 Kendari (2001-2003), dan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 3 Kendari (2004-2007).

Meraih gelar sarjana Pendidikan Sejarah dari Universitas Halu Oleo pada tahun 2012 dan gelar magister Pendidikan IPS dengan konsentrasi Pendidikan Sejarah pada tahun 2014 dari universitas yang sama. Sejak 2015, ia menjadi Dosen Tetap Non PNS di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, dan pada tahun 2022, ia bergabung sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aktif dalam penelitian, pengajaran, dan pelayanan masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya di Jurusan Ilmu Sejarah. Suharni Suddin dapat dihubungi melalui surel suharni.suddin@uho.ac.id atau telepon 085240074843.

KERAJAAN-KERAJAAN KUNO

Oleh: Liza Husnita, M.Pd.

3.1. Teori masuknya Budaya India ke Indonesia

Kontak langsung yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa India melalui perdagangan maka secara bertahap terjadilah proses akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya India. Bosch dalam Marwati Juned dkk (1984) mengatakan bahwa proses Indianisasi terhadap budaya Indonesia adalah sebagai proses penyuburan, dimana unsur-unsur budaya Indonesia masih nampak dominan. (Marwati Juned, 1984)

Berkaitan dengan siapa yang membawa dan bagaimana proses masuknya budaya India tersebut, penelitian belum mengungkapkan sepenuhnya sampai saat ini diungkapkan ada dua teori masuknya budaya India yaitu:

1. Teori Xenocentris

Penganut teori Xenocentris berpendapat bahwa proses masuknya budaya India lebih banyak diperankan oleh bangsa asing (*xeno*=asing), dalam hal ini bangsa India. Oleh karena bangsa India beragama Hindu dan terdiri dari 4 kasta maka teori

ini mengemukakan empat hipotesis.

a. Hipotesis Waisya

Menurut N.J Krom masuknya budaya India melalui perdagangan. Di India kaum pedagang adalah kasta Waisya, maka ia berkesimpulan yang membawa masuk budaya India ke Indonesia adalah golongan Waisya, maka Bosch menamakannya hipotesis Waisya. Banyaknya kaum pedagang India tersebut yang menikah dengan perempuan Indonesia, maka melalui perkawinan ini tersebarlah budaya India. Kaum Waisya ini menetap di beberapa tempat untuk berdagang kemudian penyebaran budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia.

Hipotesis Waisya ini ditentang oleh van Leur dengan alasan bahwa pedagang-pedagang India di Indonesia tidak beda dengan rakyat biasa hubungan mereka adalah hubungan dagang belaka, tidak mungkin berpengaruh tinggi. Pada umumnya golongan Waisya ini kurang memahami isi kitab-kitab suci yang merupakan unsur penting dalam budaya India.

b. Hipotesis Ksatria

Hipotesis ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan pedagang-pedagang India yang datang ke Indonesia maka terjadilah kolonisasi yang disertai penaklukan oleh golongan Ksatria. Jadi kaum Ksatria India pernah berkuasa di Indonesia dan menyebarkan budaya India. Pendapat ini di dukung oleh Bosch bahwa bangsa India dari kasta Ksatria pernah berkuasa di Indonesia.

Hipotesis ini juga dilemahkan oleh van Leur, karena penaklukan oleh bangsa India yang dilakukan oleh kaum Ksatria tidak pernah dicatat sebagai suatu peristiwa yang penting yang dicatatkan di prasasti baik yang ada di

Indonesia maupun yang ada di India. Di samping itu kasta Ksatria dilahirkan sebagai penguasa dan tidak mahir dalam menguasai kitab-kitab suci. Dengan demikian hipotesis Ksatria ini tidak terbukti kebenarannya

c. Hipotesis Sudra

Kasta Sudra di India merupakan kasta yang paling rendah. Kaum Sudra banyak yang meninggalkan negerinya dan diantaranya mereka datang dan tinggal di Indonesia. Disini mereka dengan bebas dapat bergaul dengan penduduk asli yang tidak mengenal kasta, lalu melalui pergaulan inilah budaya India tersebar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Golongan Sudra yang merupakan kasta rendah tidak mungkin menguasai dan menyebarkan budaya India yang bersumber dari kitab-kitab suci. Menurut ajaran agama Hindu kasta Sudra ini tidak dibenarkan membaca bahkan dilarang mendengar isi kitab-kitab Weda (Sukmono, 1959). Dengan demikian maka hipotesis Sudra juga tidak terbukti kebenarannya

d. Hipotesis Brahmana

Van Leur cenderung mengatakan peranan penyebaran budaya India ke Indonesia dilakukan oleh kaum Brahmana. Hal ini diperkuat bahasa Sanskerta yang dijadikan bahasa dalam prasasti-prasasti di Indonesia adalah merupakan bahasa suci yang dikuasai oleh kaum Brahmana. Kelemahan dari hipotesis ini adalah kaum Brahmana dalam agama Hindu tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu, disamping itu kaum Brahmana tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kastanya, apalagi dengan bangsa Indonesia yang tidak termasuk dalam salah satu kasta.

Namun van Leur mengatakan bahwa kedatangan Brahmana

yang dipanggil Brahmanaguru datang ke Indonesia adalah atas undangan penguasa-penguasa (Primus-interpares).

2. Teori Indonesiacentris

Teori ini berpendapat masuknya budaya India ke Indonesia atas peran bangsa Indonesia sendiri dengan dua cara

- a. Mengundang Brahmanaguru dari India
- b. Kedatangan orang Indonesia ke India

3.2. Kerajaan-Kerajaan Kuno di Indonesia

Lancarnya hubungan pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina semenjak abad I Masehi melalui kepulauan Indonesia menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang Pantai Timur Sumatera, pantai Utara pulau Jawa dan pantai Timur Kalimantan. Akhirnya penguasa-penguasa kota pelabuhan tersebut berubah menjadi raja-raja kecil dan disebut kerajaan. Nama-nama kerajaan ini memakai bahasa Sanskerta. Kerajaan-kerajaan tersebut ada yang meninggalkan catatan tertulis (prasasti) dan ada yang tidak.

1. Kerajaan-Kerajaan Tertua Yang tidak Meninggalkan prasasti

a. Kerajaan Kan-to-li (Kuntala) (441-563)

Kan-to-li adalah sebutan ucapan Cina untuk menyebut kerajaan Kuntala yang berlokasi di sebelah Timur Laut Jambi dan sekarang bernama Kuala Tungka (Slamet Mulyana, 1981). Catatan sejarah pemerintahan dinasti Liang (502-556) disebutkan ada sebuah negeri bernama Kan-to-li yang terletak di sebuah pulau di Laut Selatan. Menurut catatan sejarah kerajaan Kan-to-li mengirimkan utusan ke Cina tahun 441,455 kemudian berhenti, mulai lagi tahun 502, 508, 520, 560 dan 563, namun menurut Woltera dalam Sartono Kartodirjo dkk (1977) kedudukan Kerajaan Kan-to-li yang kuat dan memegang peranan dalam perdagangan maka tidak begitu perlu berturut-turut mengirimkan utusannya ke

Cina. Kan-to-li memperdagangkan barang-barang bernilai tinggi seperti kayu cendana, rempah-rempah, kapas, pinang. Semenjak akhir abad ke VI, Kan-to-li tidak pernah lagi mengirim utusan ke Cina, dan digantikan oleh utusan dari Mo-lo-yo (Melayu) kemungkinan kerajaan Kan-to-li telah dikuasai. Tetapi semenjak tahun 683 utusan kerajaan Melayu juga terhenti karena dikuasai kerajaan Sriwijaya.

b. Kerajaan Poh-wang atau Tulang Bawang (442-452)

Berdasarkan berita Cina, kerajaan ini telah mengirimkan utusannya menghadapi kaisar Cina Pada tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466. Pohwang merupakan penyebutan Cina untuk Tulang Bawang di pantai timur Lampung Utara.

c. Kerajaan Ho-lo tan atau Aruteun (430-452)

Ho-lo-tan adalah ucapan Cina untuk menyebut Aruteun sebuah kerajaan yang berlokasi di muara sungai Ciaruteun (sebelah utara Bogor). Berdasarkan catatan dinasti Liu-sung-shu kerajaan Ho-lo-an di Shepo telah mengirimkan utusan menghadap kaisar Cina pada tahun 430, 433, 434, 436, 437 dan terakhir 452 (W O Woltera, 1967). Namun pada tahun 528 utusan yang datang adalah utusan kerajaan To-lo-mo (Tarumanegara). Kemungkinan kerajaan Ho-lo-tan telah jatuh di bawah kekuasaan Tarumanegara (To-lo-mo) antara tahun 528 (Slamet Mulyana, 1981). Menurut Daljuni (1984) kerajaan Ho-lo-tan memiliki armada kapal dagang dengan kota pelabuhannya terletak di Sungai Cisadane.

d. Kerajaan Ho-ling

Ada dua pendapat terkait letak kerajaan Ho-ling. Menurut L O Damais, Ho-ling adalah ucapan Cina untuk menyebut Walaing. Oleh van der Meulen kata Walaing diterjemahkan jadi Dieng di Jawa Tengah. Sedangkan menurut W P Groenevelt dalam Slamet Mulyana (1981) ibu kota Ho-ling

adalah Jepara. Namun dari pendapat diatas dijelaskan berikutnya kota pelabuhannya Jepara. Kerajaan ini mengirim utusannya menghadap kaisar Cina antara tahun 627-649. Pada tahun 674 kerajaan Ho-ling ini diperintah oleh ratu Simo yang menekankan sifat jujur pada rakyatnya, larangan untuk tidak mengambil barang orang, bahkan tidak boleh menyentuhnya. Pada masa pemerintahan ratu Simo tinggal seorang pendeta Budha bernama Jnanabhadrā yang dibantu pendeta Hwi-ning untuk menerjemahkan kitab suci agama Budha ke dalam bahasa Cina. Diperkirakan kerajaan Ho-ling telah menjadi pusat agama Budha di Nusantara sebelum munculnya Sriwijaya.

2. Kerajaan-kerajaan tertua yang meninggalkan prasasti

a. Kerajaan Kutai (400-1960)

Kata kutai berasal dari kata Kho-tai yang artinya kerajaan besar. Kerajaan ini berlokasi di sepanjang aliran sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai dibagi atas 3 periode waktu

1) Kerajaan Kutai Martapura (400-1605)

Sebagai bukti bahwa daerah ini telah dilalui oleh pedagang India ditemukannya sejumlah arca Budha dengan gaya Gandhara di kota bangun (Kutai) selain itu ditemukan arca Mukhalingga dan arca Ganesha di Sepauk dan Serawak. Pada masa kerajaan ini ditemukan 7 prasasti di sekitar Muara Kaman. Dari 7 prasasti itu hanya 4 buah yang masih dapat dibaca, sedangkan yang lain tulisannya telah aus dimakan usia. Dari keempat isi prasasti tersebut dapat digambarkan keadaan sosial politik, ekonomi dan budaya sebagai berikut:

a) keadaan sosial politik telah ada sebuah pemerintahan kerajaan secara turun temurun.

- b) Ekonomi, kerajaan Kutai banyak menghasilkan emas dan barang-barang lainnya sehingga banyak disinggahi pedagang asing. Selain sebagai pedagang juga sebagai pelaut, petani dan peternak
 - c) Keadaan sosial, masyarakat Kutai dibagi atas 3 golongan yaitu bangsawan yang terdiri atas raja dan keluarganya, golongan pendeta (Brahmana) dan golongan rakyat biasa yang terdiri atas pedagang, pelaut, petani dan peternak. Agama yang dianut oleh raja dan kaum Brahmana serta rakyat di kota pelabuhan atau pusat kerajaan adalah Hindu-Siwa. Terbukti dengan adanya Waprakesywaras sebagai tempat suci bagi pemujaan dewa Siwa. Namun rakyat biasa yang tinggal di pedalaman masih menganut kepercayaan asli (Animisme dan Dinamisme). Yupa-yupa yang ditemukan mengemukakan bagaimana kebaikan raja yang banyak memberikan sedekah demi kemakmuran rakyatnya. Sumber tertulis tentang kerajaan Kutai sayangnya hanya menggambarkan peristiwa sekitar pemerintahan raja Mulawarman lebih kurang 400 Masehi. Bagaimana raja-raja setelahnya belum ditemukan sumber-sumber tertulis lainnya. Menurut cerita yang ada terdapat 25 orang raja yang memerintah pada masa Kutai Martapura. Raja pertama adalah Maharaja Mulawarman Maladewa (400 Masehi) sedangkan raja terakhir adalah Maharaja Dharmasetia (1605 Masehi)
- 2) Kerajaan Kutai Hindu Kartanegara (1300-1525)
- Kerajaan Kutai Kertanegara berada di Delta muara sungai Mahakam, didirikan oleh raja Aji Bhatara Agung

Dewa Sakti sekitar tahun 1300. Raja terakhir bernama raja Aji Pangeran Tumenggung Jaya Baya memerintah tahun 1477-1525. Kerajaan ini bercorak Hindu dan mengakui kekuasaan Majapahit. Bahkan seorang pembesar Majapahit diangkat sebagai patih dan sekaligus menjadi wakil kerajaan Majapahit. Sewaktu kerajaan Majapahit mundur kerajaan Kutai Kertanegara dimasuki pengaruh Islam dibawa Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan (Achadiati, 1988)

3) Kerajaan kutai Islam (1525-1960)

Raja Kutai Kertanegara yang ke enam telah menganut agama Islam dengan gelar Aji Raja Mahkota Mulia Islam (1525-1605). Puncak kejayaan pada masa pemerintahan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (1605-1635). Banyak daerah yang ditaklukan termasuk kerajaan Kutai Martapura yang masih beragama Hindu. Sampai tahun 1960 kerajaan Kutai Kertanegara masih berdiri. Pada tahun 1960 pemerintah RI menghapuskan adanya kerajaan, kerajaan ini masuk ke Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda.

b. Kerajaan Tarumanegara (430-686)

Sebelum munculnya kerajaan Tarumanegara, di Jawa Barat telah ada sebuah kerajaan bernama Salakanegara. Kata Salaka dalam bahasa Sunda artinya perak. Di Jawa barat ada sebuah gunung bernama gunung Salak (a) yang berarti gunung perak. Hal ini seiring dengan ditulis Gladius I Tolemeus pada abad ke II M adanya sebuah kota pelabuhan yang bernama *Agyre* artinya perak. Dua orang raja Salakanegara yang terakhir Rajadirajaguru dan Rajasi Dharmayawarmaguru, keduanya tertulis dalam prasasti Tugu yang disebut oleh raja Purnawarman dari

Tarumanegara. Besar kemungkinan raja Purnawarman sendiri adalah keturunan dari raja-raja Salakanegara yang telah memindahkan pusat kerajaannya ke Timur yaitu muara sungai Citaraum. Daerah ini banyak menghasilkan nila (tarum) dan nama kerajaan ini disebut Tarumanegara. Pada masa kerajaan ini ditemukan enam buah prasasti, namun yang dapat dibaca hanya lima buah yaitu:

- 1) Prasasti Ciaruteun
- 2) Prasasti Pasir Koleangkak
- 3) Prasasti Kebon Kopi
- 4) Prasasti Tugu
- 5) Prasasti Cidanghyang

Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diambil kesimpulan tentang keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya kerajaan Tarumanegara:

- 1) Keadaan politik, kerajaan Tarumanegara merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara, daerah Jawa Barat semenjak tahun 450 Masehi telah dikuasai kerajaan Tarumanegara.
- 2) Kerajaan ekonomi, daerah ini banyak menghasilkan nila (tarum) kota pelabuhan ini banyak dikunjungi oleh pedagang India dan Cina. Disamping nila juga diperdagangkan gading gajah, cula badak dll. Mata pencahariannya petani, pedagang, dan sebagai peternak. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya saluran air dan pemberian 1000 ekor sapi kepada Brahmana.
- 3) Keadaan sosial budaya, masyarakat Tarumanegara terbagi atas tiga golongan, yaitu kaum bangsawan, kaum Brahmana dan rakyat biasa. Agama yang dianut adalah agama Hindu, dewa yang sangat di puja adalah dewa Wisnu. Raja Purnawarman dianggap sebagai titisan

dewa Wisnu yang mengendarai gajah Aiwarta. Rakyat yang tinggal dipinggir kota dan pedalaman menganut Animisme dan Dinamisme.

Setelah pemerintahan raja Purnawarman belum ditemukan prasasti yang dapat menjelaskannya. Hanya pada sebuah prasasti Sriwijaya ditemukan di Kota Kapur (pulau Bangka) berangka tahun 686 dikatakan bahwa balatentara Sriwijaya dikirim ke bhumi Jawa karena tidak takluk kepada Sriwijaya. Semenjak itu hilang nama Tarumanegara sampai abad ke VII di daerah itu muncul kerajaan Sunda.

c. Kerajaan Sriwijaya

Sebelum munculnya kerajaan sriwijaya berdiri kerajaan Funan. Kerajaan Sriwijaya merupakan pengganti dari kerajaan Funan yang memegang kekuasaan politik maupun hegemoni pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Sebelum berkembangnya kerajaan Sriwijaya sudah ada kerajaan Kan-to-li, kemudian kerajaan ini dikuasai kerajaan Malayu, namun semenjak tahun 670 hanya ada kerajaan Sriwijaya (Shih-li-fo-shih) yang mengirim utusan ke Cina. Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan antara Asia Tenggara dan Cina. Perkembangan kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari beberapa prasasti yaitu:

- 1) Prasati Kedukan Bukit
- 2) Prasasti Talang Tuo
- 3) Prasasti Telaga Batu
- 4) Prasasti Kota Kapur
- 5) Prasasti Karang Berahi
- 6) Prasasti Bawang
- 7) Prasasti Palas Pasemah

Berdasarkan sumber berita Cina bahwa Shih-li-fo-shih atau Sriwijaya telah mengirim utusan ke negeri Cina pada

tahun 670, 673, 713 dan terakhir tahun 742.

Dalam masa perkembangannya kerajaan Sriwijaya dapat diketahui perkembangan kehidupan masyarakat dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya

- 1) Keadaan politik, dari prasasti Telaga diketahui adanya susunan jabatan pemerintahan seperti putra mahkota sebagai pengganti raja, putra raja II, putra raja III dan putra raja IV semua putra-putra raja ini disebut Juwaraja. Selain itu juga terdapat jabatan menteri utama, senapati, bupati, orang kepercayaan raja, hakim, juru tulis, nahkoda kapal bahkan sampai tukang cuci. Terdapat penguasa-penguasa daerah atau kota-kota pelabuhan diharuskan tunduk dan setia kepada raja. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, hubungan penguasa-penguasa daerah dengan pusat kerajaan tidak bersifat feodalistis dan paternalistis.
- 2) Keadaan ekonomi, kerajaan Sriwijaya menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan Nusantara ke Cina dan sebaliknya. Pendapatan selain perdagangan juga dari bea cukai, upeti dari negara bawahan Sriwijaya berupa hasil bumi, emas, perak dll. Barang-barang yang diperdagangkan pada waktu itu adalah emas, perak, gading gajah, kulit penyu, cula badak, kapur barus, kemenyan, rempah-rempah dan lain sebagainya. Sedangkan barang-barang dari luar seperti porselen, kain sutera, gelas dan lampu-lampu hias.
- 3) Keadaan sosial budaya, Sriwijaya merupakan penganut agama Budha Hinayana. Masyarakat Sriwijaya terdiri atas 3 golongan yaitu kaum bangsawan (keluarga raja), pendeta dan rakyat biasa.

Setelah tahun 742 Shih-li-fo-shih tidak lagi mengirim

utusannya ke Cina, bahkan pada tahun 853 yang datang adalah utusan dari San-fo-tsi (Swarnabhumi). Semenjak tahun 742 berkemungkinan kerajaan ini telah dikuasai oleh kerajaaan lain

d. Kerajaan Kediri

Setelah kerajaan Mataram meluaskan kekuasaannya ke Jawa Timur kerajaan Kanjuruhan ini dikuasai oleh Sindok dan keturunan raja-raja Kanjuruhan dengan gelar Rakryan Kanjuruhan. Pada akhir abad ke VIII terdapat kerajaan Medang, tetapi pada tahun 929 kerajaan ini direbut dan dikuasai oleh Sindok. Setelah masa pemerintahan Erlangga membagi kerajaan menjadi dua kerajaan Janggala dan Kediri, namun pada tahun 1045 Garasakan menyatukan kerajaan ini dengan nama kerajaan Kediri dengan ibukotanya Dahanapura.

Secara sosial politik, Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kediri yaitu;

- 1) Raja Jayabaya (1135-1157)
- 2) Raja Sri Gandra (1181-1182)
- 3) Raja Kamesywara (1182-1185)
- 4) Raja Kertajaya (1185-1189)
- 5) Raja Jayakatuang (1281-1292)

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat diantaranya pelayaran dan perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah emas, perak, gading, cula badak, kayu cendana, merica, rempah-rempah. Penduduk Kediri juga memelihara ulat sutera, menanam padi, pepaya, pisang, tebu dan kedelai. Binatang ternaknya adalah ayam, itik, penyu, lembu dan kerbau. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran terbuat dari emas dan perak.

Kehidupan sosial budaya, berdasarkan cerita Cina

penduduk Ke taklukan Kediri laki-laki dan perempuan berambut panjang tergerai. Mereka memakai kain sampai ke bawah, orang jahat dihukum denda dengan emas, tetapi perampok dan pencuri di hukum mati. Penduduk yang sakit tidak diberi obat tetapi berdoa memohon kepada dewa Siwa. Begitu makmurnya rakyat setiap bulan kelima diadakan pesta laut (perayaan dengan kapal) sedangkan setiap bulan ke sepuluh diadakan pesta gunung untuk bersenang-senang

e. Kerajaan Singosari

Sumber utama kerajaan Singosari ialah dua buah buku yang ditulis zaman Majapahit yaitu buku Pararaton dan buku Negarakertagama. Pada tahun 1182 Ken arok menggantikan Tunggal Ametung sebagai bupati Tumapel. Ken arok kecil dibuang ke kuburan ia dipungut oleh pencuri bernama Lembong menjadi pencuri dan perampok. Ken Arok diangkat menjadi anak oleh pendeta Lohgawe dan akhirnya bekerja di istana Tunggal Ametung. Ia nantinya membunuh Tunggal Ametung dan memperistri Ken Dedes yang tengah hamil dan menjadi akuwu (bupati) di Tumapel. Namun berdasarkan buku Pararaton bahwa Ken arok sebenarnya adalah anak Tunggal Ametung sebagai penguasa Tumapel ia menghamili Ken Endok dan membunuh Gajah Para. Cerita pembunuhan Tunggal Ametung oleh Ken Arok dengan Keris Mpu Gandring diuraikan secara panjang lebar oleh Pararaton.

Setelah Ken Arok menjadi Akuwu di Tumapel dan memberi perlindungan kepada para pendeta, maka ia diangkat menjadi raja di Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi pada tahun 1182. Hal ini menimbulkan kemarahan raja Kediri Kertajaya lalu menyerang Tumapel, namun dalam pertempuran Kediri mengalami kekalahan dan semenjak itu Ken Arok menjadi raja Tumapel dan Kediri.

Menurut Pararaton pada tahun 1227 Ken Arok mati terbunuh oleh suruhan Anusapati dengan keris Mpu Gandring. Ken Arok digantikan oleh Anusapati. walau ia memerintah cukup lama yaitu tahun 1227-1248 namun tidak banyak yang diketahui dari sumber-sumber yang ada. Dari Ken dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang putra diantaranya Mahisa Wongateleng, sedangkan dari istri lainnya yaitu Ken Umang lahir Tohjaya. Menurut Pararaton Anusapati meninggal dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya tidak lama memerintah karena pada tahun 1248 ia terbunuh dalam satu pemberontakan yang dilakukan oleh pegawai istana. Setelah Tohjaya wafat ia digantikan oleh Ranggawuni (putra Anusapati) dengan gelar Sri Jaya Wishnuwardhana yang memerintah dari tahun 1248-1268. Perkembangan kerajaan Politik, Ekonomi dan Sosial

- 1) Secara Politik, dibawah raja terdapat tiga Rakryan yaitu I Hino, I Halu dan I Sirikan. Melalui 3 pejabat ini perintah raja diteruskan kepada Rakryan Mapatih, Rakryan Demung dan Rakryan Kenuruhan yang secara praktis ketiga pejabat inilah yang menjalankan pemerintahan
- 2) Secara ekonomi dijelaskan bahwa kerajaan ini merupakan agraris maritim sempurna karena menguasai tiga daerah potensial yaitu dataran rendah kediri-Madiun, dataran tinggi Malang dan kota-kota pelabuhan Delta Kali Berantas. Hasil pertaniannya berupa hasil pelayaran dan perdagangan, pajak dan bea cukai.
- 3) Sosial-budaya, mereka menganut unsur Ke-Jawaan. Raja Kartanegara penganut agama Budha-Tantrayana yaitu aliran agama Budha yang telah bercampur dengan pemujaan Siwa-Bhairawa. Kertanegara sering melakukan upacara keagamaan di *pasetran* (tempat penumpukan

mayat sebelum di bakar). Di situ dia menari-nari, minum darah manusia, makan daging manusia sambil mabuk. Upacara ini dilakukan dengan maksud melepaskan diri dari samsara sekaligus untuk mencapai nirwana. Pada masa Kartanegara ajaran agama Budha telah bercampur dengan agama Hindu-Siwa. Hal ini terbukti pada bentuk candi Jawi yang terdapat di Malang, bagian bawahnya bersifat agama Hindu Siwa, sedangkan atasnya bersifat Budha.

f. Kerajaan Majapahit

Menurut M. Yamin dalam Daljuni (1984) kerajaan Majapahit berlangsung selama lebih kurang 230 tahun dan perkembangannya dibagi beberapa periode;

a) Masa pertumbuhan (1293-1309)

Masa pertumbuhan dikaji dari sumber-sumber prasasti Kudadu tahun 1294 dan prasasti Sukamarta tahun 1296 yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya. Kedua prasasti ini menceritakan tentang penyebaran Raden Wijaya ke Madura yang diterima oleh Aria Wiraraja. Atas bantuan orang-orang Madura tanah ini dibangun akhirnya menjadi daerah Majapahit. Menurut kidung Harsya Wijaya, raden Wijaya dinobatkan menjadi raja Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Para pengikutnya yang telah banyak berjasa diangkatnya menjadi pejabat-pejabat tinggi. Pemberontakan pada masa pemerintahan Raden Wijaya yaitu pemberontakan Rangga Lawe, pemberontakan bisa dipadamkan Rangga lawe tewas ditangan Kebo Anabrang, namun Kebo Anabrang juga di bunuh oleh Sora teman dari Rangga Lawe. Kemudian terjadi peperangan antara pasukan kerajaan dengan pasukan

Sora tahun 1298-1300 dalam peperangan ini Sora dan pengikutnya tewas. Pemberontakan ini ditulis dalam kidung Sorandaka. Pada tahun 1309 Raden Wijaya Mangkat, ia diarcakan sebagai Jna (Budha) di candi Antahpura, sebagai Siwa di candi Simping dan sebagai Laksana (campuran Siwa dan Wisnu) di candi Sumberjati dekat Blitar

b) Masa puncak kejayaan (1309-1389)

1) Masa pemerintahan raja Jayanegara (1309-1326)

Setelah Raden Wijaya mangkat ia digantikan oleh satu-satunya putranya ialah Jayanegara. Dalam buku Pararaton mengatakan bahwa Jayanegara adalah anak dari Dara Petak. Sedangkan dalam buku Negarakertagama menyebut Jayanegara adalah anak dari Idreswari yang merupakan permaisuri Raden Wijaya. Idreswari tidak lain adalah Dara Petak. Ada beberapa pemberontakan pada masa Raden Wijaya yaitu pemberontakan Nambi, pemberontakan Semi dan Kuti pada masa pemberontkan Kuti ia berhasil menguasai keraton dan raja Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Badander. Pada saat itu muncul tokoh Gajah Mada sebagai kepala pasukan Bhayangkara (pengawal raja) yang berhasil menyelamatkan raja membasmi pasukan Kuti serta mengembalikan raja ke istana. Atas jasanya Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan. Kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi patih di Daha/Kediri.

2) Masa pemerintahan Rajaputri Tribuanatunggadewi (1328-1350)

Jayanegara tidak punya putra maupun putri, dan ia

digantikan oleh saudara tirinya Tribuanatunggadewi. Menurut buku Negarakertagama pada tahun 1331 terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta yang hampir meruntuhkan kerajaan namun berhasil dipadamkan Gajah Mada.

3) Masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389)
Pada tahun 1334 Tribuanatunggadewi melahirkan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit pada tahun 1350 dalam usia 15 tahun dengan gelar Sri Rajasanegara. Dalam menjalankan pemerintahan Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada yang telah menjadi Patih Hamengkubumi semenjak masa pemerintahan Tribuanatunggadewi.

c) Masa kemunduran (1389-1478)

1) Raja Putri Kusumawardhani/ Wikramawardhana (1389-1478)

Masa kemunduran kerajaan Majapahit dimulai setelah dia digantikan oleh raja putri Kusumawardhani/ Wikramawardhana (1389-1478). Dari permaisuri Hayam Wuruk melahirkan seorang putri, sedangkan dari selir ia mempunyai seorang putra. Untuk mencegah perebutan kekuasaan Hayam Wuruk mengangkat putranya Bhre Wirabhumi menjadi penguasa raja kecil di Lumajang. Putri Hayam Wuruk Kusumawardhani dikawinkan dengan kemenakannya bernama Wikramawardhana. Setelah Hayam Wuruk wafat tahun 1389 kerajaan diserahkan kepada Kusumawardhani tetapi dalam prakteknya yang

memerintah adalah suaminya Wikramawardhana. Hal ini menyebabkan Bhre Wirabhumi tidak senang, sehingga terjadilah perang yang dikenal dengan “paregrek” yang berlangsung dari tahun 1401-1406.

- 2) Masa pemerintahan raja Suhita (1429-1447)
Dari permaisuri Kusumawardani, Wikramawardhana mempunyai tiga orang putra yaitu Kartawijaya, Bhre Pamotan, dan Bhre Tumapel. Namun demi menghindarkan permusuhan dari daerah bagian Timur (Lumajang), maka Wikramawardhana menyerahkan tahta kerajaan kepada Suhita yang juga cucu dari Bhre Wirabumi (dalam garis ibu). Suhita mengetahui bahwa kakeknya mati dibunuh oleh Raden Gajah. Maka menurut Pararaton Raden Gajah ditangkap dan di hukum mati pada tahun 1433. Namun dalam sumber lain pada tahun 1437 Daha/Kediri telah memisahkan diri dari Majapahit.
- 3) Masa pemerintahan Raja Kertawijaya (1447-1451)
Suhita tidak memiliki putra, ia digantikan oleh adik tirinya (putra dari Kusumawardani) yang bernama Kertawijaya yang menjadi Bhre di Tumapel
- 4) Masa pemerintahan Rajasawardhana (1451-1453)
Menurut buku Pararaton tahun 1451 Kertawijaya mangkat dan digantikan oleh saudaranya Bhre Pamotan dengan gelar Sri Rajasawardhana. Menurut Pararaton raja Rajasawardhana berkedudukan di Kahuripan, berarti ia telah memindahkan pusat kerajaan ke Kahuripan. Pada tahun 1453 Rajasawardhana mangkat.
- 5) Masa Pemerintahan Girindrawardhana (1456-1466)

Setelah mengalami kekosongan tanpa raja, pada tahun 1456 terpilih Girindrawardhana, ia adalah putra raja Kertawijaya. Dalam kitab Pararaton dia diberi gelar Bhre Hyang Purwawusesa, setelah memerintah 10 tahun ia meninggal tahun 1466.

6) Masa pemerintahan Raja-raja Pandan Galas (1466-1468)

Dia merupakan salah seorang putra Rajasawardhana. Menurut buku Pararaton Bhre Pandan Galas hanya memerintah dua tahun yaitu sampai tahun 1468, ia meninggalkan keraton menyingkir ke Daha/Kediri. Sesuai dengan prasasti yang dikeluarkan 1473 ia tetap memerintah sebagai Maharajadiraja dan penguasa tunggal di tanah Jawa yang berkedudukan di Daha/Kediri

7) Masa Bhre Brawijaya Kertabumi (1468-1478)

Dia merupakan seorang putra Rajasawardhana. Pada tahun 1468 ia merebut tahta kerajaan dari Bhre Pandan Galas. Semenjak tahun 1468 terdapat dua raja Majapahit yaitu Bhre Brawijaya Kertabumi dan Bhre Pandan Galas.

d) Masa kehancuran (1478-1519)

Masa kehancuran kerajaan Majapahit terjadinya perebutan kekuasaan. Setelah itu adanya serangan Pati Unus dari kerajaan Demak (Islam) ke Majapahit merupakan kelanjutan dari Paregreg yang silih berganti terjadi di kerajaan Majapahit.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiati. 1988. Kerajaan Kutai Kuno dan Kerajaan Tarumanegara.
- Daljuni. 1984. Geografi Kesejarahan II. Bandung
- Fadli, Zul, dkk. 2024. Sejarah Kebudayaan Indonesia. Tri Edukasi Ilmiah. Agam Sumatera Barat
- Horison, Brian. Sejarah Asia Tenggara. Stensilan-Terjemahan
- Juned, Marwati dkk. 1984. Sejarah Nasional Indonesia II. Balai Pustaka: Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono dkk. 1977. Sejarah Nasional Indonesia II. Balai Pustaka: Jakarta
- Mulyana, Slamet. 1081. Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi. Yayasan Udayu: Jakarta
- N. j. Kron. 1931. Zaman Hindu. Gravenhage: Nederland.
- Sukmono. 1959. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II. Kanisius: Yogyakarta.
- Woyowasito. 1951. Sejarah Kebudayaan Indonesia. Badan Penerbit Pendidikan. Jakarta

PROFIL PENULIS



Liza Husnita, S. Pd., M.Pd.
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas PGRI Sumatera Barat

LIZA HUSNITA dilahirkan di Muaro Kalaban sebuah desa kecil di kota arang, Sawahlunto pada tanggal 09 Oktober 1977. Liza merupakan lulusan Pendidikan Sejarah UNP pada tahun 2001. Setelah tamat UNP, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat semenjak tahun 2001. Pendidikan S2 ditamatkan pada tahun 2011. dan sekarang sedang studi lanjut S3 di University Malaysia Kelantan. Selama menjadi dosen lebih kurang 20 tahun, beberapa mata kuliah yang diampu Liza Husnita diantaranya Kurikulum dan Buku Teks, Sejarah Pendidikan, Sejarah Kebudayaan, Pengajaran Mikro, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran serta Budaya Minangkabau.

Sebagai pengajar telah melahirkan beberapa buku referensi dan buku pegangan untuk mahasiswa dalam perkuliahan seperti buku Sejarah Pendidikan, buku Sejarah Kebudayaan, Buku Ajar Budaya Minangkabau, Strategi Pembelajaran Berorientasi Model pembelajaran Kooperatif, Pendidikan Karakter; Membangun Generasi Unggul Berintegritas, Buku Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran, Buku Pendidikan Karakter di Era Milenial, Buku Penerapan Media Pembelajaran Era Digital, Buku Karya Tulis Ilmiah (Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah), Metode dan Model Pembelajaran

Abad 21, Buku ajar Teori Belajar dan pembelajaran, buku ajar Sejarah Kebudayaan Indonesia dan lain sebagainya.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lizahusnita1977@gmail.com

MASUKNYA AGAMA- AGAMA DI INDONESIA

Oleh: Dr. Meri Erawati., S.S., M.Hum.

4.1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya, khususnya terkait dengan agama. Setidaknya di Indonesia ada enam agama yang diakui yakni: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu (Rachman, 2018). Berbicara mengenai keberagaman agama di Indonesia adalah hal yang cukup “pelik”. Bagaimana tidak, sejarah telah mencatat bahwa beberapa konflik yang ada di Indonesia berkaitan dengan persoalan penganut agama seperti kasus Poso yang pernah terjadi pada tahun 1998 hingga tahun 2001 silam. Meski pada awalnya konflik bermula dari bentrokan kecil antar kelompok, namun kemudian konflik berkembang menjadi konflik bernuansa agama. Hal ini menandakan soal agama adalah hal yang cukup sensitif untuk dalam konteks ranah publik. Persoalan tersebut hanya satu dari beberapa persoalan lain di Indonesia yang berkaitan dengan agama.

Persoalan agama telah lama dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu terutama akademisi yang berkecimpung dalam studi agama yang berusaha melakukan sistemasi dan penyusunan pengetahuan

tentang agama di Indonesia yang beragam. Pertanyaan seperti 1) *what is religion?*, 2) *how did religion come into being?*, 3) *how shall religion be described?*, 4) *what is the function or purpose of religion?* Bertujuan untuk memahami agama dan menjelaskannya secara ilmiah (Capps, 1995).

Penulisan ini turut menyumbangkan pemikiran terkait dengan agama di Indonesia namun dalam perspektif historis. Bagaimana sejarah masuknya enam agama tersebut di Indonesia akan dibahas dalam uraian berikut ini:

4.2. Kepercayaan Masyarakat Indonesia Sebelum Masuknya Agama

“a statement about reality that people accepts as true”, merupakan defenisi kepercayaan yang diungkapkan oleh Cristopher Bates Doob, yakni ekspresi tentang segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai prinsip kebenaran. Lebih lanjut ia ungkapkan bahwa kepercayaan lahir dari proses pengamatan atau pemikiran serta keimanan (Doob, 1985).

Dalam sejarah masyarakat Indonesia, diyakini bahwa jauh sebelum masuknya pengaruh agama di Indonesia, masyarakatnya telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa animisme merupakan kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, pohon, batu, sungai, gunung dan sebagainya (Bahasa, 2012). Sementara itu istilah dinamisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *Dynamis* yang berarti kekuatan, kekuasaan dan kegunaan. Kepercayaan terhadap segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup (Bahasa, 2012). Dengan demikian dapat dipahami bahwa dinamisme merupakan keyakinan akan adanya kekuatan yang berada dalam sebuah benda

dan diyakini dapat memberikan suatu berkah atau malah sebaliknya. Kekuatan itu dapat berasal dari api, bebatuan, air, pohon dan hewan atau bahkan manusia. Menurut Hasan, hal tersebut terjadi karena manusia selalu merasa butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya (Hasan, 2016).

Pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia amatlah kuat, bahkan itu masih terjadi ketika pengaruh agama-agama telah meluas ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. dalam sebuah kehidupan masyarakat Islam di Desa Pili NTT misalnya, digambarkan bahwa meskipun masyarakatnya telah dominan beragama Islam, namun sampai sekarang masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal yang bersifat animisme dan dinamisme (Kaltsum et al., 2022).

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di NTT, pada masyarakat Mentawai, kepercayaan animisme dan dinamisme yang diwujudkan dalam tradisi Arat Sabulungan. Arat Sabulungan merupakan landasan keyakinan terhadap adanya dewa-dewa dan kekuatan gaib serta roh leluhur. Meskipun masyarakat Mentawai telah menganut salah satu agama yang diharuskan oleh pemerintah, namun Arat Sabulungan tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya (Derung et al., 2023). Hal ini juga dapat terlihat bahwa adanya larangan-larangan dalam sebuah ajaran agama, seperti Islam yang melarang penganutnya untuk mengkonsumsi daging Babi, tidak menjadi halangan bagi sebagian besar masyarakat Mentawai sebab larangan dari agama Islam maupun agama lainnya dipandangan sebagai ajaran yang asing dan bertentangan dengan Adat Mentawai (Delfi, 2014).



Gambar 1. Salah Satu Ritual Dalam Tradisi Arat Sabulungan Mentawai
Sumber: <https://www.jurnalistravel.com/arat-sabulungan-dan-gempuran-agama-di-mentawai/>

Gambar diatas merupakan salah satu ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai, yang dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan nama *Sikerei*. Menurut peneliti utama dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Obing Katubi, budaya masyarakat di Mentawai (Arat Sabulungan) khususnya pada masyarakat Matotonan, akan tetap ada selama masih ada *Sikerei* sebab *Sikerei* merupakan pemeran setnral dalam berjalannya tradisi. Lebih lanjut menurutnya meskipun masyaakat di Mentawai relatif telah menganut agama yang diharuskan oleh pemerintah termasuk di Matotonan yang dominan beragama Islam, namun masyarakatnya adalah penganut agama yang berdiri di dua kaki atau ia sebagai “*in between*” (Febrianti, 2021).

4.3. Masuknya Agama Hindu dan Budha di Indonesia

Dalam konteks sejarah Indonesia, agama Hindu dan Budha merupakan agama yang paling awal masuk ke Indonesia, diperkirakan pada awal tarikh Masehi. Di Indonesia Hindu merupakan penganut ketiga terbesar dengan jumlah penganut 1.69% dari seluruh populasi

penduduk Indonesia (Sirait & Malau, 2022). Agama Hindu yang berkembang di beberapa belahan dunia diperkirakan berasal dari Lembah Sungai Shindu di India. Dari sana, ajaran agama Hindu berkembang ke seluruh pelosok dunia yakni ke India Belakang, Asia Tengah, Tiongkok, Jepang dan juga ke Indonesia.

Proses masuknya Hindu ke Indonesia tidak lepas dari aktivitas perdagangan dan interaksi budaya (Suwardono, 2013). Beberapa ahli meyakini setidaknya menyatakan ada empat teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 2008) yaitu:

a. Teori Ksatria

Teori ini dikemukakan oleh Bosch dengan menggunakan istilah Hiptesa Ksatria. Teori ini disebutkan berkaitan dengan kolonisasi dimana kedatangan koloni India telah menjadi penyebab pusat penyebaran budaya India, termasuk penyebaran agama

b. Teori Waisya

Teori ini dikemukakan oleh NJ. Krom. Menurutnya golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah kelompok pedagang, mereka menepi dan menetap di Indonesia, kemudian melakukan perkawinan di Indonesia. perkawinan inilah yang menurutnya menjadi saluran penyebaran agama yang sangat penting

c. Teori Brahmana

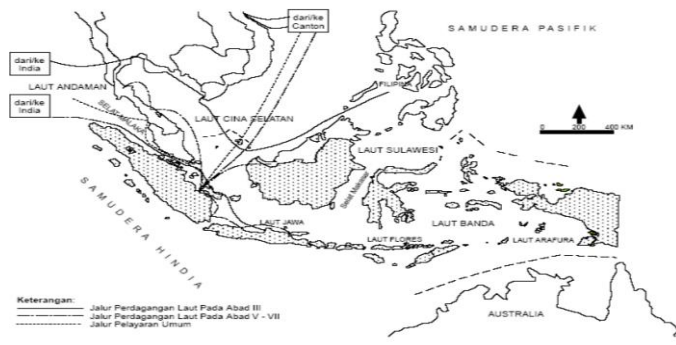
Teori ini dikemukakan oleh Van Leur, menurutnya kaum Barahmana adalah golongan yang membawa pengaruh Hindu ke Indonesia, sebab pengetahuan seperti agama, filsafat, kesusasteraan dan berbagai kesenian pada hakikatnya lebih dimnegeriti oleh kelompok Brahmana. Mereka datang ke Indonesia atas undangan para raja-raja di Indonesia untuk menyelesaikan suatu upacara keagamaan.

d. Teori Arus Balik

Dalam teori arus balik dinyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia bermula dari orang Indonesia yang diutus oleh seorang raja untuk belajar agama Hindu di India, kemudian setelah selesai mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu yang telah mereka pelajari

Berbagai bukti peninggalan sejarah baik berupa dokumen maupun prasasti telah membuktikan masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia. dalam konteks yang lebih luas, komunitas Hindu atau keberadaan penganut Hindu di beberapa wilayah di Indonesia telah membuktikannya. Di masa-masa awal Masehi, bukti awal penyebaran dan perkembangan agama Hindu di Indonesia dapat ditelusuri melalui kerajaan-kerajaan Hindu yang telah ada di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Bali.

Proses masuk dan perkembangan agama Hindu di Indonesia diperkirakan berlangsung pada abad VI M. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti di daerah Kutai dan Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. ditemukan tujuh buah prasasti di daerah Kutai yang menggunakan bertuliskan huruf Pallawa. Pada salah satu Yupa yang ditemukan memuat keterangan mengenai raja yang memerintah yakni Raja Mulawarman (Ardhana, 2002). berikut adalah peta masuknya agama Hindu dan Budha ke Indonesia



Gambar 2. Peta Masuknya Agama Hindu Budha ke Indonesia

4.4. Masuknya Agama Islam di Indonesia

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern diungkapkan bahwa, “penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga yang paling tidak jelas” (Ricklefs, 2008). Pernyataan dalam buku tersebut bisa jadi dipicu karena kapan, mengapa dan bagaimana konversi penduduk Indonesia masih menjadi perdebatan karena keterbatasan sumber-sumber tentang Islamisasi. Perdebatan-perdebatan tersebut seperti kapan persisnya Islam masuk ke Indonesia, apakah abad ke 7 atau abad ke 13? Kemudian teori apa yang benar?

Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah dalam waktu yang bersamaan, apalagi di wilayah Timur, masuknya Islam ke wilayah tersebut dapat dikatakan sedikit terlambat (Sewang, 2005). Seterusnya Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa Islam datang ke Indonesia dalam nuansa yang kompleksitas, yakni tidak berasal dari suatu tempat, peran kelompok tunggal dan sepakat dengan konsep sebelumnya yakni tidak dalam waktu yang bersamaan (Azra, 2004). Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke 7 dan ada yang mengatakan abad ke 13. Menurut Hasan, kedua pendapat tersebut tidak ada salahnya tergantung perspektif setiap

orang. Bila meyakini Islam telah masuk pada abad ke 7, maka konsepsi ini dapat didukung bahwa Islam sudah sampai pada individu penganut Islam dari Arabia, Persia ke Indonesia. Sedangkan konsepsi abad ke 13 juga dapat diterima manakala melihat terdapatnya orang Islam dalam komunitas yang besar (Asari, 2018). Dalam mengurai perdebatan terkait hal ini, Uka Tjandrasmita memilih untuk mentipologikan pengaruh Islam Indonesia dalam tiga tahapan, yakni: 1) kedatangan Islam ke Indonesia; 2) Penyebaran Islam ke Indonesia dan; 3) pembentukan struktur kerajaan Islam di Indonesia (Tjandrasmita, 1982).

Masuknya Islam ke Indonesia diungkapkan yakni berita dari Arab, berita Eropa, berita India, berita Cina, serta sumber dari dalam negeri. Berita-berita dari berbagai belahan dunia tersebut menyatakan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia bisa saja berasal dari Arab, dari Eropa, dari India dan Cina. Semua teori-teori tersebut tentu di dukung oleh sumber-sumber. Mengenai teori-teori inipun juga telah menuai perdebatan yang panjang di kalangan para ahli. Lagi-lagi menurut Hasan, konsepsi bahwa Islam lebih relevan berasal dari Arab karena dari sanalah nabi yang paling dimuliakan dalam Islam, Muhammad lahir dan besar dan menunaikan tugas kerasulannya. Namun teori bahwa Islam berasal dari Persia dan India juga dapat diterima seterkaitan dengan letak geografis Indonesia yang jauh dari Arab dan lebih dekat dengan Persia dan India. Persia dan India dianggap lebih relevan karena berada di tengah rentangan antara Indonesia dan Arab (Asari, 2018).

Sementara itu sumber dalam negeri yang mengungkapkan perihal telah adanya Islam di Indonesia diketahui dari ditemukannya sebuah batu yang memuat berita tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah Binti Maimun pada tahun 1028. Nama tersebut kurang lazim di kalangan masyarakat yang dimana Islam belum berkembang dengan pesat. Sedangkan bukti yang kedua

adalah ditemukannya makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada tahun 1297, dan yang ketiga adalah ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada tahun 1419 (Yatim, 2016).

Dalam proses masuknya Islam ke Indonesia (Islamisasi), setidaknya disebutkan terdapat enam cara (Tjandrasasmita, 1982), antara lain:

a. Saluran Perdagangan

Saluran perdagangan diyakini sebagai saluran paling awal dalam proses masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. konsepsi ini bertolak dari telah ramainya lalu lintas perdagangan di beberapa bagian di wilayah Indonesia pada abad ke 7 hingga hingga ke 16, yang mana dalam aktivitas perdagangan tersebut telah terlibat pula pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India.

b. Saluran perkawinan

Konsepsi saluran Islamisasi melalui perkawinan muncul dengan ditemukannya sejumlah pedagang luar yang terlibat aktivitas perdagangan di Indonesia kemudian memilih melakukan perkawinan dengan penduduk setempat dan kemudian menetap. Saluran ini diyakini paling mudah karena melalui perkawinanlah anggota keluarga dapat memperoleh pengaruh Islam dengan mudah

c. Saluran Tasawuf

Proses Islamisasi melalui Tasawuf adalah dengan mengajarkan teosofi dengan memberdayakan nilai-nilai budaya ajaran agama yang telah ada sebelumnya ke dalam ajaran Islam sehingga diharapkan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

d. Saluran Pendidikan

Pada aspek pendidikan, saluran Islamisasi dilalui dengan cara

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam yang diajarkan oleh para guru agama dan Kyai ataupun Ulama. Lepas dari pesantren, para santri tersebut akan kembali ke kampung mereka masing-masing dan menyebarkan Islam kepada keluarga terdekat, tetangga dan penduduk sekampung.

e. Saluran Kesenian

Melalui seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni musik dan seni sastra, Islam juga disebarluaskan. Seni merupakan bidang yang sangat penting untuk dimasuki karena bidang ini berkaitan dengan sifat esensial manusia terkait dengan hobi ataupun kesukaan. Kesenian Wayang dan seni Gamelan merupakan beberapa bagian bidang kesenian yang menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh para mubaligh dalam penyebaran Islam seperti yang dilakukan oleh salah seorang Wali Songo.

f. Saluran Politik

Politik juga dianggap menjadi salah satu jalan dalam penyebaran Islam, melalui pengaruh kekuasaan Raja. Bila Raja telah memeluk Islam, maka rakyat biasanya akan mengikuti titah Raja karena Raja merupakan panutan bagi rakyat.

Penyebaran Islam di Indonesia dapat ditelusuri melalui tumbuh dan kembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia mulai dari kawasan Pesisir Sumatera hingga ke daerah Timur Indonesia. beberapa kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam antara lain: 1). Wilayah Sumatera (Kerajaan Samudera pasai, Kerajaan Inderagiri, Kerajaan Jambi, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Palembang, Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar); 2) Wilayah Jawa (Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram); 3) Wilayah Nusa Tenggara (Kesultanan Lombok dan Sumbawa, Kerajaan Bima); 4) Wilayah Maluku (Kerajaan

Ternate, Kerajaan Tidore); 5) Wilayah Sulawesi (Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Gowa-Tallo; 6) Wilayah Kalimantan (Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, Kerajaan Pontianak) (Hasjmy et al., 1981); (H.J. de Graaf, 1989); (Tjandrasmita, 2003).

Proses masuknya Islam (Islamisasi) di Sulawesi Selatan melalui proses yang cukup rumit. Kedatangan tiga orang *Datuk Tallua* (Makassar) dan *Datuk Tellue* (Bugis) dari Minangkabau menjadi awal mula Islam di Sulawesi. Raja Tallo yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri adalah orang yang pertama menerima Islam. Ia mendapatkan nama Islam yakni Sultan Abdullah Awwalul-Islam, kemudian disusul oleh Raja Gowa XIV, Mangarangi Daeng Manrabia yang menyatakan keislamannya dengan nama Islam Sultan Aluddin (Sewang, 2005).

Peristiwa masuknya Raja Gowa dan Tallo ke dalam Islam menurut Sewang merupakan sejarah dimulainya penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan (Sewang, 2005). Pada awalnya, masuknya Islam ke Sulawesi Selatan berlangsung secara damai, namun ketika Raja Gowa menyerukan Islam ke kerajaan-kerajaan tetangga, terjadi penolakan oleh mereka yang tergabung dalam aliansi *Tellunpoccoe*, yang berarti tiga kerajaan besar yakni Bone, Wajo dan Soppeng. Mereka menolak pengaruh Islam yang dibawa oleh Raja Gowa sehingga meletuslah perang antara kerajaan Makassar (Gowa dan Tallo) dengan *Aliansi Tellunpoccoe* (Bone, Wajo dan Soppeng). Kerajaan Makassar pada akhirnya dapat menaklukkan aliansi tersebut dan ditandai dengan masuknya Islam raja-raja dari kerajaan yang takluk. Berikut adalah peta penyebaran Islam dan Pusat kerajaan Islam di Indonesia



Gambar 3. Peta Penyebaran Agama Islam dan Pusat-Pusat Kerajaan Islam di Indonesia

4.5. Masuknya Agama Kristen di Indonesia

Agama Krsiten di Indonesia merupakan agama terbesar kedua setelah Islam dengan jumlah penganut sebanyak 23.436.386 orang atau sekutar 9,87 % dari jumlah penduduk Indonesia (sensus tahun 2010). Wilayah di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen adalah Batak, Nias, Mentawai, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Tengah, Tana Toraja, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku dan Papua (Zazuli, 2018).

Agama Kristen (Katolik) datang ke Indonesia disebutkan pada abad ke 7 M. Sebelum agama Kristen di Indonesia, masyarakat Indonesia (Nusantara) sudah menganut agama suku dan agama-agama yang datang dari luar seperti Hindu, Budha dan Islam. Menurut Hutahaeen, sebelum masuknya misi gereja Eropa (Gereja Katolik dan Protestan) di Indonesia, sudah ada misi kristen di Nusantara yaitu dari kelompok Nestorian yang berpusat di Partia/Persia/Irak (Sepmady Hutahaeen, 2020). Seperti yang dikutip oleh Hutahaeen dari Shayk Abu Salih AL-Armini dari buku sejarah kuno, disebutkan bahwa gereja di Indonesia tercantum dalam daftar gereja Nasrani yang terdapat di dunia, dimana dalam buku tersebut

tercatat nama di Sumatera yakni Fansur. Nama Fansur adalah nama dari Pancur, yakni sebuah tempat di Tapanuli, Sumatera Utara. Daerah tersebut kaya akan kapur barus (kamfer). Di duga di tempat tersebut, orang-orang Nestorian dari Malabar telah datang dan memberitakan Injil (Sepmady Hutahaeen, 2020).

Perkembangan agama Kristen (Katolik Roma) di Indonesia baru dibicarakan lagi dalam beberapa sumber yakni pada abad ke 16 seterkaitan dengan imperialisme Barat di Indonesia (Portugis dan Spanyol) yaitu di Maluku, Flores dan NTT. Pada masa inilah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi dari imperialisme lama yang dikenal dengan istilah 3 G yakni *Gold, Glory dan Gospel*. Dalam aktivitas perdagangan Portugis dan Belanda, mereka juga mengikutkan para misionaris yang melakukan pengkabarannya Injil.

Sementara itu, Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada abad 16 (Müller-Krüger, 1966). Penyebaran misi Protestan di Indonesia meliputi 2 tahap yakni pada masa VOC (1602-1799) dan pada masa Hindia Belanda (1800-1942). Oleh pemerintah Belanda, VOC diharuskan menyebarkan misi Kristen, hal itu tercantum dalam pasal ikatan kontrak antara VOC dan pemerintah Belanda tentang kekristenan, oleh sebab itulah dalam struktur VOC terdapat sebuah bidang yang memuat misi kekristenan yang menjadi bagian dalam *Department of Education, Worship and Industry* (Klinken, 2003).

Setelah menghancurkan kekuatan Portugis, VOC melakukan pengkonversian agama penduduk dari Katolik ke Protestan terutama di daerah seperti Maluku dan Timur kecuali Katolik di Flores dan pulau-pulau sekitar karena tidak menguntungkan secara ekonomi (Simatupang, 1976); (Intan, 2017) agar loyalitas penduduk berpindah dari Portugis ke Belanda. Karena misi Protestan menguntungkan secara ekonomi, maka VOC telah mengirimkan Pendeta 254 orang dan konselor Kristen 800 orang selama kurun 1602-1800 (Müller-

Krüger, 1966).

Jika pada masa VOC gereja negara bergantung pada kekuatan kolonialisme, maka pada pemerintah Hindia Belanda yang mulai berkuasa di Indonesia pada awal abad 19 menerapkan pola dimana gereja negara lebih independen dan mandiri dalam menjalankan misi Protestan.

Sebagaimana diketahui, Kristen dan Islam merupakat dua agama yang memiliki penganut yang paling banyak di Indonesia. dalam prakteknya, kedua agama besar tersebut sangat rawan terjadi gesekan, yakni sering terjadi konflik yang bermuatan agama bahkan tidak jarang berujung pada kasus-kasus kemanusiaan. Hal ini secara terang telah diulas oleh Jan S. Aritonang dalam bukunya *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. dalam buku tersebut Aritonang berupaya menganalisis apakah konflik atau gesekan antara Kristen dan Islam sudah terjadi sejak lama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ia telah meneliti sejarah perjumpaan Kristen dan Indonesia sejak perjumpaan pada Portugis dan VOC di abad 16 dan 18 hingga pada masa perjumpaan di era reformasi (Aritonang, 2004).

Pasca terjadinya peristiwa PKI 1965, jumlah penganut gama Kristen di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina serta melarang segala sesuatu hal berbau Cina melalui Instruksi Presien No. 14/1967. Akibatnya banyak penduduk yang berasal dari etnis Tionghoa kemudian beralih memeluk agama Kristen (Zazuli, 2018). Mereka mengklaim sebagai pemeluk Kristen untuk menghindari ancaman hukuman karena memeluk agama Konghucu larangan untuk tidak memeluk agama (Atheis) sehingga mereka memilih memeluk agama Kristen.

4.6. Masuknya Agama Konghucu di Indonesia

Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penganut Konghucu di Indonesia adalah 118.000 orang atau sekitar 0.05% dari total jumlah penduduk Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Konghucu merupakan agama minoritas di Indonesia (Rachman, 2018)

Masuknya agama Konghucu di Indonesia diperkirakan berasamaan dengan aktivitas perdagangan oleh para pedagang dari Tiongkok ke Indonesia, yakni diperkirakan sekitar abad ke 3 M oleh para pedagang/imigran Tiongkok (Zazuli, 2018). Sebagian dari pedagang tersebut menikah dengan penduduk pribumi dan menetap sehingga membawa pada penyebaran agama Konghucu di Indonesia. tidak banyak sumber yang dapat ditemukan terkait perkembangan agama Konghucu di Indonesia sejak abad ke 3 M tersebut. Namun pada tahun 1819 telah ditemukan sebuah Klenteng Ban Hing Kiong di Manado.

Di Indonesia pada umumnya para penganut agama Konghucu juga menganut agama Budha dan agama Tao yang disebut sebagai Tridharma atau Sam Kauw atau Tiga Agama. Perkumpulan tiga agama didirikan pada tahun 1934 oleh Kweek Tok Hoay, hal ini dilakukan karena mayoritas orang Cina yang ada di Indonesia telah terjadi percampuran antara tiga agama tersebut dan menjadi satu (sinkretisme agama).

Keberadaan dan perkembangan agama Konghucu di Indonesia sempat mengalami masa-masa kritis. Sempat diakui sebagai agama resmi di Indonesia pada tahun 1965 pada masa pemerintahan Presiden Sokarno melalui Dekrit Presiden No.1/Pn.Ps/1965 tentang adanya enam agama resmi di Indonesia, namun Konghucu mengalami masa-masa sulit ketika Presiden Soeharto melarang dilangsungkannya aneka ekspresi budaya China di Indonesia, termasuk perayaan hari-hari besar melalui Intruksi Presiden No.14/1967. Dampaknya kemudian adalah banyak penganut agama

Konghucu yang menganut agama Kristen atau Budha (Zazuli, 2018). Setelah lebih dari 30 tahun, presiden Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No.6/2000 mencabut intruksi Presiden sebelumnya tentang pelarangan agama Konghucu dan mengakui kembali Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. B. S. (2002). *Sejarah Perkembangan Agama Hindu*. Paramita.
- Aritonang, J. S. (2004). Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. In *TA - TT - (Cet. 1)*. BPK Gunung Mulia. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/58843598>
- Asari, H. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu Dengan Masa Kini dan Masa Depan*. Perdana Publishing. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1145688352>
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama : Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII : Akar Pembaruan Islam Indonesia. In *TA - TT - (Ed. rev)*. Kencana. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/60373611>
- Bahasa, P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Capps, W. H. (1995). *Religious Studies The.Making of a Discipline*. Fortress Press.
- Delfi, M. (2014). Islam and Arat Sabulungan in Mentawai. *Al-Jami'ah*, 51(2), 475–499. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.475-499>

- Derung, T. N., Ghoba, K. K., Ardila, M., & Pandity, Y. I. I. W. (2023). Totemisme Mentawai: Menggali Makna Arat Sabulungan dalam Pembangunan Uma bagi Orang Mentawai. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(8), 264–273. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i8.1276>
- Doob, C. B. (1985). *Sociology: an Introduction*. Rinehart and Winston Inc.
- Febrianti. (2021, September 28). Arat Sabulungan dan Gempuran Agama di Mentawai. *Jurnal Travel*.
- H.J. de Graaf. (1989). Islam di Asia Tenggara Sampai Abad ke-18. In A. Azra (Ed.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hasan, R. M. (2016). Aceh Islamic Society (Beliefs in Animism and Dynamism). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 1(3).
- Hasjmy, A., Munawir Rf, A., & Syamsuri. (1981). Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia : kumpulan prasaran pada seminar di Aceh. In *TA - TT -*. Alma'arif. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/63437686>
- Intan, B. F. (2017). Misi Kristen di Indonesia: Kesaksian Kristen Protestan. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 325. <https://doi.org/10.33550/sd.v2i2.21>
- Kaltsum, L. U., Dasrizal, & Tsauri, M. N. (2022). Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Muslim Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(1), 15–34. <https://doi.org/10.55981/jmb.1281>
- Klinken, G. A. van. (2003). Minorities, modernity and the emerging nation : Christians in Indonesia, a biographical approach. In *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 199 TA - TT -*. KITLV Press. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/53025650>

- Müller-Krüger, T. (1966). Sedjarah geredja di Indonesia. In *TA - TT - (Tjet 2)*. Badan Penerbit Kristen. <https://doi.org/> LK - <https://worldcat.org/title/2437347>
- Poesponegoro, M. D. ., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia II (Cet-2)*. Balai Pustaka.
- Rachman, T. (2018). Modul Kemajemukan Agama Di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sepmady Hutahaean, W. (2020). *SEJARAH GEREJA INDONESIA*. Ahlimedia Press.
- Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII: abad XVI sampai abad XVII*. Yayasan Obor Indonesia.
- Simatupang, T. . (1976). Dynamics for Creative Maturity. In . Gerald H. Anderson (Ed.), *Asian Voices in Christian Theology*. Orbis Books.
- Sirait, R. A., & Malau, M. (2022). Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 3(2), 151–169. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v3i2.90>
- Suwardono. (2013). Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. In *TA - TT -*. Penerbit Ombak. <https://doi.org/> LK - <https://worldcat.org/title/871200220>
- Tjandrasmita, U. (1982). Sejarah nasional Indonesia. In *TA - TT -*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. <https://doi.org/> LK - <https://worldcat.org/title/68829866>
- Tjandrasmita, U. (2003). Kedatangan dan Penyebaran Islam. In et. a Taufik Abdullah (Ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia*

Tenggara. Ihtiar baru van Hoeve.

- Yatim, B. (2016). Sejarah peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II. In *TA - TT -* (Ed. 1., cet. 27). PT RajaGrafindo Persada.
<https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1038064906>
- Zazuli, M. (2018). *Sejarah Agama Manusia*. Narasi.

PROFIL PENULIS



Dr. Meri Erawati., S.S., M.Hum
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas PGRI Sumatera Barat

Penulis lahir di Padang pada tanggal 17 September 1986. Menempuh pendidikan sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas tahun 2004 hingga tahun 2009, kemudian menyelesaikan pendidikan Magister di kampus yang sama pada Program Studi Ilmu Sejarah tahun 2009 hingga 2012. Pendidikan Doktor ditempuh pada tahun 2016 hingga tahun 2022 pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Penulis bekerja sebagai Dosen dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat. Email mry.merierawati@gmail.com.

Penulis telah menerbitkan sejumlah artikel dalam beberapa jurnal yang terindeks nasional serta jurnal internasional yang bisa disitasi melalui google scholar dengan nama “Meri Erawati”. Penulis juga aktif terlibat sebagai tim ahli dalam kajian budaya khususnya terkait permuseuman dan telah terlibat dalam kajian-kajian museum yang ada di Sumatera Barat.

KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Oleh: Meldawati, M.Pd.

5.1. Konsep Kolonialisme dan Imperialisme

Konsep kolonialisme menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negaranya, sementara Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang sangat besar. dalam konteks ini kolonialisme adalah ingin memperluas daerah jajahan, menduduki dengan cara mengeksploitasi kekayaan yang ada di negara tersebut, sejalan dengan itu tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari wilayah yang dikuasai dan diduduki langsung dengan mengurus semua kekayaan yang terdapat di wilayah tersebut dan mengeksploitasi yang seluas-luasnya.

<https://www.kompas.com/skola/image/2020/03/13/19000099/kolonialisme-dan-imperialisme-pengertian-dan-latarbelakang>



Ilustrasi Kolonialisme dan Imperialisme

5.2. Latarbelakang dan Tujuan Kedatangan Kolonialisme ke Indonesia

Bangsa Portugis dan Spanyol adalah negara-negara pelopor penjelajahan Samudera setelah jalur lalu lintas, kedatangan Portugis dan Spanyol langsung atas perintah dari Sri Paus dengan disepakatinya perjanjian Thordesillas membagi dunia menjadi barat dan timur dengan ketentuan bangsa Spanyol hanya boleh melakukan pelayaran ke Barat dan bangsa Portugis ke Timur, oleh karena itu mendaratlah pertama kali ke Indonesia sebelah utara yaitu di Maluku setelah melewati benua Amerika.

Ketika menguasai Malaka, bangsa Portugis selanjutnya mencari daerah pusat penghasil rempah-rempah (Maluku). Di Maluku (1512) Portugis membeli cengkeh, pala dan fuli (kulit pembungkus biji pala). Kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh orang-orang Maluku terutama rakyat Ternate dengan alasan sebagai berikut: 1). Portugis akan dijadikan langganan tetap untuk membeli rempah-rempah

Maluku. 2).Portugis dijadikan sekutu Ternate untuk menghadapi musuh-musuh kerajaan Ternate. Tahun 1521 Portugis dibawah pimpinan Antonio De Brito mendirikan benteng Santo Paolo atas izin Sultan Ternate (Sultan Abidin). Sebagai imbalannya, Portugis meminta hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Tahun 1605 Portugis meninggalkan Maluku dan menuju Pulau Timor. Selain Maluku, Portugis juga menguasai Sumatera dengan maksud memonopoli Lada. Akan tetapi usaha Portugis ditentang Aceh. Di Jawa Portugis hanya dapat berdagang dengan Pasuruan dan Blambangan yang masih beragama Hindu. Daerah pulau Jawa sudah dikuasai Demak yang beragama Islam dan sangat menentang Portugis.

Bangsa Spanyol mencapai Maluku tahun 1521, dalam pelayarannya dari Philipina, mereka singgah di pelabuhan Tidore, Bacan, dan Jailolo untuk memborong rempah-rempah. Tindakan ini membuat Portugis tersaingi. Timbul ketegangan dan untuk menghindari konflik mereka membuat perjanjian tahun 1529 dengan nama perjanjian Saragosa isinya antara lain: a). Portugis menguasai Maluku hingga Tanjung Harapan, b). Spanyol menguasai Philipina. Sejak adanya perjanjian tersebut Spanyol meninggalkan Indonesia dan menguasai Philipina.

Belanda juga tidak mau ketinggalan dalam rangka mencari rempah-rempah. Bagaimana Belanda bisa sampai ke Nusantara? Penyebabnya ada dua hal : 1). Meletusnya Perang selama 80 tahun antara Belanda dan Spanyol (1568-1648). Mulanya bersifat perang agama yaitu antar Khatolik (Spanyol) melawan Protestan (Belanda). Kemudian berkembang menjadi menjadi perang ekonomi dan politik. 2) Raja Philip II (Spanyol) menutup kota Lisabon (Portugis) bagi kapal-kapal Belanda tahun 1585). Adanya petunjuk jalan ke Nusantara dari Jan Huygen Van Linscoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis sewaktu melakukan ekspedisi ke Nusantara.

Tahun 1595 Belanda melakukan pelayaran untuk pertama kalinya menuju Nusantara dibawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Pieter Keyzer dengan empat buah armada kapal. Pelayaran pertama menempuh jalur pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan (*cape of good hope*). Kemudian mengikuti para pedagang Indonesia berlayar menuju Madagaskar mengarungi Samudera Hindia kearah timur. Tahun 1596 berhasil berlabuh di Bandar Banten. Ekspedisi Belanda pertama ini mempunyai arti yang sangat penting karena membukakan jalan bagi ekspedisi selanjutnya untuk menuju daerah penghasil rempah-rempah.

5.3. Kongsi Dagang Belanda VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)

VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), artinya Serikat dagang Hindia Timur atau Kompeni Belanda, didirikan pada bulan maret tahun 1602. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Indonesia dan untuk bersaing dengan pedagang Eropa lainnya seperti perusahaan *Compagnie Des Indes* milik Perancis dan *East India Company* milik Inggris. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Belanda memberikan hak *Oktroy* kepada VOC sebagai berikut :1) Hak monopoli perdagangan rempah-rempah, 2) Hak untuk memelihara angkatan perang, 3) Hak untuk mencetak uang, 4) Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia.

Dengan hak istimewa yang dimiliki VOC mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga berhasil mendesak pedagang Eropa lainnya di Nusantara. Untuk mengatur segala kegiatan, VOC memerlukan markas atau kantor. Untuk itu perlu menguasai kota-kota penting untuk dijadikan pusat atau basis kekuatan. Pertama VOC menguasai Ambon. VOC harus berhadapan terlebih dahulu dengan Portugis sebelum menguasai Ambon. Tahun

1605, dibawah pimpinan Steven Van Der Haagen Ambon berhasil dikuasai.

VOC kemudian meluaskan kekuasaannya ke Jawa tepatnya Jayakarta, kota pelabuhan penting milik kerajaan Banten yang diberi nama Batavia. Untuk menguasai wilayah lainnya VOC melaksanakan politik adu domba (*divide et impera*). Di Belahan timur cara yang dilakukan VOC adalah melakukan pelayaran Hongi (*hongi tochten*) untuk memberantas penyeludupan. Melakukan *Ekstirpasi/* penebangan tanaman untuk mencegah kelebihan hasil produksi. Melakukan perjanjian dengan penguasa pribumi untuk memperoleh untuk memperoleh monopoli. Menerapkan peraturan *Verplichte leveranties* atau penyerahan wajib dengan harga yang ditentukan VOC secara sepihak. Menerapkan system *contingenten*, yaitu rakyat diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai pajak.

5.4. Kolonialisme Belanda di Indonesia

1. Pergantian Kongsi Dagang VOC ke Pemerintahan Hindia Belanda

Peristiwa yang terjadi di Eropa terutama yang berkaitan dengan Revolusi Prancis, ternyata membawa efek pada daerah jajahan bangsa Eropa termasuk Indonesia. Gelombang Revolusi Perancis, telah membuat Raja Willem V dari Belanda mengungsi ke Inggris dan bermukim di salah satu istana Raja Inggris yang bernama Kiew pada tahun 1795. Sejak saat itu, maka di Belanda berdiri Republik Bataaf (*Bataafse Republiek*) dengan Louis Napoleon sebagai pemimpinnya.

Willem V dalam pengasingannya, memerintahkan agar seluruh wilayah VOC diserahkan kepada Inggris, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Willem V dengan raja Inggris untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada VOC. Berdasarkan hal tersebut, maka penguasa *Republik Bataaf* memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Pembubaran

ini, selain karena faktor perubahan geopolitik VOC sendiri.

2. Kebijakan Kolonialisme Mengelola Daerah Koloni di Indonesia

Gambar 5.1. Pandangan Belanda terhadap penduduk pribumi di Indonesia



Pada tanggal 01-01 1800 kompeni dilikuidasi dan pegawainya beralih menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal bukan lagi sebagai pelaksana mandat kompeni dagang, tetapi sebagai wakil dari raja Belanda. Muncul dua pandangan mengenai pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda, yakni politik kolonial konservatif dan liberal. Pelaksanaan politik kolonial Konservatif (1800-1850), sedangkan periode 1850-1870 merupakan pelaksanaan politik kolonial liberal. Golongan Konservatif (Nederburgh) mengusulkan supaya pelaksanaan pemerintahan Belanda di Indonesia dilaksanakan seperti yang pernah dilakukan VOC. Golongan liberal mengusulkan supaya dalam pemerintahan masalah ekonomi harus dipisah dengan urusan pemerintah, berarti *contingenten dan verplichte leverantie* harus dihapuskan dan pemerintahan harus disusun lebih baik, tokohnya Dirk Van Hogendorp (1799-1808).

Kedatangan Kolonialisme Belanda secara resmi dengan

berakhirnya kongsi dagang Belanda yaitu VOC. Maka sejak 1800 Belanda mulai menjajah Indonesia. Untuk melaksanakan konsep politik konservatif Pemerintahan Belanda menunjuk dan mengirim gubernur Jenderal yang pertama yaitu Herman William Daendels.

3. Gubernur Jenderal Herman Willian Daendels (1808-1811)

Negeri Belanda semenjak tahun 1795 berada dibawah dominasi Perancis. Pada bulan Juni 1806 Napoleon Bonaparte menempatkan adiknya Louis Bonaparte sebagai penguasa Belanda. Louis inilah yang kemudian mengirim Marsekal Herman Wiilem Deandelas (berangkat awal tahun 1807-Juni 1808) sebagai gubernur Jenderal di Batavia (1808-1811) dengan tugas khusus. Dia harus memperkuat Jawa sebagai daerah basis untuk menghadapi Inggris di Lautan Hindia. Disamping itu, dia bertugas menyelidiki dan melaporkan masalah-masalah sekitar *contingenten* dan melaksanakan pemerintahan baru (liberal).

Daeandels adalah anti feodal, rasa anti feodalnya tercermin dari perubahan-perubahan yang dilakukan. Daerah Jawa yang dikuasanya dibagi atas prefektur-prefektur (gaya Perancis) masing-masingnya di kepalai oleh seorang Prefek (setingkat presiden). Prefek mempunyai kekuasaan politik, administratif, keuangan, militer dan kehakiman. Prefek bertindak sebagai Wakil Gubernur Jenderal (semua prefek bertanggungjawab kepada gubernur Jenderal).

Secara Umum Kebijakan Daendels antara lain sebagai berikut:

- 1) Mencetak uang kertas secara tidak terkendali sehingga hampir tidak bernilai lagi, dan menghilangkan kepercayaan penduduk.
- 2) Sistem pajak VOC tetap diberlakukan. Hal itu berarti *contingenten* dan *verplichte leveranties* tetap dipertahankan.
- 3) Pemimpin-pemimpin tradisional sampai Kepala Desa ditunjuk Belanda. Bupati-bupati (yang telah digaji) dilarang menerima upeti atau tenaga kerja rodi (hak-hak tradisional) serta fasilitas-fasilitas lainnya.
- 4) Dia melakukan monopoli beras; membeli dengan harga murah dan

menjual dengan harga tinggi. 5) Pinjaman paksa kepada orang-orang kaya, 6) menjual tanah-tanah milik pemerintah kepada orang-orang kaya atau pengusaha-pengusaha dengan alasan membuka Jawa untuk usaha swasta tanpa ketentuan yang mengatur tentang penduduk yang hidup di atasnya. Tanah yang dijual antara lain di sebelah barat dan timur Batavia, di Jawa dan Jawa timur.

Tindakan-tindakan Daendels tidak hanya merugikan rakyat pribumi, tetapi juga bagi orang-orang Eropa sendiri, menyebabkan mereka membenci Daendels dan melaporkan segala tindak tanduk Daendels ke negeri Belanda. Sementara di Eropa terjadi lagi pergeseran kekuasaan. Tahun 1810 kerajaan Belanda dikuasai langsung oleh Napoleon, Napoleon memutuskan untuk mengganti Daendels dengan Janssens, seorang yang lebih moderat dan bekas Gubernur Afrika Selatan. Janssens tiba di Batavia tanggal 11 Mei 1811, ia tidak dapat berbuat banyak karena situasi telah sangat gawat, disebabkan :a) Raja-raja yang selama ini ditekan Daendels sedang siap-siap menanti saat yang baik untuk meruntuhkan kuasa Belanda. b) Kas kosong dan bantuan dari Eropa tidak mungkin sama sekali. c) Tentara sangat menyedihkan keadaannya.

Dalam keadaan yang demikian, Mauritius jatuh ketangan Inggris pada tanggal 4 Agustus 1811 berada di ambang Jakarta dengan 60 (100) kapal angkatan laut dan tanpa korban yang berarti Batavia jatuh pada tanggal 26 Agustus 1811. Janssens masih mencoba mempertahankan Jawa, tapi gagal karena raja-raja tidak ada yang bersedia menolong tanggal 18 September 1811 Janssens menyerah. Janssens tidak bisa berbuat apa-apa karena kuatnya desakan Inggris serta perlawanan rakyat. Janssens tidak berdaya menghadapinya dan keadaan negara yang semakin bertambah buruk. Dalam strategi perang ketika itu dikenal ungkapan yang menyatakan bahwa "barang siapa menguasai Jawa, maka ia akan menguasai Nusantara dan barang siapa yang menduduki Batavia, maka akan

berkuasa di Nusantara”. Akibat ungkapan itu, maka Inggris menjadi nafsu untuk segera mengambil alih Pulau Jawa terutama Batavia.

Apa yang dikhawatirkan oleh Pemerintah di Belanda dan juga Janssens ternyata jadi kenyataan. Pada bulan Agustus 1811, Lord Minto, raja muda Inggris di India, beserta pasukannya tiba di Batavia dan memaksa Janssens menyerahkan pulau Jawa kepada Inggris. Maka terjadi kesepakatan antar Jansen dengan Inggris yang dikenal dengan perjanjian Tuntang tanggal 11 September 1811, dengan isinya : 1) Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada di Asia Tenggara diserahkan kepada Inggris. 2) Utang Belanda tidak diakui Inggris, 3) Semua pangkalan Belanda di Jawa, Madura dan lainnya menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

5.5. Koloni Inggris di Indonesia masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles (1811-1816)

Berdasarkan kesepakatan di kapitulasi Tuntang sejak tanggal 11 September 1811, maka Indonesia dikuasai oleh Inggris, untuk melaksanakan pemerintahan Inggris mengutus gubernur Jenderal yaitu Thomas Stanford Raffles (1811-1816).

Azas pokok sistem pemerintahan Raffles adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan memberikan kebebasan penuh pada rakyat untuk berdagang dan bekerja.
2. Pemerintah secara langsung mengawasi tanah dan hasilnya dipungut langsung tanpa perantara bupati
3. Penyerahan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak terbatas waktunya.
4. Kebijakan di bidang Pemerintahan yaitu pemerintahan langsung, tindakan Raffles adalah membagi pulau Jawa

menjadi 16 Keresidenan. Tiap keresidenan dibentuk *Landraad* (badan pengadilan).

Kebijakan Raffles yang paling fenomenal diterapkan di Indonesia dikenal dengan sistem sewa Tanah. Dalam melaksanakan kebijakan sistem sewa tanah ternyata mengalami kegagalan disebabkan: Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi Indonesia. Pegawai pemerintahan (kolektor) yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem ini terbatas. Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru. Belum terbiasa dengan aturan sewa menyewa, apabila ekonomi uang (*subsistencia*). Kepemilikan tanah masih berciri tradisonal (warisan adat) sehingga mengalami kesulitan dalam prosedur (cara) pengambilan tanah.

Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan pertemuan di London Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam *convention of London* 1814. Isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu dibawah kekuasaan Belanda.

Raffles menolak kemudian lari ke Bengkulu, Raffles ingin menutup kealahannya dibidang politik dengan cara membeli Singapura. Akhirnya disepakati *Traktat London* (1824) yang isinya: 1) Singapura diserahkan kepada Inggris, 2) Bengkulu diserahkan pada Belanda, 3) Kedaulatan Aceh diakui, karena takut Aceh berdagang yang akan mematikan Singapura.

Selanjutnya penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Inggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda diwakili oleh *Mr. Ellout, Van Der Capellan, dan Buyskes*.

5.6. Pemerintahan Dari Inggris Ke Belanda di Indonesia

a. Masa Van der Capellen 1819-1826

Berbeda dengan komisi yang kembali ke Belanda, Vander Capellen ternyata telah dikuasai oleh semangat reaksioner (konservatif). Van der Capellen memerintah tidak berpedoman kepada UU 1818/1819 yang telah disusun, sebaliknya setapak demi setapak kembali ke sistem lama. Secara umum dapat disimpulkan ketidakpuasan kepada Van der Capellen adalah sebagai berikut: a) Utang yang makin besar (pengeluaran 24 juta lebih besar dari pemasukan), b) Makin berkurangnya hasil tanaman ekspor, c) pemilikan tanah., d) Sementara itu golongan liberal mengutuk sikapnya yang konservatif.

b. Du Bus de Ghisignis

Sebagai penggantinya diangkat Du Bus de Ghiesignis dengan pangkat Komisararis Jenderal. Komisararis Jenderal Du Bus Des Gisignes (1826-1830) pada masanya menetapkan kebebasan penanaman bersama dengan meningkatkan produksi untuk ekspor sebagai dasar guna memajukan perdagangan dan pajak tanah. Dia mencabut larangan menyewa tanah oleh raja-raja dan kaum bangsawan kepada swasta. Masa pemerintahan pada umumnya meneruskan kebijaksanaan sebelumnya (Raffles).

c. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Masa Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1870)

Sistem Tanam Paksa dilakukan belajar dari kegagalan sistem Pajak Tanam yang diterapkan pada masa kebijakan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Belajar dari Kegagalan tersebut, maka pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan di bidang ekonomi yang dikenal dengan *Cultuurstelsel*.

Cultuurstelsel merupakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak Belanda antara tahun 1830 hingga pertengahan abad ke-19. Sistem tanam paksa yang diterapkan pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali eksploitasi dari zaman VOC yang berupa penyerahan wajib dan sistem tanam paksa tanah. Oleh karena itu ciri pokok tanam paksa terletak pada keharusan untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian, bukan dalam bentuk uang. *Cultuurstelsel* adalah istilah resmi pengganti cara produksi yang tradisional dengan cara produksi yang rasional. Tanam paksa adalah usaha pemerintah dalam pelaksanaannya menggunakan cara-cara paksa.



Ilustrasi Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
Masa pemerintahan Van den Bosch

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Sistem Tanam Paksa tertera dalam *Staansblad* (lembaran Negara 1834, no. 22) yang berbunyi:

- a. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk mereka menyediakan sebagian untuk ditanami tanaman ekspor
- b. Tanah yang disediakan penduduk tidak melebihi seperlima ($1/5$) dari tanah yang dimiliki penduduk desa '

- c. Pekerjaan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- d. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pajak.
- e. Tanaman yang dihasilkan wajib diserahkan kepada pemerintah, jika hasilnya lebih maka harus diserahkan pada rakyat.
- f. Panen tanaman yang gagal dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan panen tidak disebabkan oleh kekurangan kerajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.
- g. Penduduk desa mengerjakan tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Diatas kertas ketentuan itu memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, walaupun pada prinsipnya dapat mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsur paksaan yang terdapat dalam sistem tanam paksa. Dalam prakteknya jauh sekali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok sehingga rakyat banyak dirugikan.

Tanaman paksa selain berlaku di daerah Jawa, juga di Sumatera Barat/Minangkabau, Tapanuli Selatan, Bengkulu dan Sulawesi Utara. Daerah yang paling menderita adalah Jawa, wilayah yang terkena 2% dari luas tanah atau 1/18 dari laus tanah pertanian.

Diatas secara singkat dideskripsikan tentang Imperialisme dan Kolonialisme bangsa Barat di Indonesia.

Pada deskripsi ini tidak disajikan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonialisme barat di Indonesia.

Referensi

- Irza Djafaar, *Jejak Portugis di Maluku Utara*, Yogyakarta : Ombak, 2007)
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho N, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Bandung
- M.A.P,Meilink Roelofsz, *Perdagangan Asia dan Pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar 1630*, Yogyakarta: Ombak, 2016
- Ricklefs, 1998, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press
- Sartono Kartodirdjo,dkk, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid II*, Jakarta: Gramedia
- Hendri, Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia (1920-1945), *Jurnal Diakronika*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2017 *Jurnal Ilmu Sejarah dan pendidikan UNP*

PROFIL PENULIS



Meldawati, M.Pd.

Dosen Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM)

Universitas PGRI Sumatera Barat

Penulis lahir di Sukamenanti Pasaman Barat pada tanggal 30 November 1981. Riwayat Pendidikan penulis tamat Sekolah Dasar Negeri (SD N) 30 Lembah Binuang (1993), Madrasah Tsanawiyah Swasta Lembah Binuang tamat tahun 1996, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bukittinggi tamat tahun 1999. Kemudian melanjutkan studi Sarjana Pendidikan Sejarah di STKIP PGRI Sumatera Barat lulus tahun 2005, lalu melanjutkan studi Magister Pendidikan Sejarah di PPS Universitas Negeri Padang lulus tahun 2013.

Penulis adalah salah satu dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora (FISHUM) Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA). Pengalaman mengajar penulis mulai tahun 2008 sampai saat ini, pada matakuliah Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Islam, Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Barat, Sejarah Pendidikan, Dasar-dasar Sejarah, Sejarah Asia Tenggara, Kurikulum dan Buku Teks Sejarah serta Budaya Minangkabau (BAM). Selain mengajar penulis aktif dalam penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Lolos Penelitian tingkat Ristekdikti

tahun 2014 dan 2017, dan sampai sekarang masih aktif melakukan penelitian baik tingkat institusi maupun di luar Institusi. Selain itu juga aktif menulis buku sebagai referensi pada perkuliahan, misalnya terbit buku Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Islam pada tahun 2018 di STKIP Press. Tahun 2024 ini penulis sudah menghasilkan buku ajar dengan judul Sejarah Kebudayaan Indonesia di Tri Edukasi Ilmiah yang penulisan bersama. Masih dalam tahun 2024 tepatnya bulan Juli penulis menerbitkan buku lagi yang berjudul Pengantar Sejarah Indonesia yang penulisannya bersama di Tri Edukasi Ilmiah.

KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh: Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd

6.1. Perjuangan Kedaerahan dalam Melawan Imprealisme

Indonesia dengan Namanya Nusantara sebelum terbentuknya konsep negara bangsa Indonesia seperti yang kita lihat saat ini pada dahulu bukanlah sebagai sebuah negara kesatuan yang terhubung dari Sabang sampai Merauke. Konsep negara Indonesia saat itu bukanlah sebagai negara bangsa, tapi hanya sebatas daerah-daerah yang memiliki teritori, kepentingan politik, dan nasionalisme yang berbeda. Indonesia dalam catatan sejarah baik historiografi nasional maupun historiografi barat terekam dengan jelas bahwa Nusantara sudah memiliki interaksi yang sangat lama dengan bangsa asing, seperti China, Arab, India, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Interaksi tersebut beragam terbentuknya, dibentuk oleh hubungan dagang dan budaya. Bahkan ada interaksi yang terbentuk karena proses kolonisasi dan imprealisasi, yang paling kentara tentu kedatangan bangsa Eropa Portugis, Inggris, dan Belanda, dimana tiga negara Eropa ini sukses membentuk daerah koloni dengan melakukan imprealisme di negara-negara yang mereka tuju,

terutama negara dengan hasil sumber daya alamnya yang kaya. Salah satunya adalah Indonesia.

Kedatangan mereka di Nusantara membawa dampak yang cukup panjang dalam banyak hal, terutama masalah sosial, politik dan ekonomi. Dengan tujuan ekonomi yang mereka bawa untuk mengeruk hasil bumi Nusantara mengikuti terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Tatanan budaya lokal yang sudah lama ada di Nusantara secara perlahan terpengaruh oleh kebijakan politik yang diusung oleh bangsa Eropa. Eksploitasi secara masiv dilakukan baik terhadap alam maupun hasil bumi. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara dimulai dari wilayah Nusantara bagian timur yaitu Maluku. Ketika Portugis berhasil merebut Malaka pada tahun 1511 ekspansi mereka terus berlanjut ke Maluku kedatangan mereka pada mulanya disambut dengan baik oleh dua Kerajaan besar yang ada di Maluku pada saat itu, Ternate dan Tidore.

Di Maluku Utara bangsa Spanyol dapat menjalin hubungan diplomasi dengan Uli Siwa di Tidore, sedangkan bangsa Portugis menjalin hubungan diplomasi dengan Uli Lima di Ternate. Pada saat yang bersamaan waktu itu di Maluku Utara, sedang terjadi perselisihan antar suku yang tergabung dalam Uli Siwa (Tidore) dan Uli Lima (Ternate). Tetapi pertentangan antar suku ini tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Karena pada saat bangsa Spanyol dan Portugis berusaha untuk mencampuri urusan perdagangan dan pemerintahan dan berusaha memihak pada kedua belah pihak yang sedang bertikai. Namun dari pertentangan tersebut ada kelompok di Maluku yang menolak dengan keras kehadiran bangsa di Eropa tanah mereka, didalam pertentangan tersebut ada perstuan, maka rakyat Maluku Utara dapat bersatu untuk menghadapi bangsa Portugis maupun Spanyol. Tokoh yang terkenal dari Maluku Utara (Ternate), yaitu Sultan Hairun dan kemudian diteruskan oleh puteranya , yaitu Sultan Baabullah. Sejak

pemerintahan Sultan Baabullah, sebenarnya kekuatan pasukan Portugis sudah lemah , namun sampai wafatnya Sultan Baabullah (1583) , Portugis belum berhasil terusir dari Ternate. Sehingga perjuangannya diteruskan oleh Sultan Said (Putera Sultan Baab Ullah yang memerintah sampai tahun 1606). Pada masa pemerintahan Sultan Said inilah. Portugis dan Spanyol dapat diusir dari Maluku Utara dan ditawari kapal untuk kembali ke Malaka. Namun ditolak oleh Portugis dan ternyata Portugis pindah ke Maluku Selatan. yaitu di Pulau Seram dan Spanyol kembali ke Philippina.

Konflik berkepanjangan tidak hanya terjadi di bagian timur Nusantara saja, tetapi juga terjadi dibagian wilayah Nusantara lainnya, tepatnya di paling ujung barat pulau Sumatera, yaitu Aceh. Perang Aceh merupakan perang yang paling lama terjadi dengan Belanda dibandingkan dengan wilayah di Nusantara lainnya.

Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1873-1912. Sampai saat ini, sejarah perang Aceh masih menarik untuk diceritakan karena dalam catatan sejarah, perang ini menjadi salah satu perang terlama yang pernah terjadi di Aceh. Untuk lebih memahami sejarah perang yang terjadi di Aceh, simak penjelasannya. raktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh, karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda, mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatra Timur. Tidak berhenti sampai di situ,

Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan Kembali tanah Aceh.

Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid raya Baiturrahman, dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah Masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid, 9 Desember 1873 pasukan Belanda pun Kembali mendarat di Pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J.van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda Kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai Masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Syah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hasyim Banta Muda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu mereka pun mulai

membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meuraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan.

Melihat penambahan pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar dan tetap semangat. Di Aceh Barat peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien hingga meluas sampai ke Meulaboh. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut Konsentrasi Stelsel. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snouck Hurgronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya, ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu: Memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama dan rakyat. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin erlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada 1898 Kolonel J.B van Heutsz diangkat sebagai Gubernur Sipil dan Militer Aceh. Dengan berbagai macam persiapan akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Namun ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem perang gerilya terus dilakukan, sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya.

6.2. Menuju Kearah Pergerakan Nasional

Seperti yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa pergerakan melawan penjajahan bangsa asing di Nusantara pada mulanya belumlah bersifat nasional, pergerakan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan nasionalisme yang kita kenal saat ini tidak dikenal oleh Masyarakat pada masa itu. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia. disebabkan oleh faktor. Ada faktor dari dalam negeri dan faktor luar negeri. Tetapi faktor dari dalam negeri lebih menentukan. dibandingkan dengan faktor yang timbul dari luar negeri. Fungsi dan peranan faktor dari luar negeri hanya bersifat mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tanpa adanya faktor dari luar. pergerakan nasional juga akan muncul. Hanya waktunya agak lambat. Di samping itu, bisa juga dalam bentuk lain. Suatu keyakinan bahwa pergerakan nasional lebih ditentukan oleh faktor dari dalam negeri dan akan muncul dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar. karena ditandai dengan perjuangan bangsa Indonesia yang secara terus menerus dilancarkan oleh rakyat Indonesia yang silih berganti. Belajar dari pengalaman bahwa perlawanan yang dilakukan secara lokal. ketergantungan dengan pemimpin yang masih bersifat feodal atau penguasa setempat. belum adanya persatuan dan kesatuan.

Namun mengingat kondisi yang belum memungkinkan, maka untuk bangkit secara nasional masih memerlukan waktu yang tepat. Dengan demikian, berhubung adanya faktor-faktor yang mempengaruhi-nya, yang sebagian besar datang dari luar negeri, sehingga pergerakan nasional timbul dengan cepat. Faktor-faktor luar negeri yang dapat mempercepat timbulnya pergerakan nasional itu, adalah sebagai berikut:

1. Adanya faham baru, yaitu liberalisme dan human rights. Akibat dari Perang Kemerdekaan Amerika (1774 - 1783) dan Revolusi Perancis (1789);

2. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan Politik Etis (1902), yang menimbulkan wawasan secara luas bagi para pelajar Indonesia , walaupun jumlahnya masih sangat sedikit;
3. Kemenangan perang Jepang terhadap Rusia tahun 1905, yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia - Afrika dan bangkit melawan penjaja
4. Gerakan Turki Muda (1896 - 1918), yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki, sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat, dengan ikatan satu negara, satu bangsa. satu bahasa, ialah Turki;
5. Gerakan Pan-Islamisme, yang ditumbuhkan oleh Djamiluddin al-Afgani bertujuan mematahkan dan melenyapkan Imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah dan anti imperialis ;
6. Dan lain-lain, sepertinya gerakan Nasionalisme di IndiaTiongkok dan Philippina.

Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara (kini Indonesia), ketika rakyat Indonesia ulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia". Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda, yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah

organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan Politik Etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai "Kebangkitan Nasional Indonesia". Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya, sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Boedi Utomo. Kebangkitan Nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

6.3. Terciptanya Konsensus Kebangkitan Nasional

Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yakni (1) penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan; (2) kenangan kejayaan masa lalu, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit; dan (3) munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni (1) timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme; (2) munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme; dan (3) kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara barat.

Pendidikan

Pada awal abad ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada dan sejak saat itu, Politik Etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus

pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama tiga tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3 persen yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru, dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1 persen dari kelompok usia yang sesuai. Di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di MULO. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik yang baru.

6.4. Nasionalisme Indonesia

Penerapan Politik Etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada penduduk Hindia Belanda, tetapi hanya memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi. Selama dekade 1920-an dan 30-an, kelompok elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional.

Pada periode ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan

Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang menimbulkan polemik.

Dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa. Kebangkitan nasional dianggap lebih terwakili oleh Sarekat Islam, yang mempunyai anggota di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij (Partai Hindia). Pada tahun itu juga, Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik.[10] Selain itu, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Boemi Poetera. Komite tersebut melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjahan Prancis, tetapi dengan pesta perayaan yang biayanya berasal dari negeri jajahannya. Ia pun menulis "Als ik eens Nederlander was" ("Seandainya aku seorang Belanda") yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik Douwes Dekker. Karena tulisan inilah Suwardi Suryaningrat dihukum buang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibentuk pada tahun 1920, adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa. Pada tahun 1926, PKI mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa pendudukan Belanda. Pada 4 Juli 1927, Sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik baru. Pada Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Menurut

sejarawan M.C. Ricklefs, ini merupakan partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yang menetapkan tujuan nasionalis: "satu tumpah darah — Indonesia, satu bangsa — Indonesia, dan satu bahasa — Indonesia".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tauik. dan Adrian B. Lopian (eds.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid I. Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoeve bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Djamaluddin Dasman, Catatan B.M. Diah: Peran “Pivotal” Pemuda Seputar Lahirnya Proklamasi, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2018
- Kahin, A. (2008). Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia (1926-1998). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kahin, G.McT. 1963. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York : Cornell University Press
- Radjab, M. (1954). Perang Paderi di Sumatera Barat. Jakarta: Perpustakaan Perguruan KPPK.
- Reid, Anthony. 1974. The Indonesian National Revolution 1945-1950. Hawthorn Victoria : Longman.
- Ricklef, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Yogyakarta : Serambi
- Sartono Kartodirdjo, ed, Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan, 1973)

Sartono Kartodirdjo. 1977. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6.
Jakarta : Gramedia

Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, Jakarta, Citra
Lamtrogung Persada, 1985

PROFIL PENULIS



Juliandry Kurniawan Junaidi, M.Pd.
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah
Universitas PGRI Sumatera Barat

Juliandry Kurniawan Junaidi lahir di Sungai Penuh pada 25 Juli 1990. Menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 4 Sungai Penuh, selepas dari bangku sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Sungai Penuh tamat tahun 2005, selanjutnya menempuh pendidikan tingkat menengah di SMA N 2 Sungai Penuh tamat tahun 2008. Tahun 2008 penulis melanjutkan studi ke Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (UNP) menamatkan studi tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi ke jenjang S-2 di Pascasarjana UNP tamat tahun 2015. Mulai tahun 2016 penulis menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Sumatera Barat sampai saat ini. Beberapa karya penulis terbit di beberapa media massa dan jurnal, penulis juga menerbitkan buku dengan judul Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Berorientasi Model Pembelajaran Kooperatif, Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran, Ilmu Pendidikan : Panduan Komprehensif untuk Pendidik, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, . Untuk berkorespondensi dengan penulis dapat melalui email berikut juliandry.junaidi@gmail.com

PENDUDUKAN JEPANG DAN PERANG DUNIA II

Oleh: Dr. Ika Fariyah Hentihu, M.Pd.

7.1. Pendudukan Jepang

Awal pendudukan Jepang di Indonesia adalah pada tanggal 8 Desember 1941 dimana Jepang berhasil menyerang Pearl Harbour milik Angkatan Laut AS. 11 Januari 1942 Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota di sekitarnya. Lalu kemudian di 4 Februari 1942 Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan seperti di Ambon. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Propaganda yang terkenal untuk menarik simpati rakyat Indonesia ketika Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu lahir gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia.

Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang sebenarnya mendarat pertama kali di Indonesia, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Masa Pendudukan Jepang merupakan masa yang sangat kelam bagi rakyat Indonesia. Selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam,

Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan kebijakan Romusha dan Jugun Ianfu.

Lingkup Kemakmuran Bersama Timur Raya merupakan konsep kolonisasi dan kekaisaran Jepang di Asia, dengan tujuan untuk mengendalikan negara lain dan memanfaatkan sumber daya mereka untuk keperluan perang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada Perang Dunia II. Dalam kekuasaannya membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu Jawa, Sumatra, dan Makassar. Ketiga daerah tersebut dijadikan sebagai letak strategis secara politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, ratusan ribu warga Indonesia dipaksa menjadi romusha. Mereka diperintahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa perlindungan yang memadai, mengalami penindasan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi dikarenakan Kekaisaran Jepang menerapkan kebijakan yang sangat brutal, seperti kerja paksa alias romusha, perampasan hasil pertanian, dan perlakuan rasial seperti halnya kekuasaan fasisme di Eropa.



Para tokoh tokoh nasional tidak dapat mengumpulkan massa. Pemerintah Jepang melarang adanya kegiatan politik rakyat Indonesia karena dikhawatirkan akan memunculkan benih-benih revolusi sehingga rakyat melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Pertanian mengalami kemunduran karena pemerintah pendudukan militer Jepang menerapkan kebijakan pengurangan lahan pertanian untuk dialihkan menjadi tanaman lain seperti kapas dan jarak karena lebih dibutuhkan oleh pemerintah Jepang guna sebagai minyak pelumas mesin pesawat perang.

Setahun sebelumnya, sebenarnya memasuki tahun 1944, pemerintah Jepang mulai mengalami berbagai kekalahan. Hal tersebut kemudian membuat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut kemudian mulai direalisasikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pengumuman panglima bala tentara kerajaan Jepang di Jawa yaitu pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu dan tidak kepada Indonesia. Sebelum tentara sekutu yang dibonceng NICA untuk pertama kalinya mendarat pada akhir bulan September 1945, yang dihadapi oleh BKR dan badan-badan perjuangan lainnya adalah tentara Jepang.

Dengan menyerahkan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, bala tentara Jepang di Indonesia kehilangan semangat. Mereka tidak bernafsu untuk merintangai gerakan dan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Pada umumnya mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari dendam rakyat Indonesia dengan jalan mengkonsinyasi diri dalam asrama masing-masing dan hanya membela diri apabila diserang oleh rakyat Indonesia yang berusaha merampas senjata mereka.

Usaha-usaha yang pada mulanya bersifat perorangan untuk merebut senjata tentara Jepang kemudian meningkat menjadi gerakan massa yang teratur untuk melucuti kesatuan-kesatuan tentara Jepang setempat. Kemudian gerakan itu lebih meningkat lagi dengan pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer beserta alat-alat perlengkapannya yang diikuti dengan gerakan menaikkan sang Merah Putih.

Di Banyumas kesatuan-kesatuan Peta di bawah pimpinan Daidanco Soedirman pada bulan Septembner berhasil melucuti seluruh tentara Jepang di daerah tersebut tanpa pertempuran. Akan tetapi di daerah lain dengan meningkatkan aksi-aksi melucuti dan merebut senjata Jepang, pihak Jepang mulai mengadakan perlawanan. Pihak sekutu memang telah memerintahkan Jepang agar tetap bertanggung jawab atas bekas jajahan untuk diserahkan secara utuh dan lengkap kepada Sekutu.

Pada tanggal 10 September 1945 panglima bala tentara Jepang di Jawa mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu dan tidak kepada Indonesia. Hubungan antara pimpinan tentara Jepang dan Pemerintahan Republik beserta rakyat Indonesia makin tegang. Pertempuran-pertempuran makin menghebat dan meluas antara para pejuang Republik dan pasukan-pasukan Jepang. Baru setelah

melalui pertempuran yang cukup sengit pada tanggal 2 Oktober, Markas Besar Tentara Jepang di Surabaya menyerah kepada rakyat. Kemudian disusul oleh tentara Jepang di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Hal yang sama terjadi pula di kota-kota lainnya.

Otoritas militer Jepang di Jawa, setelah menahan personel administrasi Belanda, dirasa perlu untuk menggunakan orang Indonesia di banyak posisi administratif, yang dengan demikian memberi mereka kesempatan yang telah ditolak di bawah Belanda. Untuk mengamankan penerimaan rakyat atas pemerintahan mereka, Jepang juga berusaha untuk mendapatkan dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta sama-sama menerima posisi dalam administrasi militer.

Meskipun awalnya disambut sebagai pembebas, Jepang secara bertahap memantapkan diri mereka sebagai tuan. Kebijakan mereka berfluktuasi sesuai dengan urgensi perang, tetapi secara umum tujuan utama mereka adalah membuat Hindia Timur melayani kebutuhan perang Jepang. Para pemimpin nasionalis, bagaimanapun, merasa dapat menukar dukungan dengan konsesi politik. Soekarno mampu meyakinkan pemerintah bahwa dukungan Indonesia hanya dapat dimobilisasi melalui organisasi yang akan mewakili aspirasi Indonesia yang sejati. Pada bulan Maret 1943 organisasi semacam itu, Putera (Pusat Tenaga Rakjat), diresmikan di bawah keketuaannya. Sementara organisasi baru memungkinkan Soekarno untuk memantapkan dirinya lebih jelas sebagai pemimpin negara yang muncul, dan sementara itu memungkinkannya untuk mengembangkan jalur komunikasi yang lebih efektif dengan rakyat, itu juga menempatkan kepadanya tanggung jawab untuk mempertahankan dukungan Indonesia untuk Jepang melalui, di antara perangkat lainnya, *romusha* (kerja paksa). Kemudian pada tahun itu, pendapat Indonesia diberi forum lebih lanjut di Dewan

Pertimbangan Pusat dan serangkaian dewan lokal. Pada tingkat yang berbeda, pemuda Indonesia mampu memperoleh rasa integritas kelompok melalui keanggotaan di beberapa organisasi pemuda yang didirikan oleh Jepang. Yang sangat penting juga adalah pembentukan pasukan pertahanan sukarela pada bulan Oktober 1943 yang terdiri dari dan ditugaskan oleh orang Indonesia yang dilatih oleh Jepang. Sukarela Tentara Pembela Tanah Air (Peta) akan menjadi kekuatan militer inti revolusi Indonesia.

Pada bulan Maret 1944, Jepang, merasa bahwa Putera lebih melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang, dimana menggantinya dengan "organisasi loyalitas rakyat" yang disebut Djawa Hokokai, yang masih tetap berada di bawah kendali kolonial. Enam bulan kemudian perdana menteri Jepang mengumumkan niat Jepang untuk mempersiapkan Hindia Timur untuk pemerintahan sendiri. Pada bulan Agustus 1945, pada malam Jepang menyerah, Soekarno dan Hatta dipanggil ke Saigon (sekarang Ho Chi Minh City) di Vietnam, di mana Terauchi Hisaichi, komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara, menjanjikan transfer kemerdekaan segera.

Pada masa pendudukan Jepang (1942—1945) kedudukan bahasa Melayu (Indonesia) menjadi lebih kuat lagi karena Pemerintah Kolonial Jepang tak mengizinkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Belanda. Namun memang media di Indonesia digunakan sebagai alat mobilisasi massa untuk mencapai tujuan Jepang. Pada era ini media Indonesia mengalami kemajuan dari segi teknikal, namun izin penerbitan media sebagai alat kontrol oleh penguasa Jepang diperkenalkan.



Langkah yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia saat menderita kekalahan dalam melawan Sekutu yaitu dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia pasca-mengalami kekalahan adalah memberikan janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan faktanya memang sekembalinya ke Batavia (sekarang Jakarta), Soekarno dan Hatta berada di bawah tekanan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Tekanan ini mencapai klimaksnya dalam penculikan kedua pria itu, selama sehari, oleh beberapa pemimpin pemuda Jakarta. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, setelah berita penyerahan Jepang dikonfirmasi, Soekarno dan Hatta memproklamkan Indonesia sebagai republik merdeka.



7.2. Perang Dunia II

Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Inggris dan Prancis meresponsnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Negara anggota Blok Sekutu dalam Perang Dunia II yang utama adalah Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China. Pada awal pertempuran, Blok Sekutu terdiri atas Inggris, Perancis, dan Polandia, serta negara-negara jajahan mereka. Indonesia bukan medan perang utama dalam Perang Dunia II. Tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Setelah dua bulan pertempuran sengit, tentara kolonial Belanda menyerah, angkatan laut Belanda hampir hancur, dan sekitar 65.000 tentara Belanda dan Indonesia dikirim ke kamp kerja paksa. Perang Dunia II dirasakan oleh pihak Indonesia yaitu diawali ketika Jepang memulai penjajahan di Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942. Masyarakat Indonesia dikerahkan untuk mendukung perang yang dilakukan oleh Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya.

Indonesia menjadi dampak dari meletusnya Perang Dunia II yaitu Indonesia menjadi jajahan Jepang sejak 12 Januari 1942 dengan

menyerahnya pasukan KNIL. Dengan demikian, salah satu dampak Perang Dunia II bagi Indonesia adalah Indonesia dijajah oleh Jepang. Posisi Indonesia pada Perang Dunia II yaitu karena awalnya Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda. Tapi sejak 8 Maret 1942, Indonesia berada di bawah militer Jepang pasca-serangan Pearl Harbour. Tak hanya itu, berikut dampak lain Perang Dunia II bagi Indonesia di berbagai bidang.

Saat itu Indonesia masih disebut Hindia Belanda dan merupakan koloni Belanda. Dan karena Belanda sedang berperang dengan Blok Poros, dan karena Jepang menginvasi Hindia Belanda, tidak salah jika dikatakan bahwa mereka berada di pihak Sekutu. Jepang menyerang Indonesia saat Perang Dunia II adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatra sebagai sumber minyak utama. Jepang, yang membutuhkan minyak untuk mesin perang mereka di Cina, melirik Indonesia, yang saat itu merupakan koloni Belanda yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Kemudian, sebagai bagian dari invasi mereka ke Asia Tenggara, mereka menginvasi Indonesia dan mengalahkan Belanda hanya dalam waktu 3 bulan pada tanggal 8 Maret 1942.



Serangan kapal induk sekutu di Surabaya, Mei 1944

Setelah jatuhnya Singapura pada Februari 1942, banyak orang Eropa melarikan diri ke Australia, dan pemerintah kolonial Belanda meninggalkan koloni mereka. Tentara Kekaisaran Jepang berbaris ke Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942, membawa bendera Indonesia merah dan putih di samping bendera matahari terbit Jepang. Orang-orang Eropa ditangkap dan semua tanda-tanda bekas pemerintah kolonial Belanda dihilangkan. Meskipun Jepang disambut sebagai pembebas, opini publik berbalik melawan mereka saat perang berlanjut dan orang Indonesia diperkirakan akan menanggung lebih banyak kesulitan untuk upaya perang. [Sumber: Planet Kesenian]

Tak lama setelah serangan di Pearl Harbor, pasukan Jepang bergerak ke Asia Tenggara. Pendudukan nusantara berlangsung secara bertahap, dimulai dari timur dengan pendaratan di Tarakan, Kalimantan timur laut, dan Kendari, Sulawesi tenggara, pada awal

Januari 1942, dan Ambon, Maluku, pada akhir bulan itu. Pada awal Februari, pasukan Jepang menginvasi Sumatera dari utara, dan pada akhir bulan, Pertempuran Laut Jawa membuka jalan untuk pendaratan di dekat Bantam, Cirebon, dan Tuban, di Jawa, pada 1 Maret; Pasukan Jepang menemui sedikit perlawanan, dan KNIL mengumumkan penyerahannya pada 8 Maret 1942. [Sumber: Perpustakaan Kongres].

Hindia Belanda adalah hadiah berharga bagi Jepang karena kepulauan ini kaya akan sumber daya yang berguna dalam peperangan seperti minyak, karet dan timah. Keputusan Jepang untuk menduduki Hindia Belanda terutama didasarkan pada kebutuhan bahan baku, terutama minyak dari Sumatera dan Kalimantan. Jepang juga menggunakan ribuan orang Indonesia sebagai buruh kasar untuk membangun jalan dan kereta api di Asia Tenggara. Mereka berpartisipasi dalam pembangunan jembatan di atas Sungai Kwai. Menurut beberapa perkiraan, lebih dari 10 juta orang Indonesia dipaksa bekerja dalam proyek kerja paksa, dengan 1 juta meninggal dalam prosesnya.

1. Latar Belakang Invasi Jepang ke Indonesia pada Perang Dunia II

Jepang menduduki kepulauan itu dalam rangka seperti pendahulu Portugis dan Belanda mereka, untuk mengamankan sumber daya alamnya yang kaya. Invasi Jepang ke Tiongkok Utara, yang telah dimulai pada Juli 1937, pada akhir dekade ini telah terjebak dalam menghadapi perlawanan Tiongkok yang keras kepala. Untuk memberi makan mesin perang Jepang, sejumlah besar minyak bumi, besi tua, dan bahan baku lainnya harus diimpor dari sumber asing. Sebagian besar minyak – sekitar 55 persen – berasal dari Amerika Serikat, tetapi Indonesia memasok 25 persen yang kritis. [Sumber: Perpustakaan Kongres *]

Dari perspektif Tokyo, sikap yang semakin kritis dari "kekuatan ABCD" (Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda) terhadap invasi Jepang ke Tiongkok mencerminkan keinginan mereka untuk membatasi aspirasi sahnya di Asia. Pendudukan Jerman di Belanda pada Mei 1940 menyebabkan Jepang menuntut pemerintah Hindia Belanda memasoknya dengan sumber daya alam vital dalam jumlah tetap, terutama minyak. Tuntutan lebih lanjut dibuat untuk beberapa bentuk integrasi ekonomi dan keuangan Hindia Belanda dengan Jepang. Negosiasi berlanjut hingga pertengahan 1941. Pemerintah Hindia, menyadari posisinya yang sangat lemah, bermain untuk waktu. Namun pada musim panas 1941, ia mengikuti Amerika Serikat dalam membekukan aset Jepang dan memberlakukan embargo pada minyak dan ekspor lainnya. Karena Jepang tidak dapat melanjutkan perang Tiongkok tanpa sumber daya ini, pemerintah yang didominasi militer di Tokyo menyetujui kebijakan "maju ke selatan". Indochina Prancis sudah secara efektif berada di bawah kendali Jepang. Sebuah pakta nonagresi dengan Uni Soviet pada April 1941 membebaskan Jepang untuk mengobarkan perang melawan Amerika Serikat dan kekuatan kolonial Eropa. *

Jepang mengalami kemenangan awal yang spektakuler dalam perang Asia Tenggara. Singapura, benteng Inggris di timur, jatuh pada 15 Februari 1941, meskipun Inggris memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan pertahanan lautnya. Pertempuran Laut Jawa mengakibatkan kekalahan Jepang atas armada gabungan Inggris, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa menawarkan perlawanan di darat. *

Meskipun motif mereka sebagian besar bersifat akuisitif, Jepang membenarkan pendudukan mereka dalam hal peran Jepang

sebagai, dalam kata-kata slogan tahun 1942, "Pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia." Lingkup Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya Tokyo, yang meliputi Asia Timur Laut dan Tenggara, dengan Jepang sebagai titik fokus, akan menjadi komunitas ekonomi dan budaya Asia yang tidak eksploitatif. Mengingat kebencian Indonesia terhadap pemerintahan Belanda, pendekatan ini menarik dan sangat selaras dengan legenda lokal bahwa pemerintahan non-Jawa selama dua abad akan diikuti oleh era perdamaian dan kemakmuran.

2. Jepang Merebut Indonesia dan Serangan ke Australia

Setelah pengeboman Pearl Harbor, Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Tentara Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1942 dengan dalih menciptakan Lingkup Kemakmuran Asia Timur Raya. Selama minggu terakhir Februari 1942, Jepang mengalahkan pasukan Amerika, Inggris dan Belanda dalam Pertempuran Laut Jawa. Kemenangan itu memungkinkan Jepang untuk menembus perimeter pertahanan Sekutu (Penghalang Melayu) dan mengusir pasukan angkatan laut Sekutu keluar dari Asia Tenggara, memperluas kendali Jepang ke tempat yang sekarang disebut Indonesia.

Jepang merebut Indonesia dari kolonialis Belanda sebagian besar tanpa perlawanan. Belanda tidak memiliki kekuatan militer yang besar di Hindia Belanda (Belanda diduduki oleh Jerman pada saat itu). Angkatan Laut Belanda di Indonesia hampir hancur. Pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Batavia (Jakarta) dan menyerahkannya kepada pasukan Jepang pada Maret 1942. Tentara Jepang berbaris ke Batavia membawa bendera "Merah Putih" Indonesia bersama dengan bendera Jepang. Anggota Tentara Kerajaan Belanda India yang tersisa ditawan dan diangkut ke Singapura.

Indonesia bukanlah teater militer utama dalam Perang Dunia II. Tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Setelah dua bulan pertempuran sengit, tentara kolonial Belanda menyerah, angkatan laut Belanda hampir hancur, dan sekitar 65.000 tentara Belanda dan Indonesia dikirim ke kamp kerja paksa. Beberapa akhirnya bekerja di Burma Railroad di Thailand. Yang lain bekerja di tambang di Jepang. Beberapa sarjana telah menyarankan bahwa bahkan sebelum Pearl Harbor, AS bertekad untuk berperang dengan Jepang karena pemerintah Amerika takut bahwa Jepang akan membatasi akses mereka ke sumber daya yang sangat besar yang ditemukan di Hindia Belanda.

Pada 19 Februari 1942, Jepang memulai serangannya ke Australia, dengan pesawat berbasis kapal induk Jepang menyerang Darwin. Pesawat-pesawat Jepang mengebom Queensland Utara beberapa kali pada tahun 1942. Darwin dibom 64 kali dan hampir hancur. "Saya ingat ketakutan itu," tulis jurnalis Russ Terrill, "Orang tua saya berbicara dengan gelap tentang barbarisme Oriental, dan kegembiraan meningkat di kota kami ketika nelayan melihat seekor kapal Jepang yang suram di lepas pantai."

Khawatir tentang invasi Jepang, para insinyur dan tentara Amerika dan Australia membangun jalan sepanjang 1.000 mil antara Gunung Isa dan Darwin, yang menghubungkan Australia utara dan selatan, dalam 100 hari. Sebuah DC-3 yang jatuh di dekat Bamaga dan tujuh orang dengan gagah berani kehilangan nyawa mereka, seorang pegawai pemerintah Queensland mengatakan kepada National Geographic, mengirimkan kargo yang ternyata adalah Spam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinur. (2011). Sistem Pendidikan Yang Diterapkan Oleh Jepang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Koheri* Vol. 4 No. 2 April 2020, 125-131.
- WATI, M. (2019). SLOGAN “FUKOKU KYOHEI”(NEGARA KAYA, MILITER KUAT) DAN. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 7, No.1 2019.
- Ningsih, W. L. (2022, January 25). Latar belakang Jepang menjadi negara imperialis.KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/25/110000279/latar-belakang-jepang-menjadi-negara-imperialis>
- Masamoto, K. , Latz, . Gil , Watanabe, . Akira , Jansen, . Marius B. , Sakamoto, . Taro , Masai, . Yasuo , Hurst, . G. Cameron , Hijino, . Shigeki , Notehelfer, . Fred G. and Toyoda, . Takeshi (2024, January 17). Japan. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Japan>
- Badran, Wayan. 1997. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. Jakarta : Erlangga.
- Fadli, R & Dyah Kumalasari. 2019. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13(2), 189-205.
- Ishak, M. 2012. Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi* 9(1).
- Isnaeni, H & Apid. 2008. *Romusa : Sejarah Yang Terlupakan (1942-1945)*. Yogyakarta : Ombak.
- Muttaqin, dkk. 2011. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung : Humaniora.
- Nagazumi, dkk. 1998. *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Yayasan Obor Indonesia.

- Notosusanto, Nugoroho.. 1978. Tentara Peta. Jakarta: Gramedia.
- Ricklefs. 1981. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004. Jakarta : Serambil Ilmu Semesta.
- Sakto, Zein. 2022. Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia. Diakses Pada 10 Oktober 2023. Dari <https://www.awalilmu.com/2015/04/proses-berakhirnyakekuasaan-jepang-di-indonesia.html?m=1>
- Sofianto, K. 2014. Garut Pada Masa Pemerintahan Jepang. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 16, No. 1.
- Waworuntu, S dan Indah Tjahjawan. 2020. Kulit Muka Majalah Djawa Baroe :Representasi Propaganda Pendudukan Jepang di Indonesia 8(2), 198-226
- Yasmis. 2007. Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Sejarah Lontar 4(2), 24-32.

PROFIL PENULIS



**Dr. Ika Fariyah Hentihu, S.Pd, M.Pd.
Dosen Ilmu Humaniora
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Ika Fariyah Hentihu telah menggeluti sejarah Indonesia dari sejak lama. Sebagai salah satu pengajar di jurusan Sastra di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim, Ika juga aktif di komunitas Sejarah di kota Malang yaitu Jelajah Jejak. Buku sejarah Indonesia sangat diperlukan di Fakultas Humaniora sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Sosial yang diperlukan dalam memahami karya-karya sastra populer.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh: Kaksim, S.Pd.I., M.Pd.

8.1. Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Diumumkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta, proklamasi ini menandai berakhirnya era kolonialisme Belanda dan menjadi tonggak awal bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Anderson, 2006). Untuk memahami makna proklamasi ini, penting untuk menggali konteks sejarah yang melatarbelakanginya, yang merupakan hasil dari berbagai perjuangan dan diplomasi yang kompleks.

Proklamasi kemerdekaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rentetan peristiwa, termasuk penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari 300 tahun. Belanda memasuki Nusantara pada abad ke-17 sebagai pedagang rempah dan segera mendirikan kekuasaan kolonial melalui VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Selama era kolonial, rakyat Indonesia

mengalami eksploitasi ekonomi yang parah, kehilangan hak-hak dasar, dan hidup di bawah sistem tanam paksa yang menindas (Vickers, 2005). Ketidakpuasan yang meluas menciptakan kondisi subur bagi pergerakan nasionalis yang akhirnya memicu perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda muncul secara bertahap, dari gerakan lokal hingga perjuangan nasional yang lebih terkoordinasi. Puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang tidak hanya menandai berakhirnya penjajahan Belanda tetapi juga mencerminkan perjuangan ideologis yang mendalam. Bangsa Indonesia mulai mengartikulasikan identitas dan aspirasi kolektifnya, menandakan lahirnya sebuah negara yang merdeka (Sumitro, 2003).

Perang Dunia II membawa perubahan signifikan bagi Indonesia, terutama melalui pendudukan Jepang. Invasi Jepang pada 1942 mengubah dinamika politik dan sosial, di mana Jepang menggantikan Belanda dan berusaha meraih dukungan rakyat dengan propaganda kemerdekaan. Selama pendudukan, Jepang melatih dan memobilisasi kelompok-kelompok nasionalis, memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan dan militer. Hal ini meningkatkan kesadaran dan kemampuan organisasi nasionalis (Hadi, 2016).

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 1945, kekosongan kekuasaan memberikan peluang bagi para pemimpin nasionalis Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pengalaman perang dan perubahan yang dibawa oleh Jepang menguatkan semangat kemerdekaan dan dorongan untuk meraih kedaulatan penuh (Nasution, 1996). Dalam konteks ini, kondisi yang tidak terduga sering kali menciptakan peluang bersejarah untuk perubahan sosial dan politik.

Masa Pendudukan Jepang juga ditandai oleh kebijakan agresif yang memperkenalkan propaganda kemerdekaan sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan rakyat. Jepang menyebarkan ide bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan setelah perang, yang mencerminkan pemahaman bahwa legitimasi politik harus diperoleh melalui dukungan rakyat, meskipun dengan cara manipulatif (Salim, 2019).

Reformasi administratif yang dilakukan Jepang menggantikan sistem kolonial Belanda dengan sistem pemerintahan mereka, memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk terlibat dalam administrasi dan militer. Ini melatih pemimpin Indonesia yang nantinya berperan penting dalam periode kemerdekaan (Kustiyah, 2020). Organisasi seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dibentuk untuk melibatkan rakyat dalam upaya perang dan menyebarkan ide kemerdekaan (Mardiyanto, 2018). Meskipun pendudukan Jepang menghadirkan tantangan seperti kekurangan bahan makanan, hal ini juga memperkuat semangat kolektif untuk berjuang demi kebebasan (Kartodirdjo, 1990).

Melalui berbagai dinamika ini, jelas bahwa proklamasi kemerdekaan adalah buah dari perjuangan kolektif yang terbangun melalui berbagai pengalaman sejarah, dan menunjukkan bagaimana dalam situasi sulit, dorongan untuk meraih kebebasan dapat tumbuh lebih kuat.

8.2. Proses Menuju Proklamasi

1. Perjalanan Jakarta-Dalat-Jakarta

Sejak tanggal 12 Agustus 1945, suasana politik di Indonesia mulai bergejolak, utamanya setelah Jepang mengumumkan menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat mengadakan pertemuan dengan Marsekal Terauchi

di Dalat, Vietnam, untuk membahas situasi politik dan kemungkinan kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk mengonfirmasi posisi Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan tersebut, mereka semakin yakin bahwa momentum untuk memproklamkan kemerdekaan sudah dekat, dan banyak pihak mulai bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya (Roeslan, 1977).

2. Kesibukan-kesibukan Tanggal 15 Agustus 1945

Tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang sangat penting ketika Jepang secara resmi mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di Jakarta, suasana tegang dan harapan menyelimuti para aktivis kemerdekaan. Mereka berkumpul dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya, menyadari bahwa kesempatan untuk memproklamkan kemerdekaan tidak boleh dilewatkan. Kabar tentang surrender Jepang menambah semangat para pemimpin nasional untuk segera mengumumkan kemerdekaan (Soekarno, 1965).

3. Peristiwa Rengasdengklok

Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, dengan kekhawatiran bahwa Jepang akan menggagalkan rencana proklamasi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh pemuda, termasuk anggota Angkatan Muda Indonesia, ke Rengasdengklok. Di sana, mereka terisolasi dan terpaksa mendiskusikan proklamasi secara serius. Tekanan dari pemuda tersebut mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang, yang semakin memperkuat tekad mereka untuk Merdeka (Malaka, 2012).

4. Penyusunan Teks Proklamasi

Setelah kembali ke Jakarta pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi. Teks ini ditulis di sebuah ruangan sederhana dan menjadi refleksi harapan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Dalam penyusunannya, mereka

mendiskusikan dengan tokoh-tokoh lain, menekankan pentingnya menyampaikan pernyataan yang jelas dan tegas tentang kemerdekaan Indonesia (Hatta, 2001).

8.3. Proklamasi Kemerdekaan

1. Teks Proklamasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di depan gedung perwakilan Jepang di Jakarta. Pembacaan ini disaksikan oleh para tokoh pergerakan dan masyarakat yang berkumpul. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka, mengakhiri penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga setengah abad. Momen ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi kemerdekaan.

Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 berisi pernyataan tegas mengenai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Pembacaan ini berlangsung di Jalan Proklamasi, Jakarta, dan menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Dalam teks tersebut, terdapat dua bagian utama: pernyataan kemerdekaan dan pengakuan atas hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Teks ini diawali dengan kalimat “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia,” yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa diragukan lagi (Soekarno, 1965). Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga dicantumkan bahwa Indonesia bertekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pentingnya pernyataan ini terletak pada pengakuan bahwa Indonesia bukan lagi bagian dari kekuasaan kolonial, melainkan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, proklamasi ini juga menyiratkan harapan untuk masa depan, di mana rakyat

Indonesia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bebas dari penindasan (Hatta, 2001). Teks Proklamasi menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan menginspirasi semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Dengan disampaikannya teks ini, Soekarno dan Hatta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang demi kelangsungan dan kemajuan negara yang baru merdeka.

2. Situasi Saat Proklamasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945, suasana di Jakarta menjelang dan setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan dipenuhi oleh ketegangan dan antisipasi. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari pemuda, intelektual, hingga rakyat biasa, berkumpul di sekitar Jalan Proklamasi, di mana Soekarno dan Hatta menyampaikan teks proklamasi. Banyak yang merasakan harapan yang mendalam, seiring dengan keinginan kuat untuk meraih kemerdekaan setelah lebih dari tiga ratus tahun dijajah. Ratusan orang hadir di tempat tersebut, dan sebagian besar dari mereka menyatakan kegembiraan dan dukungan dengan teriakan merdeka dan lagu-lagu perjuangan (Sitorus, 2015).

Reaksi pihak-pihak yang terlibat juga sangat signifikan. Para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Pemuda Indonesia dan Angkatan Pemuda Indonesia bersorak gembira, menganggap peristiwa ini sebagai puncak dari perjuangan yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, tentara Jepang yang saat itu masih menduduki Indonesia tampak terkejut dan bingung, menyadari bahwa kekuasaan mereka mulai tergoyahkan. Meskipun ada beberapa pihak yang mencoba mencegah pernyataan kemerdekaan, semangat rakyat yang membara sulit dibendung (Hani, 2018). Proklamasi ini pun memicu gelombang perayaan di seluruh Indonesia, dengan berbagai daerah menggelar acara-acara yang merayakan kemerdekaan dan kebangkitan semangat nasionalisme

(Nasution, 2010).

8.4. Dampak dan Signifikansi

1. Pengakuan Internasional

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, proses pengakuan kemerdekaan oleh negara-negara lain dan Belanda mengalami dinamika yang kompleks. Pada awalnya, pemerintah Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk kembali menguasai wilayah tersebut dengan alasan bahwa proklamasi tersebut tidak sah. Ketegangan ini memicu pertempuran yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947, di mana Belanda berusaha merebut kembali kendali atas Indonesia (Hani, 2016). Namun, perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta, mulai membuahkan hasil ketika sejumlah negara, seperti India, Mesir, dan Uni Soviet, mulai menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia (Sitorus, 2017).

Pada tahun 1949, melalui serangkaian konferensi internasional dan tekanan dari pihak internasional, Belanda akhirnya setuju untuk bernegosiasi. Konferensi Meja Bundar di Den Haag menjadi momen penting dalam proses ini, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949, secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, mengakhiri konflik yang berlangsung selama lebih dari empat tahun dan membuka jalan bagi Indonesia untuk mengambil posisi sebagai negara berdaulat di kancah internasional (Nasution, 2011). Proses ini menjadi simbol keberhasilan diplomasi Indonesia dan mencerminkan dukungan internasional terhadap hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

2. Dampak Sosial dan Politik

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Secara sosial, proklamasi membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Dengan semangat persatuan yang baru, masyarakat mulai bersatu dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun identitas nasional (Sitorus, 2015). Selain itu, pendidikan dan kesadaran politik meningkat, dengan banyak organisasi sosial dan pemuda bermunculan untuk mendukung cita-cita kemerdekaan dan menyiapkan generasi penerus yang berjiwa nasionalis.

Di bidang politik, proklamasi menandai awal dari perjuangan Indonesia untuk mendirikan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Setelah proklamasi, berbagai partai politik muncul, dan rakyat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Ini memicu pembentukan berbagai lembaga negara yang berfungsi untuk mengelola pemerintahan, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Abdurrahman, 2004). Selain itu, proklamasi juga menjadi landasan bagi perjuangan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, yang akhirnya membawa pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949 (Vickers, 2005).

Dari segi ekonomi, proklamasi membuka peluang bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri, meskipun tantangan besar seperti inflasi dan kekurangan barang masih menghantui setelah perang. Kebijakan ekonomi yang pro-rakyat mulai diterapkan untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, munculnya koperasi dan usaha kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi lokal menunjukkan upaya masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa (Nasution, 2010). Meskipun perjalanan menuju stabilitas ekonomi

masih panjang, proklamasi memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan ekonomi Indonesia ke depan.

Penutup

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah tonggak bersejarah yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat setelah lebih dari tiga abad penjajahan. Peristiwa ini bukan hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga refleksi dari kesadaran kolektif yang dibangun melalui berbagai organisasi dan ideologi sepanjang sejarah. Dengan keberanian Soekarno dan Hatta, kemerdekaan Indonesia diumumkan di tengah ketidakpastian, menciptakan gelombang semangat nasionalisme yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam konteks global, kemerdekaan ini juga menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang terjajah, menunjukkan bahwa perjuangan untuk meraih kedaulatan adalah mungkin.

Namun, perjalanan setelah proklamasi bukan tanpa rintangan. Tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang muncul mengharuskan bangsa Indonesia untuk berkolaborasi dan beradaptasi dalam menghadapi situasi baru. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi langkah krusial dalam mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi pembangunan negara. Keberhasilan dalam meraih pengakuan ini tidak hanya mendukung stabilitas, tetapi juga memberikan legitimasi bagi pemerintah yang baru terbentuk.

Proklamasi bukan sekadar momen sejarah; ia merupakan janji untuk membangun masa depan yang lebih baik, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat yang ditanamkan melalui peristiwa bersejarah ini menuntut generasi penerus untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan demi kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, Proklamasi Kemerdekaan adalah awal dari perjalanan panjang Indonesia untuk menjadi negara

yang berdaulat, berkeadilan, dan penuh harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. (1977). *Perjuangan Indonesia 1945-1950*. Gunung Agung.
- Abdurrahman, M. (2004). *Nahdlatul Ulama dan kebangkitan nasional*. Mizan.
- Adam Malik. *Riwayat dan perjuangan sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus*. Jakarta.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Gellner, E. (1983). *Nations and nationalism*. Cornell University Press.
- Hani, R. (2018). Reaksi masyarakat terhadap proklamasi. *Sejarah dan Masyarakat*, 2(3).
- Hatta, M. (2001). *Memoir perjuangan*. Penerbit Buku Kompas.
- Imran, A., dkk. (2012). *Indonesia dalam arus sejarah*. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Protest movements in rural Java: A study of agrarian social movements in Indonesia*. Brill.
- Kustiyah, R. (2020). Kondisi ekonomi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Majalah Ekonomi dan Sosial*.
- Leirissa. (1985). *Sejarah masyarakat Indonesia*. Akademika.
- Mardiyanto, Y. (2018). Dinamika organisasi nasionalis Indonesia pada masa Jepang. *Jurnal Sejarah*.
- Muhammad Hatta. (1996). *Sekitar proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta.
- Nasution, J. (2010). Perayaan kemerdekaan setelah proklamasi. *Cahaya Sejarah*.
- Nasution, T. (1996). *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

- Nugroho Notosusanto. (1984). *Sejarah nasional Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto. (1990). *Proklamasi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah pergerakan rakyat Indonesia*. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Pringgodigdo. (1975). *Kemerdekaan RI*. Pustaka Setia, Jakarta.
- Reid, A. (1993). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads*. Curzon Press.
- Roeslan, M. (2019). Peranan proklamasi dalam pembentukan negara Republik Indonesia. *Jurnal Sejarah*, 5(1), 45-58.
- Salim, R. (2019). Organisasi kemerdekaan dan peranannya di masa pendudukan Jepang. *Majalah Sejarah*.
- Sartono Kartodirdjo. (1990). Perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. *Historiografi Indonesia*.
- Sartono Kartodirdjo. (1999). *Pengantar sejarah Indonesia baru: Sejarah pergerakan nasional. Dari kolonialisme sampai nasionalisme* (Jilid 2). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sitorus, M. (2015). Suasana proklamasi di Jakarta. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 4(1).
- Siroj, Z. (1998). *Pergerakan kebangsaan Indonesia*. Lembaga Penelitian.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. University of Nevada Press.
- Sumitro, S. (2003). Reformasi administratif pada masa pendudukan Jepang. *Papers in History*.
- Tan, M. (2012). *Mencetak sejarah: Catatan perjuangan di masa pendudukan Jepang*. Pustaka Alvabet.
- Vickers, A. (2005). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.

PROFIL PENULIS



Kaksim, S. Pd.I, M.Pd.
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas PGRI Sumatera Barat

Penulis lahir di Siguai (Simeulue Aceh) pada tanggal 01 September 1983. Pendidikan sarjana pada Program Studi Tadris IPS-Sejarah, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN IB) Padang tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2011. Sekarang bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA). Email kaksim010983@gmail.com

Telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel maupun buku, antara lain: (1) Bumi Sikerei dalam Pelestarian Budaya Lokal dipublikasikan di Koran Singalan9 pada tahun 2019. (2) Education Values of Arat Sabulungan Tradition in EMatotonan Mentawai disampaikan pada International Conference on Innovation in Education (ICoIE) yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang pada tanggal 6-7 September 2018, dan diterbitkan oleh UNP Press. (3) Desa Sioban Tato Tradition Policy in Preservation Of Mentawai dipresentasikan dalam ICELS 2019 pada tanggal 6 Agustus

2019 di UNJ Jakarta. (4) Peran Guru Sejarah dalam Menguatkan Nasionalisme pada Peserta Didik Kelas XI IPS di SMAN 2 Sungai Limau diterbitkan pada tahun 2021. (5) Perkembangan Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012-2020 dipublikasikan dalam Galanggang Sejarah pada tahun 2021. (6) How Students Relationship and Interest with the Selection of History Education Study Programs in 2019 terbit di Social Sciences Review and Humanities pada tahun 2022. (7) Syair Smong dalam Nyanyian Warisan Penyelamatan Diri dari Bencana Tsunami Aceh Simeulue dimuat dalam Jurnal Seni Nasional Cikini pada tahun 2023. (8) Terminal Goan Hoat: Sejarah dan Perannya dalam Sistem Transportasi di Padang (1972-2004) diterbitkan di Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora pada tahun 2023. (9) Perlombaan Pacu Jalur di Kuantan Singingi (2009-2019) dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Tambusai pada tahun 2023. (10) Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Memanfaatkan Microsoft Excel dalam Analisis Kualitas Butir Soal diterbitkan di Journal of Education Research pada tahun 2024. (11) Persepsi Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dimuat dalam JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education pada tahun 2024. (12) Buku berjudul 8 Keterampilan Dasar Mengajar (2018) di Publikasikan oleh STKIP PGRI Sumbar Press. (13) Buku Berjudul Mentawai dalam Wisata Adat dan Budaya (2020) di Publikasikan oleh STKIP PGRI Sumbar Press.



INDONESIA PADA MASA REVOLUSI NASIONAL TAHUN 1945-1949

Oleh: Arditya Prayogi

9.1. Pengantar

Masa revolusi nasional atau dikenal juga dengan revolusi fisik Indonesia, ialah masa terjadinya pertentangan fisik-bersenjata sekaligus diplomasi antara Negara Republik Indonesia (NRI) yang baru memproklamkan kemerdekaannya dengan Kerajaan Belanda yang disokong pihak Sekutu pemenang Perang Dunia II yaitu Inggris. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 hingga akhir 1949, yang ditandai dengan serangkaian peristiwa pertempuran dan diplomasi. Rangkaian peristiwa ini sendiri dimulai kala terjadinya pengalihan kekuasaan Jepang kepada Sekutu Inggris. Lewat *Civil Affairs Agreement*, Inggris kemudian mendaratkan pasukannya pertama kali di Jakarta, 20 September 1945 dengan dipimpin oleh Letjen Christinson (Malaka, 2022). Setelahnya, terjadi rangkaian peristiwa selama kurang lebih 4 tahun dengan latar utama berupa “perdebatan” posisi-status kemerdekaan Indonesia. Selama rentang masa ini, berbagai pertempuran berdarah terjadi secara sporadis di berbagai wilayah

Indonesia. Lebih lanjut, berbagai intervensi internasional juga terjadi. Di masa ini, Belanda tidak mampu untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan karena sengitnya perlawanan fisik dan diplomatik yang dilakukan Indonesia (Simatupang, 1981). Akhirnya, masa ini disudahi dengan adanya pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949.

Zaman revolusi fisik (1945-1949) merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa itu sendiri (Ayuningtyas dkk., 2016). Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu membahu selama revolusi hanya merupakan sedikit dari suatu dasar sejarah Indonesia (Fauziah dkk., 2023).

Pada masa revolusi kemerdekaan di Indonesia, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia menolak keras hadirnya kembali kolonialisme di Indonesia. Revolusi nasional Indonesia bertujuan untuk menghapuskan segala hal-hal yang masih berhubungan dengan pihak kolonialis-imperialis dan dapat mengganggu bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang (baru) merdeka yang mempunyai kedaulatan penuh. Meskipun masa revolusi tersebut sangat singkat waktunya, akan tetapi pada masa ini terdapat signifikansi penting dalam penentuan kedaulatan bangsa Indonesia

yang baru saja berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Selama masa revolusi kemerdekaan, negara Indonesia masih memerlukan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Momentum proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945, belum benar-benar menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka (secara substantif) yang terbebas dari berbagai pengaruh-jajahan negara luar. Untuk itu, revolusi kemerdekaan nasional Indonesia menjadi “jalan” perjuangan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia (Anggraeni dkk., 2022), salah satunya yaitu terlepas dari pengaruh bangsa-bangsa yang sebelumnya telah menguasai dan menjajah Indonesia. Tulisan ini kemudian berupaya untuk memberikan gambaran konseptual tentang apa dan bagaimana momentum revolusi nasional Indonesia sebagai bagian dari peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Lebih lanjut, dengan mendapatkan gambaran yang baik tentang masa ini, diharapkan dapat mempertebal rasa kebanggaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan.

9.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Tangan

Asing: Suatu Latar

Pada awal abad ke-20, telah mulai digemakan gagasan mengenai bagaimana bangsa ini bisa mengelola negaranya sendiri. Masa pergerakan nasional Indonesia yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi pergerakan, yang didalamnya turut memprakarsai strategi kooperatif melalui *volksraad* (dewan rakyat), menjadi penanda perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda. Meski, pada sisi yang lain, di masa ini juga terdapat bentuk perjuangan dengan memilih cara non-kooperatif yang menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri secara mutlak. Namun demikian, upaya-upaya ini pada akhirnya dengan mudah dijinakkan

dengan adanya berbagai kebijakan politik yang dijalankan oleh Belanda.

Berlanjut setelahnya, dimana bangsa Jepang kemudian melakukan pendudukan di Indonesia selama tiga setengah tahun di masa Perang Asia Timur Raya. Dalam prosesnya, ketika Jepang mulai terdesak dan berada di ambang kekalahan perang, Jepang kemudian melakukan propaganda dengan janji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, walaupun tidak menetapkan tanggal resmi (Yunarti, 2003). Kondisi demikian berlangsung hingga Jepang mengumumkan kekalahan mereka dalam perang dan melakukan perjanjian dengan pihak Sekutu selaku pemenang perang terkait dengan nasib bangsa Indonesia.

Kondisi ini, dimanfaatkan dengan strategis oleh bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan kondisi *vacum of power*, pada pertengahan bulan Agustus tahun 1945, pemerintahan republik Indonesia telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial (kemudian) dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Mendengar berita bahwasanya telah terjadi pembentukan pemerintah pusat di Jakarta. Beberapa daerah -dengan raja-rajanya menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda (Tim Penulis, 2015). Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit.

Terdapat momentum, dimana sebelum berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu

kota Jakarta tidak percaya. Saat berita mulai menyebar, banyak dari orang Indonesia datang untuk menyatakan diri mereka sebagai pro-republik, dan suasana revolusi kemerdekaan menggelora di seluruh negeri. Kevakuman kekuasaan selama berminggu-minggu setelah Jepang menyerah menciptakan suasana ketidakpastian di dalam politik Indonesia saat itu, tetapi hal ini menjadi suatu kesempatan bagi rakyat. Banyak pemuda Indonesia bergabung dengan kelompok perjuangan pro-republik dan laskar-laskar. Laskar-laskar yang paling terorganisir antara lain kelompok PETA dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Namun pada saat itu, laskar-laskar rakyat berdiri sendiri dan koordinasi perjuangan cukup kacau. Pada minggu-minggu pertama, tentara Jepang menarik diri dari daerah perkotaan untuk menghindari konfrontasi dengan rakyat (Isnaeni, 2015).

Pada bulan September 1945, pemerintah republik yang dibantu laskar rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur-infrastruktur utama, termasuk stasiun kereta api dan trem di kota-kota besar di Jawa. Untuk menyebarkan pesan-pesan revolusioner, para pemuda mendirikan stasiun radio dan koran, serta grafiti yang penuh dengan sentimen nasionalis. Di sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, komite perjuangan dan laskar-laskar milisi dibentuk. Koran kaum republik dan jurnal-jurnal perjuangan terbit di Jakarta, Yogyakarta dan Surakarta, yang bertujuan memupuk generasi penulis yang dikenal sebagai Angkatan 45 (Iskandar dkk., 2001). Lebih lanjut, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri "siap mati" untuk kemerdekaan karena tidak dapat menahan kesabaran mereka. Pada saat itu, peristiwa penculikan kaum "non-pribumi" -interniran Belanda, orang-orang Eurasia, Maluku dan Tionghoa- sangat umum terjadi. Kaum ini dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara pemerintah pusat di Jakarta terus menyerukan kepada para pemuda agar dapat tenang. Namun, pemuda yang

mendukung perjuangan bersenjata memandang pimpinan yang lebih tua sebagai para "pengkhianat revolusi", yang pada akhirnya juga menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil (Reid, 1974).

Atas kejadian ini, pihak Kerajaan Belanda kemudian menuduh bangsa Indonesia, -melalui Soekarno dan Hatta, telah berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Meskipun begitu, Belanda hanya dapat sekedar melakukan celaan. situasi Belanda pada saat itu lemah setelah diamuk Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Jepang dan kekuatan sekutu lainnya juga enggan menjadi pelaksana tugas pemerintahan (transisi) di Indonesia. Sementara, pihak sekutu -sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, yang diwakili oleh Amerika Serikat sedang fokus bertempur di kepulauan Jepang (Bidien, 1945). Indonesia kemudian diletakkan di bawah kendali seorang laksamana dari Angkatan Laut Britania Raya, yang dikomandoi Panglima Tertinggi Sekutu untuk Komando Asia Tenggara (SEAC), Laksamana Earl Louis Mountbatten,

Inggris kemudian ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda lantas mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat NICA dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara Sekutu (Inggris) belum mendarat di Indonesia (Pulau Jawa) sampai September 1945. Padahal, Sekutu memiliki tugas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa pemulangan ratusan ribu orang Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Tentara Inggris kemudian berhasil mendarat di Indonesia pada bulan Oktober 1945 di berbagai kota. Kota-kota besar yang ada di berbagai pulau seperti Medan, Padang, Palembang, dan Surabaya (Ricklefs, 2001).

Dalam usaha menghindari bentrokan dengan orang-orang

Indonesia, komandan pasukan Inggris Letjen Sir Philip Christinson, mengirim para prajurit Belanda yang dibebaskan ke Indonesia Timur, dimana pendudukan kembali Belanda berlangsung mulus. Ketegangan memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatra. Bentrokan pecah antara kaum republikan melawan para musuh negara, seperti tawanan Belanda, KNIL, orang Tionghoa, orang-orang Indo dan warga sipil Jepang. Para pemimpin republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang menyebar di masyarakat, karena ada beberapa kelompok yang menginginkan revolusi fisik, dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai (McMillan, 2005). Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan pemimpin kiri lainnya menyebarkan gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta, sebaliknya, lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi. Massa pro-revolusi melakukan demonstrasi di di kota-kota besar, salah satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari ratusan ribu orang. Tetapi aksi ini yang akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta, karna mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan (Vickers, 2005).

9.3. Revolusi Nasional Indonesia: Bentuk dan Dinamikanya

Inti dari periode revolusi nasional adalah bergelornya semangat kemerdekaan dan dekolonisasi di tengah berbagai bentuk kekacauan yang terjadi. Orientasi pada kemerdekaan ditunjukkan dengan pengorbanan-pengorbanan atas nama revolusi. Meskipun saling mencurigai, kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi secara bersama-sama berhasil menyelesaikan revolusi politik. Revolusi nasional merupakan manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat didalamnya sebagai suatu pengalaman

emosional yang luar biasa (Ricklefs, 2001). Dalam hal ini, revolusi nasional mempunyai pengaruh psikologis umum yang besar sekali. Selain mengusahakan perubahan mendasar dalam status politik Indonesia, revolusi membawa perubahan luas yang mencolok dalam ciri bangsa Indonesia (Kahin, 1995).

Masa revolusi fisik dalam keyakinan banyak pihak dianggap sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Bagi para pemimpin revolusi Indonesia, revolusi bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah sebutan-sebutan yang berbeda untuk perdebatan dasar yang sama. Semua perbedaan itu sebagian merupakan gambaran-gambaran tentang suatu masa ketika perpecahan-perpecahan yang menimpa bangsa Indonesia berbentuk beraneka ragam dan terus menerus berubah (Ayuningtyas dkk., 2016).

Di awal revolusi, tidak satu pun pembagian dasar di antara bangsa Indonesia tersebut telah terpecahkan terkecuali sepanjang ada kesepakatan tentang kemerdekaan sebagai tujuan pertama bagi kaum revolusioner, segala sesuatunya tampak dimungkinkan kecuali kekalahan. Pada prosesnya, masa revolusi nasional mengambil dua bentuk utama berupa perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi (Tirtoprodjo, 1966). Meski, dalam prosesnya kedua bentuk ini “berjarak” dengan saling mencurigai, namun kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi secara bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan.

Kekuatan-kekuatan yang mendukung revolusi sosial, generasi muda, golongan kiri, dan kekuatan Islam semuanya menghadapi harapan yang sangat terbatas. Selama masa revolusi nasional Indonesia, meski mengambil dua bentuk perjuangan, keduanya menyepakati bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat perang.

Kondisi-kondisi seperti inilah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia selama masa revolusi fisik. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka dalam dinamikanya terjadi perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan Islam dan kekuatan sekuler, dan sebagainya (Tirtoprodjo, 1966). Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai suatu masa ketika perpecahan menimpa bangsa Indonesia berbentuk beraneka ragam dan terus-menerus berubah. Sedangkan, bagi para pemimpin revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.

Baik perjuangan bersenjata, dan kemudian diplomasi, terjadi dengan latar situasi yang dijumpai oleh sekutu dan Belanda pada saat tiba di Indonesia di luar dari dugaan mereka dimana Indonesia ternyata telah menyatakan kemerdekaannya, meskipun hal itu tidak diakui oleh Belanda. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Ketegangan ini diawali dengan peristiwa “Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato”, Surabaya pada 19 September 1945. Setelah tersiar kabar adanya bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato, ribuan *arek-arek Suroboyo* yang didominasi pemuda ramai mendatangi hotel tersebut. Pengibaran bendera Belanda, dianggap tidak menghormati harga diri Indonesia yang telah dinyatakan berdaulat. Keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia berdampak pada bangkitnya kembali semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kemerdekaan seutuhnya. Pasca peristiwa ini,

pecah berbagai perlawanan dan pertempuran terjadi di beberapa daerah seperti pertempuran Bojong Kokosan, pertempuran Lima Hari di Semarang, peristiwa 10 November di Surabaya, pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api (Nurbantoro dkk., 2022).

Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia mendorong Belanda untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Namun, realisasi perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus sehingga pada 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pemimpin Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut sehingga pada 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi pada Perundingan Linggarjati dan melakukan Agresi Militer Belanda I (*Operatie Product*). Agresi ini bertujuan untuk merebut daerah-daerah di Indonesia, terutama yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam. Aksi Belanda ini mereka anggap sebagai tindakan polisional. Kekuatan pasukan Belanda saat itu cukup besar, lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan modern, termasuk persenjataan berat hibah dari tentara Inggris dan Australia. Dengan tindakan ini, Belanda berhasil melakukan klaim atas beberapa wilayah Indonesia (Nurbantoro dkk., 2022).

Keberhasilan yang diperoleh Belanda pada Agresi Militer I, menimbulkan keinginan Belanda untuk melanjutkan aksinya merebut Yogyakarta dengan melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Jenderal Seodirman meminta Presiden Soekarno untuk ikut serta bergerilya bersama pasukannya, namun ajakan tersebut ditolak oleh Soekarno. Aksi ini berakibat pada jatuhnya ibu kota negara dan penangkapan para pemimpin bangsa, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Untuk tetap menjaga eksistensi negara, maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik

Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Jenderal Soedirman menyatakan akan tetap meneruskan perjuangan “met of zonder pemerintah, tentara akan berjuang terus”. Berdasarkan perintah kilat No 1/PB/D/48 tanggal 19 Desember 1948 maka satuan-satuan Angkatan Perang yang didukung masyarakat melaksanakan perang gerilya di seluruh daerah. Strategi Jenderal Soedirman adalah dengan menghindari kontak besar dengan unsur utama tentara Belanda, sehingga menyelamatkan Indonesia dari kekalahan total (Nurbantoro dkk., 2022).

Tantangan terbesar pada masa revolusi nasional Indonesia, terutama pada bentuk perjuangan bersenjata adalah belum tersusunnya organisasi tentara reguler secara utuh. Hal ini sejatinya disadari oleh para petinggi militer kala itu, bahwa untuk melakukan perlawanan bersenjata, tetap diperlukan adanya pasukan inti (komponen utama) yang profesional, sehingga harus ada upaya untuk mengatur keberadaan pasukan-pasukan partikelir mengingat masih adanya berbagai badan atau kelompok pejuang, seperti Hizbullah, Pesindo, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Barisan Banteng, dan Laskar Rakyat yang kekuatannya relatif berimbang dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) bahkan di beberapa daerah kekuatannya lebih dominan. Atas pertimbangan tersebut, maka nantinya dilakukan upaya peleburan satuan-satuan perjuangan dengan susunan organisasi dan persenjataan yang lebih efektif menjadi Resimen Perjuangan (Nurbantoro dkk., 2022).

Meski, dengan ditangkapnya para pemimpin bangsa bukan berarti perjuangan politik dan diplomasi terhenti, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi mengambil alih tugas menjaga eksistensi negara. Sementara di luar negeri, para pejuang dipomasi tetap bergerak, menggalang dukungan dari dunia internasional. Sjafruddin

pada 31 Maret 1949 menunjuk A.A. Maramis, sebagai Menteri Luar Negeri yang berkedudukan di New Delhi, India. Para pejuang diplomasi lainnya di luar negeri, seperti Dr. Soedarsono sebagai wakil Indonesia di India, Soemitro Djojohadikoesoemo yang saat itu sedang di Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama ekonomi, juga L.N. Palar sebagai perwakilan Indonesia di PBB sejak 1947. Para pejuang diplomasi terus bergerilya dari satu negara ke negara lain. Mereka juga diundang Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, untuk menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 yang membahas secara khusus persoalan Indonesia. Palar dan para diplomat terus mendesak PBB agar dapat bersikap tegas terhadap Belanda, upaya itu menghasilkan Resolusi DK-PBB pada 28 Januari 1949 yang membuat Belanda semakin terdesak (Fitria, 2022). Adanya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan tentara Indonesia di Yogyakarta memperkuat kedudukan Indonesia di dunia Internasional bahwa bangsa Indonesia tidak akan mundur selangkah pun untuk merebut kemerdekaannya. Ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah Belanda dan Indonesia mendorong dilakukannya kembali Perundingan Roem-Royen yang berlangsung cukup alot pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Pada 7 Mei 1949 ditandatangani hasil kesepakatan dari Perundingan Roem-Royen yang memutuskan bahwa akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk membahas rencana penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat oleh pihak Belanda. KMB menjadi senjata pamungkas bagi Indonesia untuk mendapatkan legitimasi menjadi negara yang merdeka seutuhnya (Leirissa, 2006), hingga pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

9.4. Penutup

Masa Revolusi Nasional atau dikenal pula dengan Revolusi Fisik

Indonesia (1945-1949) merupakan masa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan penegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Masa ini, dalam banyak perspektif dapat dikatakan sebagai masa yang menentukan karakter atau watak politik Indonesia, berupa watak (bangsa yang) cinta perdamaian tetapi (bangsa yang) lebih cinta kemerdekaan. Bentuk perjuangan di masa ini, baik perjuangan fisik maupun diplomasi membuktikan kepada negara-negara lain hingga PBB bahwa Indonesia memiliki “kemampuan” dan “sumber daya” yang cukup baik dan mampu sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain. Perjuangan-perjuangan ini mampu memberikan efek penggentar bagi Indonesia terhadap Belanda sehingga berpikir seribu kali untuk dapat menguasai kembali Indonesia. Perjuangan-perjuangan ini juga menjadi kunci diakuinya kemerdekaan Indonesia seutuhnya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan dari elit militer maupun elit politik terhadap cara yang ditempuh, namun masa revolusi nasional Indonesia tahun 1945-1949 telah membuktikan bahwa apapun bentuk perjuangan harus dilakukan di semua lini dengan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki untuk satu tujuan yang sama. Tanpa perjuangan bersenjata menghadapi pasukan Belanda, upaya diplomatik akan menjadi sia-sia. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya upaya diplomasi di dunia internasional maka perjuangan bersenjata akan menjadi sia-sia. Perjuangan bersenjata merupakan upaya moral dan diplomatik, menginspirasi pasukan yang mengalami demoralisasi di seluruh Indonesia, serta membuktikan kepada PBB bahwa tentara Indonesia masih ada dan mampu berperang. Serangan itu telah menurunkan moral pasukan Belanda, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa pasukan Indonesia dapat menyerang dan menguasai kota. Hal ini membuktikan bahwa perang bukanlah hanya sekedar berasal dari kebijakan, tetapi perang merupakan instrumen politik, kelanjutan

dari kegiatan politik dengan cara lain. Meski penting, namun pada prosesnya, sebagai sejatinya perjuangan, maka didalamnya juga jatuh berbagai korban, baik harta dan terutama korban jiwa. Perkiraan yang meninggal dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dari rakyat sipil dan pejuang sebanyak ratusan ribu jiwa dari pihak Indonesia. Lebih lanjut, masa revolusi nasional Indonesia ini juga memberikan efek langsung dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. D., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2022). Revolusi Indonesia dalam Perspektif Pro dan Kontra Pers Nasional Periode Pasca Proklamasi hingga Tercapainya Pengakuan Kedaulatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 35–58.
- Arditya, P. Memupuk Optimisme Proklamasi. *Tribun SumSel*, 10.
- Arditya, P. (2021). Modul Ajar Sejarah Peradaban Islam Berbasis Mind Mapping.
- Ayuningtyas, D. R., Suharso, R., & Sodik, I. (2016). Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 5(1), 10–17.
- Bidien, C. (1945). Political Problems of Indonesia "Independence the Issue 14 (24): 345–348. *Far Eastern Survey*, 14(24), 345–358. <https://doi.org/10.2307/3023219>
- Fauziah, N., Bustan, & Jumadi. (2023). Soppeng pada Masa Revolusi, 1945-1950. *Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, 21(1), 148–155.
- Fitria, M. P. (2022). PERANAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PDRI 1948-1949.
HISTORIA VITAE, 02(02), 1–11.

- Iskandar, G., Suroso, & Idris, Z. (2001). *Kurir-Kurir Kemerdekaan (Kisah Nyata para Pemuda Pembawa Berita Proklamasi 1945)* (3 ed.). Balai Pustaka.
- Isnaeni, H. F. (2015). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan: Kesaksian, Penyiaran, dan Keterlibatan Jepang*. Kompas.
- Kahin, G. M. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (N. B. Soemanto, Penerj.). Sebelas Maret University Press.
- Leirissa, R. Z. (2006). *Kekuatan Ketiga: Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Pustaka Sejarah.
- Malaka, T. (2022). *GERPOLEK Gerilya Politik Ekonomi* (N. Ferrtikasari, Ed.). Narasi.
- McMillan, R. (2005). *The British Occupation of Indonesia 1945–1946*. Routledge.
- Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2022). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3)*, 10520–10530.
- Prayogi, A., Mufid, M. A., & Ghufron, M. A. (2024). THE ROLE OF THE COMMUNITY IN DEVELOPING EDUCATION AT THE DONOWANGUN PEKALONGAN ELEMENTARY MADRASAH. *International Journal of Economics, Science, and Education, 1(3)*.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2024). Study of the Urgency of Islam as a Religion in the Current of Modernity. *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin, 1(2)*, 1-15.
- Prayogi, A., Pramana, A. S., Saputri, T. I., Loyal, A. I., Andika, B. I., Ahassa, T. F. F., ... & Sa'adah, N. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Hama Sundeput Putih pada Tanaman Padi di Desa Bulu Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian*

Pelitabangsa, 5(01).

- Prayogi, A., Pujiono, I. P., & Nugroho, D. A. (2024, July). TELAAH MEDIUM KRITIK SOSIAL BERBASIS BUDAYA POPULER VIDEO GAME. In *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian* (Vol. 6, pp. 184-190).
- Reid, A. (1974). *The Indonesian National Revolution 1945–1950*. Longman Pty Ltd.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave.
- Simatupang. (1981). *Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Yayasan Pustaka Militer.
- Tim Penulis. (2015). *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Kemendikbud.
- Tirtoprodjo, S. (1966). *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia: Tahapan revolusi bersenjata 1945—1950*. Pembangunan.
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Yunarti, D. R. (2003). *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*. Kompas.

PROFIL PENULIS



Arditya Prayogi
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Penulis menekuni bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Oleh: Budi Juliardi, SH., M.Pd.

Secara teoritis, istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Secara terminologi, kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “demos” yang berarti “rakyat”, dan “kratos/cratein” yang berarti “kekuasaan”, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara (Juliardi, 2014:34).

Istilah demokrasi banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu mempunyai kesamaan prinsip, seperti Abraham Lincoln

yang menyatakan bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sementara Giovanni Sartori menyatakan bahwa “Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tidak seorang pun dapat mengidentifikasi dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat”. Lebih lanjut, Sidney Hook menyatakan bahwa “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.

Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dewasa ini, semua negara di dunia mengklaim bahwa mereka merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak merdeka pernah melalui empat periode demokrasi, mencakup masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965-1998), dan Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998-hingga saat ini). Tulisan ini mengkaji tentang masa penerapan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia.

10.1. Periode Demokrasi Liberal

Menurut Matroji (2002:67), demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Sementara menurut Riawan (2016:27), demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi

secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Berdasarkan dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat, dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif.

1. Sejarah Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang bisa diterapkan, seperti Federasi, Monarki, Republik-Parlementer, dan Republik-Presidensial.

Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden, Mohammad Hatta, mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR/DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi sebagai lembaga pembantu presiden.

Di bawah kepemimpinan Sutan Sjahrir, KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan Maklumat Pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan Kabinet Parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri.

Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Setelah RIS dibubarkan, sejak tahun 1950, Indonesia menerapkan

demokrasi parlementer-liberal dengan meniru sistem parlementer Barat. Masa ini dikenal sebagai Masa Demokrasi Liberal, di mana Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang bersifat liberal sebagai konstitusi. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh dewan menteri (kabinet) di bawah kepemimpinan perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Menurut Reichart (2011:34), ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia, yaitu meliputi:

a. Adanya Kebebasan Individu

Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal politik. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu memiliki banyak sekali partai, seperti PNI, PKI, Masyumi, NU, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, PSII, dan PSI. Banyaknya partai yang muncul karena kebebasan individu memang harus diberikan fasilitas. Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal ini mendorong munculnya beragam partai politik dengan ideologi dan tujuan politik yang berbeda.

b. Kekuasaan Pemerintah Terbatas

Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Sehingga, tetap terjadi check and balance yang diberlakukan.

c. Seluruh Masyarakat Boleh Berpartisipasi dalam Politik

Ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia selanjutnya adalah seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik, tanpa memandang latar belakang dari mana berasal. Partisipasi ini terlihat dari banyaknya partai yang terbentuk

pada pemilu tahun 1955. Pemilu tersebut merupakan yang pertama berlangsung di Indonesia. Kala itu pesertanya sangat beragam, bahkan tidak hanya partai saja, tapi ada juga yang menjadi peserta sebagai individu. Beberapa partainya seperti PKI, PSI, Acoma, Murba dan lain-lain.

d. Dilaksanakannya Pemilu Periode Tertentu

Pemilu pada sistem demokrasi liberal di Indonesia ini dilaksanakan pada periode tertentu dan secara rahasia. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena sebagai jalan para peserta parpol untuk menduduki tempat di pemerintahan.

e. Pemerintahan Bisa Membentuk Hukum Sesuai Suara Mayoritas Parlemen

Ciri terakhir yaitu pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintahan dikepalai perdana menteri dalam sistem demokrasi terpimpin. Biasanya perdana menteri ini asalnya dari pemenang pemilu. Sedangkan pada demokrasi liberal, banyak kebijakan yang berubah. Apalagi mengingat pergantian kabinet sering terjadi. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet sudah mengalami 7 kali pergantian.

Sementara itu, terdapat beberapa Kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal, yaitu:

- a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
- b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
- c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)
- d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)
- e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
- f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Namun, setelah hampir 9 tahun berlangsung, UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal terbukti tidak sesuai dengan kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembalinya berlakunya UUD 1945.

10.2. Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai “Pancasila” yang merupakan dasar negara Indonesia. Demokrasi terpimpin mulai berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966. Periode ini mengikuti pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Soekarno mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut pada sistem desa tradisional yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa. Namun, pada tingkat nasional, ini berarti pemerintahan terpusat di bawah kendali Sukarno. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut “Dwi Tunggal” yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah (Feith, 1995).

Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada

pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Pada masa ini pula, Soekarno mengusulkan tiga campuran ideologi, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang populer disebut dengan “Nasakom”. Hal ini dimaksudkan untuk memuaskan empat faksi utama dalam sistem perpolitikan di Indonesia masa itu, yaitu TNI yang mewakili kaum nasionalis sekuler, alim ulama yang mewakili kelompok Islam, dan kaum Komunis. Dengan dukungan militer, ia memproklamasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dan mengusulkan kabinet yang mewakili semua partai politik utama termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun partai-partai tersebut tidak pernah benar-benar diberi posisi kabinet fungsional.

Dalam catatan sejarah, Soekarno mencetuskan lahirnya demokrasi terpimpin dengan alasan bahwa (Sopiah, 2010:67):

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi:

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Setelah Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiga menteri berasal dari militer. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin ini berakhir setelah lengsernya Soekarno dari jabatan sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1966. Kondisi ini juga diakibatkan oleh meletusnya gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI yang membuat kepercayaan rakyat pada Soekarno menjadi luntur. Soeharto menggantikan Soekarno dan menerapkan sistem demokrasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Feith, Herbert. 1995. Soekarno – Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Matroji. 2002. Sejarah. Jakarta: Erlangga
- Reichart, Daniel. 2011. Melacak Jejak dan Prospek Sosial Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vo. 11. Perkumpulan Sosdem Indonesia.
- Riawan, Yosep. 2016. *Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sopiah, Pipih. 2010. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Nobel Edumedia.

PROFIL PENULIS



Budi Juliardi, S.H., M.Pd.

**Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas PGRI Sumatera Barat**

Budi Juliardi, SH., M.Pd., lahir 30 Juli 1980 di Koto Baru, Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. SD, SMP, dan SMA di tamatkan di Kota Curup, Bengkulu. S1 selesai di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 2002, S2 Pendidikan Kewarganegaraan di UNP tahun 2012. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Prodi PPKn Universitas PGRI Sumatera Barat. Selain itu, mengajar juga di Universitas Bung Hatta, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Baiturrahmah, Padang.

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Sumatera Barat” serta “Permasalahan Anak Jalanan di Kota Padang dan Upaya Penanggulangannya”. Buku yang telah terbit antara lain Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi terbitan Rajawali Pers, Jakarta; Ilmu Sosial Budaya Dasar terbitan Alfabeta, Bandung; berbagai tulisan ilmiah telah terpublikasi di jurnal nasional dan prosiding internasional.

ORDE BARU

Oleh: Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum.

11.1. Awal Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ali Moertopo, bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan (Ali Moertopo, 1981:26-28). Pada periode atau kurun waktu 1966-1998 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Ini merupakan upaya sebagai menggantikan posisi Soekarno, kemunculan dari Jendral Soeharto yang bahkan sebelumnya tidak dikenal, menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 65.

Namun pada awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto tidaklah cukup radikal. Langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto untuk berada ditampuk kepemimpinan Orde Baru adalah melalui Sidang Umum MPR 1967. Pada Sidang Istimewa itu, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah pada Sidang Istimewa MPR 1967, oleh

Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971

Sebelum lahirnya Orde Baru, Indonesia berada dalam periode Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Pada masa ini, terjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta ketegangan antara berbagai kelompok politik.

Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai orde baru. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967, masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Pemerintahan berusaha segera pulih usai berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno.

Terjadinya peristiwa 1965, Pada 30 September 1965, terjadi sebuah kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Dalam kekacauan ini, enam jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Militer, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, mengambil alih kekuasaan.

Hal ini merupakan pengalihan kekuasaan. Setelah kudeta, Soeharto mulai mengonsolidasi kekuasaan. Pada Maret 1966, ia mendapatkan surat perintah dari Sukarno yang memberi wewenang untuk mengambil alih kekuasaan. Sukarno kemudian dijadikan presiden yang tidak berkuasa.



Gambar 1. Tuntutan Rakyat

Kemunculan Orde Baru ditandai dengan dibentuknya TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA terdiri dari tiga tuntutan, yaitu pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Orde baru ini bermula dari tahun 1966 sampai tahun 1998.

Tuntutan ini bertambah banyak karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka. Puncaknya, peristiwa G30S/PKI membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno menurun. G30S/PKI menjadi salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno, dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto, yang dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Dalam surat tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998.

Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik, dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya. Dalam masa ini, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi, di mana sektor perekonomian berkembang pesat meski dibarengi dengan praktik korupsi. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga bertambah kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997.

Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan,

ketenangan, dan stabilitas politik. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru.

11.2. Sistem Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan orde baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan orde baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemerintahan orde baru komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu: Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.

Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa orde baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi.

Perubahan ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Pada pemerintahan orde Baru yang terjadi diantaranya:

1. **Reformasi Ekonomi dan Stabilitas:** Orde Baru fokus pada stabilisasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Melalui pendekatan pembangunan yang dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan," Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama tahun 1970-an dan 1980-an.
2. **Pengawasan dan Represi:** Meskipun berhasil dalam ekonomi,

Orde Baru dikenal dengan tindakan represif terhadap oposisi. Banyak aktivis, jurnalis, dan pemimpin politik yang ditangkap atau dihilangkan. Pembatasan kebebasan pers dan hak asasi manusia juga menjadi ciri khas rezim ini.

3. **Krisis Ekonomi dan Penurunan Dukungan:** Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia berdampak besar pada Indonesia, memicu inflasi dan pengangguran. Ketidakpuasan rakyat meningkat, dan demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah.
4. **Reformasi 1998:** Pada Mei 1998, setelah tekanan rakyat yang kuat, Soeharto mengundurkan diri. Ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi, di mana reformasi politik dan ekonomi dilaksanakan.

Pemerintahan Orde Baru memiliki dampak yang mendalam terhadap sejarah Indonesia, dengan berbagai warisan baik positif maupun negatif yang masih terasa hingga kini.

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru di Indonesia ditandai oleh beberapa kebijakan dan pendekatan yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin utama mengenai pelaksanaan pemerintahan Orde Baru:

1. **Konsolidasi Kekuasaan**
Sentralisasi Kekuasaan: Orde Baru mengutamakan kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden Soeharto dan militer. Struktur pemerintahan dibentuk untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan.
2. **Penegakan Pancasila:** Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi yang wajib diterima oleh semua kalangan. Organisasi masyarakat seperti Partai Golkar menjadi alat untuk mendukung kekuasaan Orde Baru.
3. **Reformasi Ekonomi: Program Pembangunan Ekonomi:** Fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri.

Program-program seperti Transmigrasi dan pembangunan daerah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

4. Investasi Asing: Mendorong masuknya investasi asing dengan memberikan kemudahan regulasi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat selama dekade 1970-an dan 1980-an.
5. Stabilitas Sosial dan Keamanan: Pendekatan Represif: Menggunakan kekuatan militer dan aparat keamanan untuk menekan gerakan oposisi. Penangkapan dan penghilangan paksa terhadap aktivis yang dianggap mengancam stabilitas.
6. Pengawasan Ketat: Media dan organisasi masyarakat sipil berada di bawah pengawasan ketat. Kebebasan pers sangat dibatasi, dengan kontrol ketat terhadap informasi yang beredar.
7. Politik Pemilihan Umum: Pemilihan Umum Terstruktur: Pemilu diadakan secara teratur, tetapi sangat terkontrol. Partai-partai politik yang diizinkan hanya yang mendukung pemerintah, seperti Golkar, PPP, dan PDI.
8. Manipulasi Politik: Pemilu seringkali tidak bebas dan adil, dengan penggunaan intimidasi dan manipulasi untuk memastikan kemenangan partai yang mendukung Orde Baru.
9. Pendidikan dan Kebudayaan: Pendidikan Nasional: Fokus pada pendidikan yang menekankan nasionalisme dan ideologi Pancasila. Kurikulum diawasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang dianggap subversif.
10. Budaya Resmi: Promosi budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Orde Baru dan pengabaian terhadap kebudayaan lokal yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik.

11.3. Akhir Masa Pemerintahan Orde Baru

1. Krisis dan Reformasi

Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia memicu ketidakpuasan yang meluas. Inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan meningkat, yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran. Akhir Orde Baru banyaknya Tekanan rakyat mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki era Reformasi.

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks, dengan pencapaian dalam pembangunan ekonomi tetapi juga banyak pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan politik. Keruntuhan Orde Baru di Indonesia terjadi pada akhir 1990-an, dipicu oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis politik dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam keruntuhan rezim ini:

a. Krisis Ekonomi

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan nilai tukar rupiah anjlok, inflasi meningkat, dan banyak perusahaan bangkrut. Krisis ini menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

b. Kebijakan Ekonomi yang Gagal

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap korup dan tidak efektif memperburuk situasi. Banyak rakyat merasa bahwa hanya segelintir orang yang diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi yang ada.

c. Birokrasi Korup dan Nepotisme

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin umum di berbagai tingkatan pemerintahan dan bisnis. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kritik dan Penolakan, Semakin banyak suara kritis dari masyarakat dan aktivis yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

d. Mobilisasi Rakyat dan Demonstrasi

Aksi Mahasiswa, Mahasiswa dan kelompok masyarakat mulai mengorganisir demonstrasi besar-besaran, menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Puncaknya terjadi pada awal 1998, ketika demonstrasi di berbagai kota berlangsung secara bersamaan. Kasus Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa tewas dalam aksi demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memicu kemarahan lebih lanjut dan demonstrasi yang lebih besar.



Gambar 2. Demonstrasi Besar-Besaran di Jakarta

e. Kehilangan Dukungan Internasional

Tekanan dari Negara Lain: Komunitas internasional mulai menekan Soeharto untuk melakukan reformasi. IMF dan negara donor lainnya mengaitkan bantuan dengan pelaksanaan reformasi ekonomi dan politik. Pergeseran Opini Publik hal ini terjadi pada Dukungan internasional terhadap Orde Baru berkurang seiring meningkatnya kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

f. Turbulensi Politik

Krisis Legitimitas: Setelah bertahun-tahun memegang kekuasaan, legitimasi Soeharto semakin dipertanyakan. Banyak yang merasa bahwa rezim telah gagal memenuhi harapan rakyat. Perpecahan di dalam Pemerintahan: Terdapat perpecahan di dalam

elit politik dan militer, yang memunculkan konflik internal dan mengurangi kekuatan Soeharto.

g. Pengunduran Diri Soeharto

Pada Mei 1998, demonstrasi mencapai puncaknya, dengan jutaan orang turun ke jalan. Tekanan yang kuat dari rakyat dan militer memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Transisi ke Reformasi dengan pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi, yang ditandai dengan tuntutan untuk demokratisasi dan perubahan sistem politik.

Keruntuhan Orde Baru membawa perubahan besar bagi Indonesia, membuka jalan bagi reformasi politik, kebebasan berpendapat, dan penegakan hak asasi manusia, meskipun tantangan tetap ada dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi Tragedi Trisakti yaitu terbakarnya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997-1998 merupakan periode orde baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia.

Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim orde baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah tiga dasawarsa lebih menjabat, orde baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Moertopo, 1981. Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta : CSIS.
- Harian D. T. (2016), Suharto: A Political Biography.* Cambridge University Press.
- Bertrand, Jacques. (2004), Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia. Routledge.
- Crouch, Harold. (1978), The Army and Politics in Indonesia.* Equinox Publishing.
- Mietzner, Marcus. (2013), The Political Economy of the Indonesian Crisis. Routledge.
- Ricklefs, M. C. (2012), A History of Modern Indonesia Since C. 1200.* Palgrave Macmillan.
- Harrison, P. (2006), The History of Indonesia. Greenwood Press.
- Mietzner, Marcus. (2014).** "The Role of the Military in Indonesian Politics: Between the Old and New Orders." *Asian Journal of Political Science*, 20(1), 1-23.
- Moch, S. M. (1999).** "Crisis and Change: The Indonesian Economy in the 1990s." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 35(1), 1-19.
- BBC News.** (1998). "Indonesia's Suharto Resigns." Tersedia di: [BBC](<https://www.bbc.com/news/world-asia-43968090>).
- Komnas HAM.** (1998). "Laporan Akhir Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia." Tersedia di: [Komnas HAM](<http://www.komnasham.go.id>).

Republik Indonesia. (1998).** *Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Jakarta: Komnas HAM.

[Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Sejarah Masa Orde Baru (1966-1998)",
Klik untuk
baca: https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/140000869/sejarah-masa-orde-baru-1966-1998-?lgn_method=google&google_btn=onetap.

detikedu, "Masa Orde Baru: Latar Belakang, Sistem Pemerintah dan Penyebab Jatuhnya"
selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6042076/masa-orde-baru-latar-belakang-sistem-pemerintah-dan-penyebab-jatuhnya>.

PROFIL PENULIS



Dr. Zulfa, S. Pd., M.Pd., M.Hum
Dosen Ilmu Pendidikan Sejarah & Budaya
Universitas PGRI Sumatera Barat

Penulis adalah dosen dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Menjadi dosen sejak tahun 1999. Pertama sekali menjadi dosen Penulis menjadi dosen Luar Biasa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan prodi Pendidikan Sejarah. Universitas Riau 10 tahun dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Penulis menyelesaikan S1 di FKIP Sejarah Universitas Riau, S2 pendidikan IPS/Sejarah PPS UNP dan S2 Kajian Budaya FIB Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan Doktor Ilmu Pendidikan PPS UNP tahun 2021. Sekarang penulis dosen di PPG dan S2 Studi Humanitas Universitas PGRI Sumatera Barat.



REFORMASI DAN MASA TRANSISI

Oleh: Ahmad, S.Pd., M.Pd.

12.1. Situasi Pra Reformasi

Bangsa Indonesia telah melalui berbagai periode dalam sejarahnya, dimana setiap periode bersejarah tersebut dijadikan titik balik dalam membangun negara Indonesia hingga saat ini. Periode-periode Sejarah tersebut dalam historiografi bangsa Indonesia dibagi kedalam lima era, yaitu; era prakolonial, era kolonial, era kemerdekaan awal, pasca proklamasi kemerdekaan sampai jatuhnya Soekarno (1945-1966), dan era orde baru (1966-1998) serta era reformasi-sekarang (Abdillah Aam, 2012). Dinamika sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa selalu menarik untuk dibicarakan dan tidak akan pernah habis untuk dibahas dari generasi ke generasi bangsa ini. Keberadaan bangsa Indonesia saat ini dengan berbagai dinamikanya di bangun dari akar sejarah yang kuat demi menghadirkan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Salah satu periode penting tersebut yang sangat bermakna bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah periode terjadinya reformasi Indonesia. Reformasi di Indonesia didorong oleh berbagai situasi dalam negeri dimana seluruh elemen masyarakat

yang di motori oleh kaum intelektual menuntut perubahan secara fundamental atas berbagai situasi tersebut yang dianggap semakin meningkatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Situasi yang dimaksud sebelum terjadinya reformasi diantaranya:

1. Krisis Ekonomi

Selama kurang lebih 30 tahun, yaitu tahun 1970 hingga pertengahan tahun 1997, perekonomian Indonesia menunjukkan stabilitas produktivitas yang sangat baik dengan turunnya angka kemiskinan penduduk dari 60% menjadi 11%. Pada tahun 1993, Bank Dunia mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara ekonomi industri baru (NIE: New Industrialized economies) bersama dengan negara Malaysia dan Thailand, (Karmeli, 2008). Namun, trend perekonomian Indonesia yang positif ini mulai goyah pada awal tahun 1997 dimulai dengan terjadinya krisis nilai tukar beberapa mata uang asing seperti terpuruknya nilai tukar Bath Thailand terhadap Dolar Amerika. Dengan situasi tersebut pemerintah Indonesia masih berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi pada mata uang Indonesia dikarenakan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia saat itu.

Kekuatan ekonomi Indonesia yang pada saat itu diyakini tidak akan berdampak krisis mata uang, pada akhirnya juga mengalami nasib yang sama dengan terjadinya krisis nilai tukar mata uang rupiah yang menyebabkan inflasi menjadi sangat tinggi. Tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan menyelamatkan cadangan devisa dengan melakukan intervensi dalam pasar valuta asing. Namun keadaan semakin memburuk sehingga di bulan Agustus 1997 pemerintah mengambil kebijakan nilai tukar rupiah dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas dan juga pemerintah pada Oktober 1997 melakukan pinjaman moneter kepada *International Monetary fund* (IMF), (Keumala Sari & Fakruddin, 2016).

Pada tahun 1998 krisis ekonomi yang terjadi mendekati puncaknya dan terlihat akan segera pulih dari kehancuran ekonomi ditandai dengan pertumbuhan sebesar 13,1% yang menunjukkan perkembangan ekonomi mulai menjerus ke arah positif. Namun begitu, imbas krisis ekonomi belum sirna dari kehidupan publik. Salah satu imbas dari krisis ekonomi tersebut yang sangat dirasakan oleh masyarakat yakni terjadinya perubahan secara fundamental tatanan ekonomi, sosial, politik, serta budaya yang memastikan arah kehidupan bangsa, (R. F. Lubis & Batubara, 2023). Akibat krisis ekonomi tersebut, terjadi kelesuan ekonomi akibat rendahnya daya beli masyarakat, apalagi dengan tingginya harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan dan terjadinya PHK dimana-mana, serta terjadinya gejolak sosial politik dimana pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Permasalahan sosial yang timbul diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi yang semakin berlebihan sehingga mengakibatkan ikatan primordial menjadi renggang.

2. Kekuasaan Politik Otoritarianisme

Otoritarianisme ala orde baru berbentuk pembatasan kebebasan sipil, baik kebebasan berpendapat oleh masyarakat maupun kebebasan pers serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan untuk mencegah gerakan-gerakan yang dianggap dapat mengganggu jalannya pemerintahan dengan melibatkan institusi militer.

Politik orde baru dibawah presiden Soeharto selama 32 tahun ditandai dengan sentralisasi yang semakin dominan dimana aparat negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat (Farchan, 2022). Pada awal orde baru, pemerintah menjalankan politik dibawah kendali kekuatan institusi militer yang kemudian mengalami pergeseran mulai tahun 1980-an dimana politik Indonesia

menjadi tersentralisasi pada kepemimpinan Soeharto sebagai personal (Pratikno, 1998).

Depolitisasi Indonesia yang dilakukan oleh Soeharto menuntut para menteri untuk tidak membuat kebijakan sendiri melainkan harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan olehnya sebagai presiden dengan menggunakan partai Golkar miliknya sebagai kendaraan parlementer yang kuat. Partai Golkar dibangun menjadi suatu alat agar mayoritas suara ketika pemilihan umum akan terus mendukung pemerintah mengakibatkan suasana demokrasi menjadi mati.

Puncak dari kebijakan otoriter Soeharto ialah pasca terjadinya peristiwa Kerusuhan Malari yang tidak dapat dikendalikan. Kerusuhan sosial tahun 1974 tersebut merupakan aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung menjadi kerusuhan ketika menyambut kedatangan perdana menteri Jepang yang dianggap sebagai representasi modal asing yang merugikan rakyat Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi dikemudian hari, Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih menekan dimana para jurnalis ditahan tanpa persidangan, dua belas surat kabar kemudian ditutup, serta aksi demontsrasi ditanggapi dengan represif oleh pihak keamanan (Schaar Der Van et al., 2024). Kekerasan adalah instrument pokok yang digunakan oleh presiden Soeharto dalam menciptakan stabilitas politik di Indonesia dengan membatasi kekuatan oposisi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Kontrol terhadap aktivitas masyarakat dilakukan dengan membentuk badan intelejen BAIS (Badan Intelejen Strategis) yang berhubungan langsung dengan markas besar ABRI, dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang menyentuh langsung aktivitas masyarakat sampai ke desa. Adapula Lembaga represi Kopkamtib yang salah satunya bertugas mengawasi pers dan aktivitas-aktivitas yang kritis terhadap pemerintah(Pratikno, 1998).

Rezim orde baru dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) timbul persepsi yang buruk utamanya hal kebebasan berpendapat, sehingga terjadi diskriminasi terhadap ide ataupun gagasan yang dianggap bertolak belakang terhadap pemerintahan orde baru yang kemudian hal tersebut dapat dianggap makar dan bertentangan dengan negara (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023). Rezim Soeharto menjadikan hukum sebagai alat untuk mengontrol dan mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan sikap tidak percaya dari masyarakat karena keadilan susah untuk ditemukan. Atas kebijakan-kebijakan orde baru ini tentu membuat semakin sempitnya ruang untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap masyarakat.

3. Meningkatnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

Catatan Sejarah mengenai korupsi dalam peradaban manusia dapat ditelusuri bahkan dari zaman Romawi Kuno, dimana pada zaman tersebut bentuk korupsi yang lazim digunakan ialah penyuaipan terhadap aparat penegak hukum seperti hakim dalam suatu perkara (Eggi Sudjana, 2008). Korupsi pada zaman Kerajaan Babilonia juga marak terjadi sehingga Raja Hammurabi pernah memberikan ancaman hukuman mati untuk pelakunya, hal ini dilakukan dalam upaya menyelamatkan negara beserta rakyatnya dari mental-mental korupsi (Alatas, 1987). Dari catatan Sejarah ini menunjukkan betapa bahayanya mental korupsi yang dapat menjadi batu sandungan dalam kemajuan suatu bangsa.

Sejarah Perilaku korupsi di Indonesia merebak pada masa Kolonial Belanda ketika VOC berada di Indonesia yang mengakibatkan kebangkrutan organisasi dagang tersebut. Namun jauh sebelum itu, Kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia seperti Mataram, Majapahit, Singosari, Demak dan Banten hancur dikarenakan konflik kekuasaan dengan motif untuk memperkaya diri (Rahayu, 2004).

Tumbuh suburnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia seakan mencapai puncaknya pada era orde baru karena karakter pemerintahan yang bersifat otoriter dan ketiadaan transparansi memberikan peluang dan mendorong timbulnya watak-watak KKN seseorang (Muslim & KPTPK, 2004). Korupsi transaksional menjadi marak karena rezim orde baru melakukan intervensi pada berbagai sektor sehingga muncul berbagai persekongkolan antara birokrasi dan para pengusaha dengan justifikasi program pembangunan ekonomi. Penyalahgunaan uang negara menjadi hal yang biasa, terjadinya rekayasa tender proyek-proyek Pembangunan, pemborosan dana-dana pada instansi negara, dan skandal beras bulog (M. Lubis, 1997).

Skandal *mismanagement* Pertamina yang menghasilkan utang negara begitu besar, serta banyaknya petinggi-petinggi ABRI dan pensiunan militer yang turut andil dalam bisnis jual beli pupuk, tepung terigu dan kapal tanpa lewat prosedur umum sehingga membuat masyarakat pesimis terhadap pemerintahan Soeharto dan lembaganya dalam membasmi korupsi. Terbongkarnya praktek KKN oleh presiden Soeharto dengan melibatkan keluarga-keluarganya menjadi bukti bahwa pada periode orde baru pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena kekuasaan Soeharto dengan sistemnya yang sentralistik menutup peluang tersebut dilaksanakan (Muslim & KPTPK, 2004).

12.2. Lahirnya Reformasi

Reformasi Indonesia 1998 merupakan sebuah gerakan dari masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa menuntut perubahan secara fundamental kehidupan bernegara di bawah pemerintahan rezim Soeharto atau yang disebut sebagai rezim orde baru dengan kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat melalui sistem politik represi dan sistem sosio-ekonomi

lembaga-lembaga negara yang korup. Gerakan sosial ini sebagai klimaks atas kegagalan rezim Soeharto menjalankan demokrasi Pancasila yang berkeadilan sosial. Gerakan sosial merupakan reaksi atas situasi kritis yang dialami masyarakat sehingga menuntut basis baru bagi kehidupan sosial yang lebih ideal (Prasisko, 2016). Reformasi Indonesia adalah usaha untuk menata kehidupan bernegara ke arah yang lebih baik setelah 32 tahun masa orde baru berkuasa dan dianggap tidak cocok lagi untuk Indonesia (Nugroho, 2015). Perubahan tersebut meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, dan hukum serta budaya (Sirot Ikhsan & amdan, 2020).

Kronologi Gerakan reformasi ini secara garis besar bermula ketika diadakannya sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang memilih Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden dan wakil Presiden dengan masa jabatan 1998-2003 disertai pembentukan dan pelantikan Kabinet Pembangunan VII yang oleh mahasiswa dianggap begitu sarat dengan kolusi dan nepotisme (Baity, 2016). Hal ini mendorong segenap mahasiswa dari berbagai daerah untuk bergerak ke jalan-jalan dan gedung pemerintahan melakukan demonstrasi. Kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan sebagai yang menjadi momentum titik awal peristiwa reformasi Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi pada tanggal 12-13 Mei di ibu kota Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 14-15 Mei terjadi di kota Solo Provinsi Jawa Tengah (Sirot & Atmaja, 2020). Tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti Jakarta (Elang Mulia Lesmana, Hafidin A. Royan, Hery Hartanto, Hendrawan Sie) dalam bentrokan dengan aparat keamanan pada demonstrasi tanggal 12 Mei 1998 merupakan pemicu terjadinya kerusuhan (Sirot & Atmaja, 2020).

Opini publik secara nasional yang anti pemerintah semakin tinggi dengan kasus tewasnya beberapa mahasiswa tersebut dan semakin meningkatkan solidaritas masyarakat diseluruh penjuru Indonesia. Berbagai kecaman dengan emosional terbit di berbagai

media baik cetak maupun elektronik untuk rezim Soeharto. Begitu juga tokoh-tokoh politik dan intelektual seperti Megawati dan Amin Rais datang ke Universitas Trisakti sebagai bentuk solidaritas dan kecaman terhadap aksi kekerasan pemerintah melalui aparat keamanannya. Akibat dari tewasnya mahasiswa tersebut huru-hara di Kota Jakarta semakin tidak terkendali dan demonstrasi terjadi di kampus-kampus dan pusat-pusat kota baik di luar maupun di dalam pulau Jawa. Ada enam point tuntutan dalam Reformasi (Prasisko Yongki Gigih, 2016):

1. Penegakan supremasi hukum
2. Pemberantasan KKN/reformasi birokrasi
3. Mengadili Soeharto dan kroninya
4. Amandemen konstitusi
5. Pencabutan dwi fungsi ABRI, dan
6. Pemberian otonomi daerah

Presiden Soeharto yang saat itu berada di Cairo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15 akhirnya menyatakan siap mengundurkan diri secara konstitusional jika memang rakyat sudah tidak menginginkan jabatan presiden dipegang oleh dirinya. Tanggal 15 Mei Soeharto tiba di Jakarta setelah lawatan kenegaraan tersebut dan pada tanggal 16 Mei pimpinan DPR yang saat itu dijabat oleh Harmoko dan wakilnya Syarwan Hamid, Ismail Hasan dan Abdul Gafur bertemu di Cendana untuk menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang meminta pengunduran dirinya. Presiden Soeharto berjanji akan melaksanakan reshuffle kabinet dan bersedia melakukan reformasi. Sejak saat itu, mulai tanggal 17-20 Mei 1998 massa dari berbagai elemen yang dimotori mahasiswa mulai bergerak menduduki Gedung MPR dan DPR menuntut secepatnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden (Supriyanto, 2022).

Tanggal 20 Mei Harmoko atas desakan mahasiswa mengeluarkan pernyataan pers memberikan batas waktu bagi Soeharto hingga tanggal 22 Mei 1998 untuk mundur, dan jika tidak maka akan melakukan sidang Istimewa MPR Bersama dengan fraksi-fraksi MPR (Syam, 2008). Soeharto semakin terpojok setelah koalisi kelompok Habibie, Hendropriyono, Akbar Ginanjar dan Harmoko bersatu melalui keputusan 14 menteri mendesak pengunduran diri Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998 tepat pukul 09.06 WIB presiden Soeharto di dampingi B.J Habibie sebagai wakilnya menyatakan pengunduran dirinya di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui televisi (Supriyanto, 2022). Pengunduran diri Soeharto yang selama 32 tahun memimpin sebagai presiden menandai berakhirnya rezim orde baru dan Indonesia memasuki era baru dengan agenda reformasi yang hingga saat ini masih terus ditata menuju arah Indonesia yang lebih baik.

12.3. Masa Transisi

Pasca berakhirnya orde baru dengan pengunduran diri Soeharto tanggal 21 Mei 1998 sebagai presiden, Indonesia memasuki masa transisi dengan B.J.Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Periode masa transisi dengan kabinet baru belum memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang ekonominya hancur pasca krisis moneter. Hal ini disebabkan oleh semua orang masih fokus mengurus politik sehingga kepentingan masyarakat secara ekonomi terabaikan yang pada akhirnya dimasa transisi ini ketimpangan ekonomi terlihat sangat mencolok. Situasi ini mulai menimbulkan sentiment sosial yang tinggi terhadap *people power*. Dari sisi politik terlihat perubahan yang signifikan dimana banyak partai politik yang bermunculan dengan tujuan masing-masing, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Sementara dalam bidang sosial reformasi membentuk masyarakat yang

individualis dan bersekat karena rasa traumatik akibat penjarahan, pembakaran, pemerkosaan terutama mereka orang-orang keturunan tionghoa yang banyak menjadi korban (Sirot & Atmaja, 2020).

Dalam setahun jabatannya Habibie berjalan dengan tuntutan kebebasan pers, reformasi UU, dan desakan agar segera melaksanakan pemilu pada 7 juni 1999 (Attahara, 2017). Desakan ini muncul karena ada kekhawatiran publik bahwa presiden B.J.Habibie masih kroni dari rezim orde lama sehingga agenda reformasi tidak dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari melunaknya sikap para elit-elit politik terhadap pemerintahan transisi, berbeda dengan sikap Ketika Soeharto masih menjadi presiden (Suparno, 2012). Habibie yang memiliki mandat pemerintahan transisional berkonsentrasi dalam upaya mendorong sesegera mungkin reformasi dengan membentuk komite atau panitia pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Setelah melalui berbagai tahapan persiapan seperti menghasilkan UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU No.3 tahun 1999 mengenai pemilu, dan UU No. 4 1999 mengenai susunan dan kedudukan DPR, MPR, DPRD I, DPRD II, pendaftaran partai politik serta seleksi partai politik, pemilu demokratis pertama dilaksanakan secara serentak pada 7 Juni 1999. Pemilu ini berjalan dengan damai dengan lima pemenang partai politik dari 48 partai yang ikut sebagai peserta. Kelima partai tersebut dengan suara teratas adalah PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan partai PAN. Tanggal 20 Oktober 1999 Abdurahman Wahid (PKB) terpilih menjadi presiden, dan sehari setelahnya Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi wakil presiden, dan MPR diketua oleh Amin Rais yang terpilih dihari berikutnya. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru melalui pemilu yang demokratis masa pemerintahan transisi B.J.habibie berakhir (Ardiantoro, 2022).

Rezim Habibie juga berupaya tampil reformis di bawah ketidakpercayaan public dengan kebijakannya memberikan

referendum kepada Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri, pelepasan tahanan politik, memberi kebebasan kepada pers, dan menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Aam. (2012). Pengantar Ilmu Sejarah (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Alatas. (1987). Korupsi sifat, sebab dan fungsi Vol. 1. LP3ES.
- Ardiantoro, J. (2022). Negara dan Polarisasi Politik: Pelajaran dari Pemilihan Umum 1999. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 3 (1), 1–10. <https://doi.org/10.47776/mjprs.003.01.01>
- Attahara, H. (2017). Demokratisasi di Negara Muslim: Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 di Indonesia dan Gejolak Revolusi Mesir 2011. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2, 155–167. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1109677&val=16713&title=DEMOKRATISASI%20DI%20NEGARA%20MUSLIM%20TRANSISI%20MENUJU%20DEMOKRASI%20PADA%20MASA%20REFORMASI%201998%20DI%20INDONESIA%20DAN%20GEJOLAK%20REVOLUSI%20MESIR%202011>
- Baity, A. N. (2016). Persepsi Aktivistis Mahasiswa 1998 tentang Demonstrasi Tahun 1998 dalam Rangka Menurunkan Soeharto. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 4(3).
- Eggi Sudjana. (2008). Republik tanpa KPK koruptor harus mati (Budi Prasetyo & Anang Harris, Eds.). JP Books. Jakarta
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 115.
- Karmeli, E. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sumbawa. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2), 2–2008.

- Keumala Sari, P., & Fakruddin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun. *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(2), 377–388.
- Lubis, M. (1997). Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya (Vol. 2). Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, R. F., & Batubara, C. (2023). Strategi Manajemen Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 1(6), 819–825.
- Muslim, M., & KPTPK, J. P. M. (2004). Gerakan Rakyat Anti Korupsi (*GERAK Indonesia*). Jakarta.
- Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang, terj. *Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Prasisko Yongki Gigih. (2016). Gerakan Sosial Baru. *Jurnal pemikiran Soosiologi*, 3, 9–16. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23532/15529>
- Pratikno. (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 1998*, 2(2).
- Rahayu, A. (2004). Sejarah Korupsi di Indonesia. Amanah. Jakarta
- Schaar Der Van, Cox Richard, Priyambada Reza, Winardi Wusnu, & Jamzuri Maisaroh. (2024). Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter. Indonesia Investments. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180?>
- Siroto, I., & Atmaja, H. T. (2020). Reformasi dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesia history*, 2, 100–107. [file:///C:/Users/dell/Downloads/45435-Article%20Text-128299-2-10-20210604%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/45435-Article%20Text-128299-2-10-20210604%20(1).pdf)

- Suparno, B. A. (2012). Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto. <http://eprints.upnyk.ac.id/19312/1/FULL%20Buku%20Reformasi%20dan%20Jatuhnya%20Suharto.pdf>
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i2.15>
- Syam, F. (2008). Berhentinya Soeharto, Fakta Dan Kesaksian Harmoko. In *(No Title)* (1st ed., Vol. 1). Gria Media Prima. <https://lccn.loc.gov/2008338337>
- Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>

PROFIL PENULIS



Ahmad, S.Pd., M.Pd
Dosen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Beberapa buku yang telah diterbitkan sebagai anggota penulis diantaranya “Peradaban Patowonua di Kabupaten Kolaka Utara” diterbitkan oleh HISPISI Sulawesi Tenggara dan buku “Perjuangan Tojabi Melawan Imperialisme Belanda dan Jepang di Kolaka Utara dan Luwu” diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sejarah Nasional Indonesia merupakan karya epik yang mengajak pembaca untuk menelusuri perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga era kontemporer Indonesia. Buku ini mengupas berbagai babak penting dalam sejarah Indonesia, termasuk perkembangan kerajaan-kerajaan besar Nusantara; periode penjajahan oleh bangsa Eropa; perjuangan panjang menuju kemerdekaan; hingga dinamika politik, sosial, dan budaya setelah Indonesia merdeka. Dikemas secara kronologis dan didukung oleh berbagai data serta fakta sejarah yang akurat, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting yang membentuk Indonesia sebagai bangsa. Setiap babnya dirancang untuk menggambarkan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana Indonesia tumbuh dan berkembang di tengah berbagai tantangan zaman.



Penerbit
Gita Lentera

ISBN 978-623-8708-80-2



Office 1: Per. Permata Hijau Regency Blok/F1 Kelurahan Pitsang
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Office 2: Jl. Weling No. 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: 085156902329
gitalentera.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA